

HUT KE-75 MPR RI: MPR PENGATUR CUACA DAN IKLIM AGAR KEHIDUPAN BERBANGSA TETAP TEDUH

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.09/TH.XIV/SEPTEMBER 2020



SIDANG TAHUNAN MPR 2020

Berlangsung Dalam Keterbatasan Tapi Tetap Khidmat

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Perspektif
Merawat Ketahanan Komunal
di Tengah Pandemi Covid-19

28 Nasional
Akuntabilitas Laporan
Kinerja Lembaga Negara

39 Selingan
Menunggu Ilmuan
Peyelamat Ummat Manusia

52 Majelis Khusus
Momentum Refleksi dan
Evaluasi Sistem Ketatanegaraan



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.XIV/SEPTEMBER 2020



08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020

Agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2020 dilaksanakan dengan segala keterbatasan di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis.



18 Nasional Peringatan HUT ke-75 MPR RI: Seminar Pembentukan Majelis Syuro Dunia



52 Majelis Khusus Hari Konstitusi: Momentum Refleksi dan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan



39 SELINGAN Penyelamat Ummat Manusia



76 Profil Fadel Muhammad

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	36
Sosialisasi	56
Varia MPR	67
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.09/TH.XIV/September 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Sidang Tahunan MPR 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan untuk masuk ke Gedung Nusantara guna mengikuti Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR para peserta harus menyertakan surat keterangan telah melakukan PCR *swab test* dan *rapid test*. Protokol kesehatan ini dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Inilah yang membedakan Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya dengan Sidang Tahunan MPR di masa pandemi ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR digelar dalam keadaan normal maka wajar kalau berlangsung semarak dan meriah. Tapi, karena kondisi tak normal maka Sidang Tahunan MPR kali ini digelar lebih sederhana. Agenda acara dipersingkat dan ada pembatasan kehadiran fisik para anggota MPR dan undangan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Jadi, pandemi Covid-19 membuat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2020 ini lebih ringkas.

Pimpinan MPR menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang telah menghadiri secara fisik Sidang Tahunan MPR yang disatukan dengan Sidang Bersama DPR – DPD. Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengikuti Sidang Tahunan MPR 2020 secara virtual. Selain itu, tokoh-tokoh lainnya yang mengikuti Sidang Paripurna MPR ini, antara lain Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden kesembilan Hamzah Haz, dan Wakil Presiden kesebelas Budiono.

Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin MPR setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak MPR masa jabatan 2014 – 2019. MPR menggelar Sidang Tahunan sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Dengan Sidang Tahunan MPR, rakyat bisa mendapatkan informasi tentang apa-apa yang sudah dilaksanakan lembaga negara selama satu tahun.

Sidang Tahunan MPR juga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga-lembaga negara kepada rakyat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kerjanya dalam Sidang Tahunan MPR adalah lembaga-lembaga negara yang mendapat mandat dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Sidang Tahunan MPR 2020 semula direncanakan masing-masing pimpinan lembaga negara akan menyampaikan laporan kerjanya secara langsung kepada rakyat. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, laporan kinerja lembaga-lembaga negara dirangkum dan disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara secara virtual kepada publik.

Meski berlangsung sederhana dengan segala keterbatasan, Sidang Tahunan MPR tetap memiliki makna yang penting. Dengan Sidang Tahunan MPR kita menegaskan kedaulatan rakyat dan melembagakan demokrasi dengan cara yang terbuka dan transparan. Sidang Tahunan MPR menjadi momentum bagi rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara. Semoga Sidang Tahunan MPR memberi satu dampak positif bagi masyarakat. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,

Tengku Novan Muda Mulya,

Yenita Revi, Ikhwan Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Armansyah,

Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

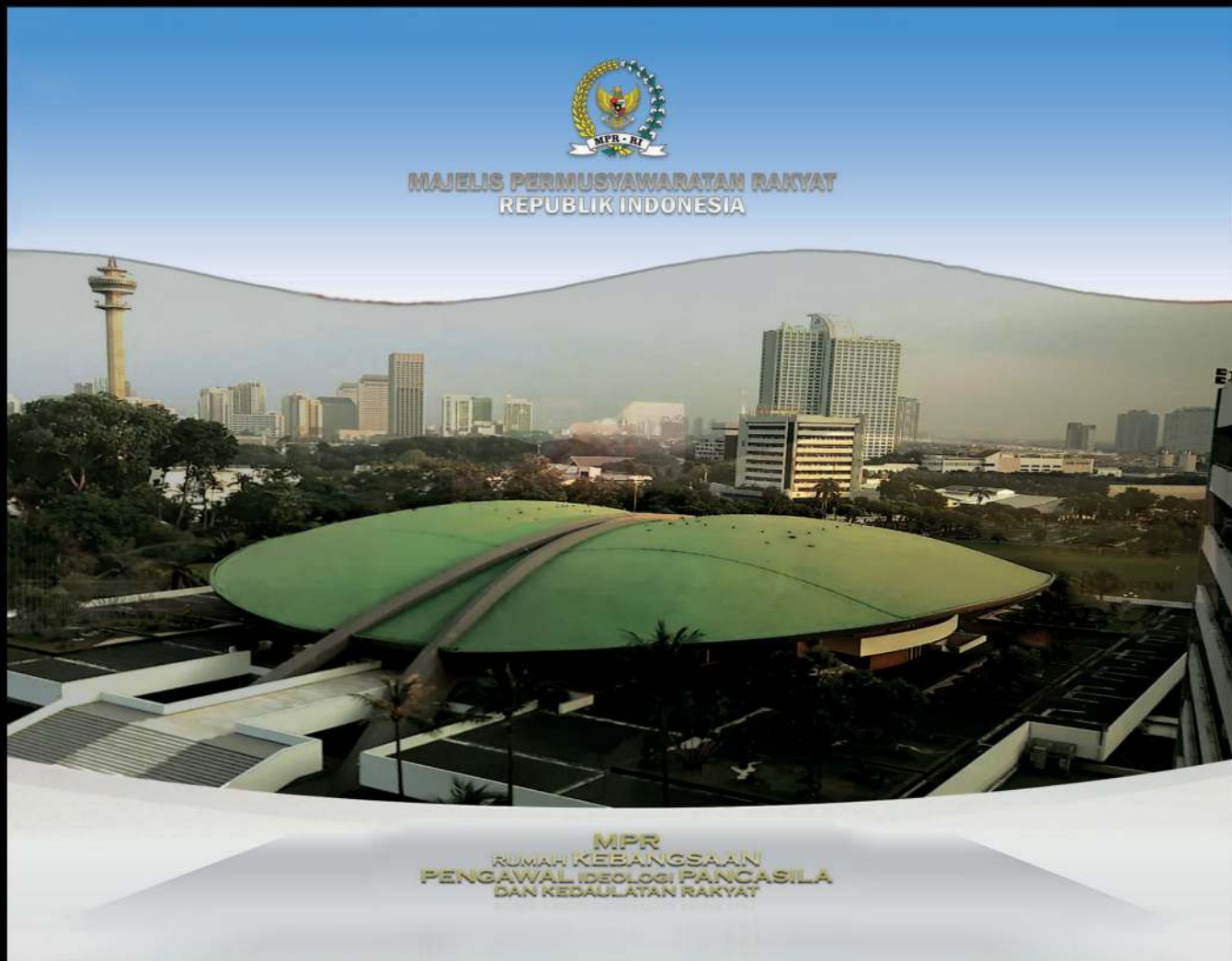
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



EMPAT PILAR MPR RI

- Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
- NKRI Sebagai Bentuk Negara
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Merawat Ketahanan Komunal di Tengah Pandemi Covid-19

UNTUK merawat ketahanan komunal di tengah pandemi Covid-19, pemerintah segera merealisasikan sejumlah program baru yang menasar berbagai elemen masyarakat. Ketahanan komunal akan terwujud jika setiap komunitas merespons program-program baru itu dengan cara yang amat sederhana, yakni peduli dan menerapkan protokol kesehatan.

Tanpa bermaksud mengada-ada, kepatuhan semua orang akan protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini memang menjadi kata kunci yang akan memungkinkan masyarakat memulihkan semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang patut ditiru. Berkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah negara berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 hingga ke level terendah, dan negara-negara itu mulai berupaya memulihkan kehidupan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan sangat berhati-hati. Sebaliknya, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat sangat tajam dan nyaris tak terkendali karena minimnya kesadaran banyak komunitas akan urgensi mematuhi protokol kesehatan.

Ketika Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk dan memfungsikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang tentu paham kemana arah dan tujuan dari inisiatif itu. Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman Covid-19, dan sekaligus merawat ketahanan ekonomi semua komunitas. Di awal pandemi hingga kini, pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan menitikberatkan pembiayaan untuk keperluan bantuan sosial bagi semua kelompok masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran itu berhasil mencegah panik dan takut berlebihan. Kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan terlindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum bisa terjaga.

Demi mewujudkan ketahanan komunal itu, kini pemerintah melangkah ke fase berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-

19 mulai bekerja dengan fokus mendorong semua komunitas mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan target besar dan strategis ini, Presiden mendesak semua pihak bekerja all out. Presiden bahkan berulang kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Upaya ini diperkuat dengan menghadirkan dukungan dari TNI-Polri. Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu. TNI akan mendukung upaya



semua pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah merampungkan beberapa konsep program yang fokus pada upaya merawat ketahanan ekonomi sejumlah komunitas yang terdampak Covid-19, mulai dari komunitas pekerja, tenaga honorer, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk pelaku UMKM, Pemerintah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap unit usaha. Target program ini 12 juta pelaku UMKM. Ibu rumah tangga

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



yang mandiri pun tak luput dari perhatian.

Pemerintah menyiapkan stimulus usaha untuk ibu rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitur. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, pemerintah menyediakan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran Rp 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Bantuan dengan jumlah yang sama juga disiapkan pemerintah untuk komunitas pekerja berstatus pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana desa pun telah dialihkan untuk merawat ketahanan ekonomi warga desa.

Itulah beberapa langkah pemerintah yang ditujukan untuk merawat ketahanan setiap komunitas, baik dari aspek kesehatan atau potensi ancaman Covid-19, maupun dari aspek ekonomi warga. Dua aspek ketahanan itu akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya pemerintah, sebagian besar masyarakat pun amat prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Semua orang menderita dan dirugikan, termasuk anak-anak.

Kecenderungan sekarang ini tidak bisa dibiarkan, sehingga pemerintah telah mengambil beberapa prakarsa dengan mengerahkan semua daya dan strategi. Dengan berbagai cara dan

pendekatan, kesehatan masyarakat harus dilindungi dari ancaman Covid-19, dan pada saat bersamaan perekonomian masyarakat harus dikelola sedemikian rupa agar tidak terjerumus ke dalam krisis. Dua tujuan strategis ini bisa terwujud jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

Karena itu, setiap komunitas hendaknya mau bersinergi dengan aparaturnegara. Sebab, untuk meredam dan memutus rantai penularan Covid-19, Pemerintah bersama TNI-Polri telah memulai sejumlah pendekatan berskala masif. Semua upaya itu akan berhasil jika setiap komunitas peduli dan partisipatif. Jika setiap komunitas pada tingkat RT/RW peduli dan berpartisipasi menerapkan protokol kesehatan, upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19 akan berhasil, karena kesadaran dan peran masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan memerangi Covid-19.

Kesungguhan dan kerja keras pemerintah merespons ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 sekarang ini akan sulit, akan sia-sia jika semua komunitas tidak responsif. Kepedulian dan partisipasi setiap komunitas pada semua pemukiman sangat penting dan menentukan. Akan sangat ideal jika setiap pemerintah daerah tidak lagi hanya menerbitkan kebijakan atau instruksi, melainkan lebih mengedepankan ajakan kerjasama dengan mengarahkan setiap pengurus RT/RW hingga kepala desa dalam penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. □

Sidang Tahunan MPR 2020

Berlangsung **Dalam** Keterbatasan Tapi Tetap Khidmat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2020 dilaksanakan dengan segala keterbatasan di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis.

PAGI itu sudah tampak kesibukan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Di gedung inilah pada Jumat pagi, 14 Agustus 2020, digelar Sidang Tahunan MPR 2020. Petugas sudah menempati pos masing-masing, mulai pintu masuk hingga di ruangan sidang paripurna. Di pintu masuk, sebelum melewati pintu metal detector yang dijaga Paspampres, para petugas melakukan pemeriksaan ketat setiap orang yang akan masuk ke Gedung Nusantara. Untuk bisa masuk ke Gedung Nusantara, seseorang harus melengkapi dengan surat keterangan telah mengikuti rapid test atau swab test dari rumah sakit atau klinik.

Sejak pukul 07.30 WIB, para anggota dewan, baik anggota DPR maupun anggota DPD, mulai berdatangan ke Gedung Nusantara untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR ini. Anggota dewan tidak hanya mengisi daftar hadir, tetapi juga menunjukkan surat keterangan telah mengikuti swab test. Pun para jurnalis yang meliput di Gedung

Nusantara harus menunjukkan surat keterangan rapid test dan didata petugas. Dua hari sebelumnya, para jurnalis yang meliput di Gedung Nusantara telah mengikuti rapid tes yang difasilitasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rapid test dan PCR (polymerase chain reaction) swab test adalah dua metode yang dilakukan untuk mendeteksi virus Corona atau Covid-19. Rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah. Metode rapid test adalah memeriksa virus menggunakan antibodi IgG dan IgM. Jika di dalam tubuh terjadi infeksi virus maka jumlah IgG dan IgM dalam tubuh akan bertambah. Sedangkan pemeriksaan PCR swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Pemeriksaan PCR swab lebih akurat dan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus Covid-19 di dalam tubuh.

Memang, Sidang Tahunan MPR 2020 tak seperti Sidang Tahunan MPR tahun sebelumnya. Pada tahun ini MPR menggelar Sidang



Tahunan MPR di tengah pandemi Covid-19 (Corona Viruse Disease 2019). Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis. Perubahan dapat dilihat dari jumlah anggota yang hadir secara fisik sangat dibatasi hingga syarat ketat protokol kesehatan. Bahkan, protokol kesehatan diterapkan tanpa pandang bulu. Presiden atau siapa pun yang masuk area Gedung Nusantara wajib menjalani PCR swab test dan rapid test terlebih dahulu. Protokol ini berlaku untuk Presiden, Pimpinan MPR dan DPR serta DPD, dan anggota MPR yang hadir secara fisik dalam ruangan Sidang Paripurna.

Sidang Tahunan MPR juga digelar lebih sederhana. Sidang Tahunan MPR yang tahun sebelumnya digelar meriah, kini tampak

sederhana. Jika pada tahun sebelumnya Sidang Tahunan MPR ramai dengan peserta dan tamu undangan, bahkan tak ada para teladan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia yang biasa memadati lobi Gedung Nusantara III Gedung Nusantara IV dan Gedung Nusantara V. Kini terlihat lengang. Tidak ada keramaian sama sekali. Tak ada stan kuliner, dan tak ada pula bazar yang menawarkan produk-produk UMKM seperti Sidang-sidang Tahunan sebelumnya. Agenda Sidang Tahunan MPR 2020 ini lebih ringkas dan lebih sederhana.

Meski tak tampak keramaian dalam Sidang Tahunan MPR, pengamanan kompleks Parlemen, Jakarta, tetap ketat. Sejak sehari sebelum hari H, aparaturnya bersenjata lengkap sudah berjaga di jalan-jalan yang ada di sisi luar kompleks Parlemen. Di

dekat Gedung Nusantara, tepatnya di lapangan sepakbola terparkir tiga helikopter TNI AU dalam kondisi siaga. Selain itu, kendaraan Barracuda juga tampak siaga di belakang Gedung Nusantara. Begitu pula di Jalan Lapangan Tembak, Senayan, di sisi luar kompleks MPR juga tampak siaga dua kendaraan Barracuda.

Keamanan di area kompleks Parlemen pun memang super ketat. Akses masuk ke Gedung Nusantara, tempat berlangsungnya Sidang Paripurna MPR, pun dibatasi. Hanya tamu VIP dan undangan yang diperbolehkan masuk. Di depan Gedung Nusantara, persisnya di pintu masuk khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden, serta tamu undangan VIP telah siap siaga personel marching band. Mereka segera memainkan musik sebagai petanda kehadiran Presiden



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan Wakil Presiden.

Sidang Tahunan MPR digelar dengan tema khusus bernuansa “Kalimantan”. Ini terlihat dari pernak pernik Kalimantan yang menghiasi setiap sudut Gedung Nusantara. Ornamen-ornamen Kalimantan ada di bagian luar dan dalam Gedung Nusantara. Selain itu, juga ada tulisan-tulisan yang bertemakan HUT RI Ke-75. Tak ketinggalan, di tengah pandemi Covid-19, berbagai fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer telah disiapkan di setiap sudut gedung.

Para tamu undangan dan anggota MPR diarahkan ke eskalator untuk menuju ruang sidang. Protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat. Di eskalator ada gambar pijakan kaki sebagai tanda tempat untuk berdiri, dan pijakan yang tidak diperkenankan untuk berdiri. Gambar itu untuk mengatur jarak bagi tamu undangan dan anggota MPR yang naik menggunakan eskalator menuju ruang sidang di lantai 2 Gedung Nusantara. Sedangkan tamu VIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden, menggunakan lift menuju ruang sidang.

Di lantai 2 Gedung Nusantara tempat berlangsungnya Sidang Paripurna MPR telah disediakan tempat cuci tangan. Para tamu undangan dan anggota MPR yang masuk diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di balkon, tempat para jurnalis, kameraman dan fotografer pun diberi jarak antara satu orang dengan orang lainnya. Jurnalis yang meliput di balkon pun dibatasi jumlahnya.

Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden

Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Dalam Sidang Tahunan MPR ini Presiden menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sekitar pukul 08.23 WIB Presiden Joko Widodo tiba di Gedung Nusantara. Presiden mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Presiden Jokowi disambut Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang telah tiba lebih dahulu.

Sebelum Presiden tiba, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin telah datang terlebih dahulu. Presiden dan Wakil Presiden tampak mengikuti protokol kesehatan ketat, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Beberapa menteri dan pimpinan lembaga

negara juga sudah hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud, MD., dan Ketua DPR Puan Maharani. Semuanya menggunakan masker sembari menerapkan protokol kesehatan ketat.

Hadir pula Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, para pimpinan lembaga-lembaga negara. Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti jalannya Sidang Tahunan secara virtual. Tokoh lainnya yang mengikuti Sidang Tahunan MPR, antara lain Wakil Presiden ke-





6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-11 Budiono.

Sederhana

Tepat pukul 9.00 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, memasuki ruang sidang paripurna. Para Wakil Ketua MPR yang telah hadir di antaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hidayat Nur Wahid hadir secara virtual.

Setelah menempati posisi masing-masing, sidang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" yang diiringi musik dari Gita Mahasiswa Orchestra. Selesai menyanyikan lagu kebangsaan dan mengheningkan cipta, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai pimpinan sidang membuka Sidang Tahunan MPR.

"Sesuai catatan daftar hadir yang disam-



paikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 161 anggota dari 307 anggota MPR yang diundang hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar hadir, serta 274 anggota MPR yang hadir secara virtual. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5)

Peraturan Tata Tertib DPR RI, serta Pasal 264 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD RI, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden dalam rangka Penyam-



paian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Bamsoet membuka sidang.

Dalam pidato pengantarnya, Bamsoet mengawali dengan mengucapkan rasa syukur karena agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD bisa dilaksanakan dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Namun demikian, kami yakin bahwa keterbatasan dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tidaklah mengurangi semangat kenegarawanan kita semua untuk terus bergotong royong, membangun kebersamaan, dan persatuan di atas pondasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” katanya.

Ketua MPR mewakili pimpinan dan seluruh

anggota MPR juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Bamsoet kemudian menjelaskan tentang arti penting agenda kenegaraan Sidang Tahunan MPR.

“Sidang Tahunan MPR yang telah diselenggarakan sejak MPR masa jabatan 2014 – 2019 telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapai kaidah konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara,” jelasnya.

“Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR memiliki arti sangat penting bagi lembaga-lembaga negara, menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945,” sambungnya.

Bamsoet menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR bukanlah agenda seremonial belaka, tetapi agenda penting ketatanegaraan yang sarat dengan esensi demokrasi berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

“Sidang Tahunan MPR menjadi wahana menumbuhkan demokrasi yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara sesuai amanat konstitusi. Juga niscaya menjadi ruang untuk melakukan evaluasi dan refleksi bagi masyarakat atas pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, implementasi prinsip checks and balances guna mewujudkan mekanisme kontrol dan keseim-

bangun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” paparnya.

Dalam pengantarnya Bamsuet juga menyinggung pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan maupun pendidikan, tetapi juga terhadap perekonomian. Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 minus 5,32%. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret mendorong ekonomi sektor riil, seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha, meningkatkan penyaluran bantuan sosial, mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dalam menghadapi

pandemi Covid-19, dan tetap optimistis keadaan akan membaik.

“Pimpinan dan anggota MPR memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menynergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sangat tepat, mengingat persoalan ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Selanjutnya Bamsuet sebagai pimpinan sidang mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara (lihat bagian kedua “Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara”) sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum Presiden naik podium, Ketua MPR menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Ketua DPR Puan Maharani melanjutkan sidang hingga ditutupnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD diakhiri dengan doa dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar, dilanjutkan menyanyikan kembali lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. □

DER/BSC



Sidang Tahunan MPR 2020

Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara. Lembaga negara menyerahkan laporan kinerjanya kepada Pimpinan MPR selanjutnya MPR akan mempublikasikan secara virtual.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR 2020. Sebanyak 161 anggota MPR juga hadir di ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, sedangkan anggota MPR lainnya mengikuti sidang secara virtual.

Agenda kenegaraan yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan ini menjadi forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya adalah MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Sidang Tahunan MPR di tengah pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga Negara, karena tidak mungkin setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja secara langsung. Lembaga negara menyerahkan laporan kinerjanya kepada Pimpinan MPR selanjutnya MPR akan mempublikasikan laporan kinerja tersebut secara virtual.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengawali dengan penyampaian laporan kinerja lembaga MPR. "MPR dengan cepat membuat payung program baru berupa

MPR Peduli Melawan Covid-19 serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila, serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita," kata Presiden.

Selanjutnya, Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga DPR. "Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Juga Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah," katanya.

Selain itu, lanjut Presiden, agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19.

Tidak hanya DPR, Presiden Jokowi juga melaporkan respons cepat DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi melalui BUM-Des, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul

inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Untuk lembaga negara BPK, Presiden menyampaikan laporan bahwa BPK telah bekerja secara cepat dan cermat di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi Covid-19. BPK telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2019. BPK juga telah memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah serta memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun. "Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa internal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB," kata Presiden.

Untuk kinerja Mahkamah Agung (MA), Presiden menyampaikan, MA juga menjamin

kecepatan pelayanan persidangan di masa pandemi Covid-19. “Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka,” jelas Presiden.

Presiden menambahkan, untuk terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. “Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan,” tutur Jokowi.

Presiden melanjutkan bahwa keberhasilan MA tersebut tidak lepas dari kinerja Komisi

“MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di tahun 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang,” paparnya.

Pada saat yang sama, sambung Presiden, MK juga memperluas dan meningkatkan kerja sama di dalam maupun di luar negeri. “MK aktif menginisiasi dan mengoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia,” ucap Presiden.

“Pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian,” kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan food estate untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat



Yudisial (KY) dalam menjalankan kewenangannya. “Dengan kewenangannya, KY telah memperlancar pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial,” ujarnya.

“Demikian pula dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemanfaatan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi,” imbuh Presiden.

Dalam hal laporan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap kecepatan dan kecermatan MK. Menurut Presiden, MK terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

Untuk lembaga kepresidenan, Jokowi menyampaikan laporan kinerja pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. Semua negara, termasuk Indonesia, sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua minus 5,32%. Pandemi Covid-19 yang sebelumnya menimbulkan krisis kesehatan kini mulai berdampak pada perekonomian nasional.

Presiden melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi, dan diskon tarif listrik. Selain itu membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja.

sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

“Selain food estate, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kawasan industry serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM,” paparnya. □

BSC

Apresiasi Terhadap Sidang Tahunan MPR 2020

SIDANG Tahunan MPR 2020 sudah digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020. Sidang Paripurna MPR dengan agenda pidato Presiden tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, para pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta anggota MPR. Sidang Tahunan MPR juga diikuti secara virtual para tokoh bangsa, seperti Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Sidang Tahunan MPR digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR-DPD dengan agenda mendengarkan pidato Presiden menyambut HUT Ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19, sidang paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, menjaga jarak, bahkan melengkapi surat keterangan telah menjalani PCR swab test dan rapid test untuk mengikuti sidang) sehingga Sidang Tahunan MPR hanya diikuti secara terbatas anggota MPR.

Syariefuddin Hasan Wakil Ketua MPR

Khidmat Tanpa Mengabaikan Protokol Kesehatan



WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR yang disatukan dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Sebab, dalam kondisi yang sangat terbatas akibat pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR bisa dilaksanakan secara khidmat tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Semua peserta sidang paripurna, termasuk Presiden dan Wakil Presiden mematuhi semua protokol kesehatan.

Syarief Hasan menilai, Sidang Tahunan MPR mempunyai kedudukan yang penting sebagai konvensi ketatanegaraan. Melalui forum inilah lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja selama setahun secara langsung kepada rakyat. Semula pimpinan lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerja itu, namun dalam kondisi pandemi Covid-19, rencana itu urung dilakukan dan laporan kinerja lembaga negara disampaikan Presiden sebagai kepala negara.

"Melalui forum Sidang Tahunan MPR ini, kita bisa menunjukkan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang menjalankan keterbukaan kinerja presiden dan lembaga-lembaga negara kepada

rakyat menjadi asas yang mesti dijunjung tinggi," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, usai Sidang Tahunan MPR.

Syarief Hasan juga mengingatkan poin-poin penting dari pidato Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian. Selama kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32%. Presiden menyampaikan pentingnya kebersamaan dan gotong royong untuk memulihkan perekonomian.

Mengingat situasi krisis itu, Syarif Hasan mendorong kementerian dan instansi pe-

merintah untuk menerjemahkan pesan presiden itu dalam program kerja yang konkret. Misalnya, keinginan Presiden untuk melakukan lompatan besar menghadapi Covid-19. Menurut Syarif Hasan, jajaran kementerian yang membantu presiden harus mampu menerjemahkan dan mengejawantahkan keinginan itu melalui program kerja dan melaksanakannya dengan cepat. Ini dapat dilihat dari beberapa kali teguran presiden kepada para menteri yang kurang mengambil langkah cepat.

"Sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, para menteri harus mengerti keinginan presiden untuk menjadikan krisis akibat pandemi Covid-19 ini sebagai lompatan untuk maju. Jangan sampai para menteri tidak memiliki sense of crisis seperti sering disampaikan presiden," ujar Syarif Hasan.

Dalam posisi itu, Syarif Hasan melanjutkan, pimpinan dan anggota MPR memberikan dukungan pada langkah-langkah pemerintah mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. "MPR telah berkomitmen melalui program MPR Peduli Melawan Covid-19 dan melakukan

berbagai kajian ketatanegaraan untuk membantu pemerintah menangani secara cepat pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR ini, Syarif Hasan menegaskan bahwa MPR akan terus mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pemasyarakatan atau Sosialisasi Empat Pilar MPR ke segala kalangan masyarakat. “MPR RI sebagai

rumah kebangsaan, pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat, akan terus menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Kami akan menjaga Pancasila dari segala ancaman ideologi dan pemikiran-pemikiran yang coba merongrong, mendistorsi, mengubah, dan mengancam Pancasila,” tegasnya. □

BSC

Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR

Momentum Melakukan Lompatan Besar

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid juga menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo yang hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR, dan menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Jazilul juga mengapresiasi pidato presiden dalam Sidang Tahunan MPR, terutama soal kinerja lembaga MPR.

Dari pidato presiden, Jazilul menangkap, Presiden Joko Widodo memuji langkah cepat MPR ikut menangani dampak pandemi Covid-19. Dalam pidato itu Presiden mengapresiasi langkah pimpinan lembaga negara yang sangat responsif terhadap kondisi sulit yang dihadapi pemerintah (negara) menangani dampak pandemi Covid-19.

Menurut Jazilul, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap lembaga MPR yang telah melakukan dua hal dalam kinerjanya. Pertama, MPR dengan cepat membuat program baru “MPR Peduli Melawan Covid-19” sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020. Kedua, MPR terus menyosialisasikan dan mengaktualisasikan Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi. “Presiden dalam Sidang Tahunan memberi apresiasi kepada MPR. Dan, kami juga mengapresiasi pidato presiden,” kata Jazilul Fawaid.

Dari pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2020, Jazilul mencatat beberapa poin penting. *Pertama*, Presiden mengajak semua elemen bangsa untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum kebangkitan baru dengan melakukan lompatan besar dengan melakukan perubahan secara fundamental di segala bidang, baik ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Menurut saya, ajakan presiden ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita semua harus menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai langkah untuk melakukan lompatan besar,” ujar politisi PKB ini.

Kedua, poin pidato Presiden yang mengumpamakan kondisi pandemi Covid-19 saat ini seperti sebuah komputer yang “hang”. Kehidupan seperti sebuah komputer. Ketika terjadi pandemi Covid-19, kehidupan pun berubah. “Hang itu bukan berarti rusak, dan



bukan pula mati, tetapi sedang ada gangguan sehingga sistem tidak berjalan,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil ini.

Karena itu, lanjut Gus Jazil, negara Indonesia dan negara lain di dunia yang terpapar Covid-19 sedang mengalami “hang” untuk kemudian sistem ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya menyesuaikan dan membuat sistem baru.

“Seperti komputer, saat ini sedang terjadi hang. Sehingga harus melakukan re-start. Indonesia pun harus me-restart kebijakan yang terkait dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya,” tutur pria asli Bawean, Gresik, Jawa Timur ini.

Poin *ketiga*, presiden menawarkan langkah konkret berupa memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebab, pandemi Covid-19 ini akan berimbas pada kelangkaan pangan dunia. Presiden menyebutkan telah mempersiapkan food estate di Kalimantan dan akan dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

“Ini sungguh sangat penting dan pasti berbasis pedesaan dan pertanian. Presiden menginginkan kenaikan dalam indeks kesejahteraan petani dan nelayan,” ujarnya.

Gus Jazil berharap presiden dan jajaran kementerian serta seluruh rakyat bisa melawan pandemi Covid-19 ini dengan mengubah mindset, cara pandang, meng-install, dan me-restart sistem di tengah krisis kesehatan dan ekonomi. □

BSC

Peringatan HUT Ke-75 MPR RI

MPR Pengatur **Cuaca** dan Iklim Agar Kehidupan Berbangsa Tetap Teduh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR akan selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan kehidupan berdemokrasi memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati, mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) memperingati secara sederhana Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 di tengah pandemi Covid-19. Peringatan HUT MPR ini juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Tamu dan undangan yang hadir mengenakan masker, menjaga jarak, dan di setiap meja disediakan hand sanitizer. Peringatan HUT MPR kali ini hanya diisi sambutan Ketua MPR, pemotongan tumpeng, dan dilanjutkan dengan Seminar Nasional tentang Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Suro Dunia.

Peringatan HUT Ke-75 MPR RI dengan tema “75 Tahun MPR Mewujudkan Indonesia Maju” berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Tampak hadir secara fisik Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR, yaitu: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, dan Syarifuddin Hasan.

Juga hadir secara fisik Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Pimpinan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Sedangkan yang hadir secara virtual adalah Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Zulkifli

Hasan, dan Fadel Muhammad.

Peringatan HUT MPR bertepatan dengan tanggal 29 Agustus. Pada tanggal dan bulan itu, 75 tahun lalu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan Badan Pembantu Presiden sebagai embrio lahirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang ini. Peringatan HUT Ke-75 MPR ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan proyeksi terhadap peran MPR ke depan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mengawali pidato HUT Ke-75 MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menguraikan perjalanan sejarah MPR RI dalam kurun waktu 75 tahun Indonesia merdeka yang telah mengalami pasang surut, cerah mendung, serta terang gelap. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, MPR RI telah mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan dan wewenangnya. Perubahan itu terjadi akibat perubahan sistem politik ketatanegaraan pada tahun 1949-1959, dan reformasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan MPR RI pada tahun 1999 sampai tahun 2002.

“Sejarah politik ketatanegaraan menunjukkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga Majelis



Permasyarakatan Rakyat tidak dikenal di dalam konfigurasi ketatanegaraan Indonesia. MPR RI baru hadir kembali dalam sistem ketatanegaraan seiring lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, karena Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku,” terang Bamsuet.

Selanjutnya, Dia mengungkapkan, pasca reformasi konstitusi (pasca perubahan UUD 1945), MPR memulai lembaran sejarah baru. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain. “Namun, berubahnya kedudukan serta wewenang MPR tidak berarti menghilangkan peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tetap merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi, dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi,” jelasnya.

Menurut Bamsuet, pemberian kewenangan tertinggi tersebut sejalan dengan ruh pembentukan lembaga MPR, yakni ruh

kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. “Spirit inilah yang kemudian dituangkan dalam Visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,” katanya.

“Sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, yang mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antarkekuatan sosial politik dan antar-kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, dalam setiap aktivitasnya, MPR RI selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan kehidupan berdemokrasi memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati. Aktivitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran,

amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa.

“Karena itulah, MPR RI senantiasa menjadi pengatur cuaca dan iklim agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai tantangan bisa tetap teduh dan kondusif. Agar gerak roda penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-citanya tetap stabil, selaras dan seimbang,” ujarnya.

Bamsuet melanjutkan, MPR juga mendapat tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan pemasyarakatan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), Bamsuet menyebut, nilai-nilai Empat Pilar MPR adalah legasi yang harus dijadikan sebagai warisan

kebangsaan yang mesti dijaga, dirawat, dan dihadirkan dalam setiap ruang publik dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa syukur atas warisan kebangsaan tersebut, rasanya tak salah jika kita memberikan penghargaan kepada almarhum Taufiq Kiemas sebagai ‘Bapak Empat Pilar MPR’ atas jasa beliau dalam membangun paradigma kebangsaan, merajut kebersamaan dalam keberagaman, dan menyatukan visi ke-Indonesiaan kita,” kata Bamsoet. □

BSC



Seminar Nasional HUT MPR

Wacana Pembentukan Majelis Syuro Dunia Mulai Raih Dukungan

Wacana MPR membentuk Majelis Syuro Dunia mendapat dukungan dari akademisi dan cendekiawan. Namun, yang perlu dipikirkan bagaimana agar Majelis Syuro Dunia ini nantinya lebih bermanfaat dari lembaga internasional yang sudah ada saat ini.



Hidayat Nur Wahid

WACANA pendirian Majelis Syuro Dunia yang diinisiasi MPR mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan cendekiawan. Dukungan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syuro Dunia yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-75 MPR, Sabtu (29/8/2020).

Peringatan HUT MPR yang dilanjutkan

seminar nasional itu berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD RI. Serta para narasumber terdiri dari: Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA.; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., CBE.; Akademisi/mantan Ketua Program Kajian Timur Tengah UI, Dr. M. Luthfi

Zuhdi, MA.; Akademisi/Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UI, Dr. Fitra Arsil., dan Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI, Kamapradita Isnomo.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam paparannya menyatakan, rencana MPR membidani lahirnya Majelis Syuro Dunia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alinea ke-

empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain berisi tentang perintah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, menurut Hidayat, menginisiasi berdirinya Majelis Syuro Dunia berarti melaksanakan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Saat ini penjajahan di atas dunia belum sepenuhnya hilang. Berdirinya Majelis Syuro Dunia diharapkan bisa menjadi media perundingan damai untuk memberikan kemerdekaan bagi negara terjajah, seperti Palestina,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. Artinya, tambah HNW, rencana MPR ini juga sesuai dengan alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

Untuk memulai mewujudkan mimpi MPR itu, langkah pertama yang paling mudah dilakukan adalah membentuk forum *ad hoc*, yang ujungnya terbentuk Majelis Syuro yang permanen. Indonesia sebagai inisiator mengundang negara lain yang memiliki pemikiran sama untuk membahas isu tertentu. Jadi, kata HNW, membuat forum seperti ini mestinya tidak ada halangan, apalagi forum *ad hoc* juga bisa mengkokohkan rencana pendirian Majelis Syuro yang seutuhnya. Sementara isu yang dibahas bisa tentang ekonomi, keadilan social, atau lingkungan.

Panen Dukungan

Ternyata rencana MPR membentuk Majelis Syuro Dunia mendapat tanggapan positif dari para narasumber dalam seminar ini. Azyumardi Azra, misalnya, menyebutkan bahwa adanya Majelis Syuro Dunia dapat membantu Indone-

Eropa ada kebiasaan dari salah satu anggotanya belajar tentang legislasi dan hukum tata negara di negara lain. “Kebiasaan ini belum banyak terdengar di Indonesia, dan itu bisa dilakukan dengan berdirinya Majelis Syuro Dunia,” ujar Azyumardi.

Agar berjalan efektif, Azyumardi berpesan, agar Majelis Syuro Dunia mengantisipasi beberapa persoalan yang mungkin timbul. Seperti, kontestasi pengaruh otoritas, rivalitas kepemimpinan menjadi orang kuat, besar kecil kontribusi pendanaan, rasisme keagamaan, sektarianisme aliran dan mazhab. Serta belenggu hubungan sejarah konflik.

Pendapat senada disampaikan Dr. M. Luthfi Zuhdi, MA. Mantan Ketua Program Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia mengatakan, hadirnya Majelis Syuro Dunia akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan lembaga kerjasama antarperlemen yang sudah ada selama ini. Apalagi, potensi yang

MAJELIS SYURO DUNIA INTERNASIONAL
Kartika, 29 Agustus 2020



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Rencana MPR membidani lahirnya Majelis Syuro Dunia, menurut HNW, sudah mendapat dukungan dari Majelis Syuro dan Raja Arab Saudi. Dukungan itu disampaikan saat MPR melaksanakan kunjungan muhibah ke negara itu beberapa waktu lalu. Dukungan juga diberikan oleh Parlemen Maroko. Bahkan, menurut HNW, Maroko berjanji akan mengusahakan dukungan serupa dari negara-negara sekitarnya.

Lebih HNW menyatakan, belum ada satupun lembaga yang secara definitif berperan menjadi Lembaga Majelis Syuro Dunia. Ada beberapa lembaga kerjasama antarparlemen, tetapi keanggotaannya tidak meliputi seluruh majelis permusyawaratan negara-negara pesertanya. “Padahal banyak negara yang memiliki sistem dua kamar,” ungkap Hidayat.

sia dalam meningkatkan bobot peran bangsa ini di mata dunia internasional. “Karena jumlah penduduk muslimnya paling banyak membuat Indonesia disegani dibanding negara lain. Sayangnya, kelebihan tersebut belum dimanfaatkan,” ungkap Azyumardi Azra.

Kehadiran Majelis Syuro Dunia atau Asosiasi Parlemen Dunia Islam, kata Azyumardi, akan memperkuat silaturahmi di antara negara-negara anggota. Selain itu, Majelis Syuro Dunia juga akan mengembangkan hubungan harmonis dan damai di antara anggota. Serta memperkuat kerjasama hukum tata negara, terutama di bidang legislasi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Kerjasama ini juga membuka kesempatan pengembangan anggota parlemen. Azyumardi memberi contoh di Parlemen

dimiliki Majelis Syuro Dunia sesungguhnya sangat besar. Saat ini, jumlah umat Islam dunia, sesuai data 2010, mencapai 2,2 miliar dari sekitar 6 miliar jumlah penduduk dunia.

Jika potensi itu bisa dikapitalisasi, menurut Luthfi, pengaruh yang muncul sangat besar. Namun, dia mengingatkan, sejumlah persoalan yang mungkin akan ditemui Majelis Syuro Dunia dalam perkembangannya. Dia lalu menyebut organisasi OKI contohnya. “Indonesia sudah berperan aktif dalam OKI. Sayangnya, terkait sengketa di Timur Tengah, Indonesia tidak bisa berperan secara maksimal. Ini perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Agar Majelis Syuro Dunia nantinya bisa lebih bermanfaat dari lembaga dunia yang sudah ada saat ini,” kata Luthfi. □

MBO

Media Expert Meeting I

Bamsoet: MPR Publikasikan Laporan Kinerja Lembaga Negara

Pada Sidang Tahunan MPR RI 2020 pada 2020 lalu lembaga-lembaga negara menyerahkan laporan kerjanya kepada pimpinan MPR RI. Selanjutnya, laporan kinerja lembaga negara tersebut dipublikasikan secara daring oleh MPR RI.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR Bambang Soesatyo ikut menghadiri *Media Expert Meeting* yang digelar Biro Humas MPR RI dengan tema “Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020). Selain dihadiri secara fisik oleh Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Media Expert Meeting ini juga diikuti secara virtual oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Acara ini juga dihadiri Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dan Kabag Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Budi Muliawan, serta sebanyak 26 perwakilan media (cetak, elektronik, dan online).

Kepada peserta Media Expert Meeting, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI yang diadakan pada 14 Agustus 2020

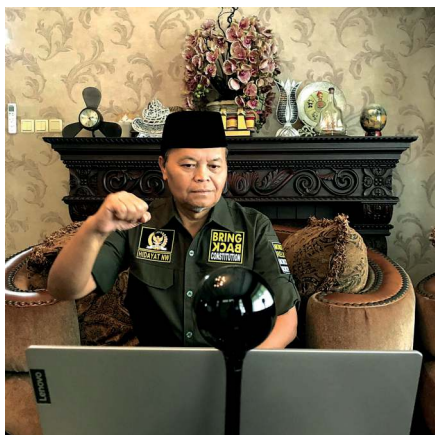
berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI sebelumnya. Pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini lembaga negara menyerahkan laporan kerjanya kepada pimpinan MPR RI. Selanjutnya, laporan kinerja lembaga negara tersebut dipublikasikan secara daring oleh MPR RI.

Bamsoet mengungkapkan, semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru, yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kerjanya. “Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga Negara, mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan, mereka menyambut baik,” katanya.

Namun, karena pandemi Covid-19, lanjut Bamsoet, inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR

sebelumnya. “Sebenarnya pimpinan MPR RI telah sepakat pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini para pimpinan lembaga negara dapat menyampaikan laporan kerjanya langsung ke masyarakat. Tetapi, karena pandemi Covid-19, hal tersebut belum bisa dilaksanakan. Karenanya, setelah laporan kinerja lembaga negara kita terima, pimpinan MPR RI mempublikasikan secara daring dengan menggunakan *youtube*, *video streaming* ataupun media sosial lainnya,” ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, setelah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, pihaknya mendatangi dan meminta pimpinan lembaga negara membacakan laporan kerjanya untuk direkam. Rekaman inilah yang dipublikasikan secara daring oleh MPR RI. Sebenarnya, “Kita mendorong pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan secara langsung laporan kerjanya



kepada masyarakat,” paparnya.

Namun, lanjut Bamsuet, lembaga negara yang belum bisa memberikan laporan kerjanya secara langsung pada Sidang Tahunan MPR RI 2020 akibat Covid-19, dapat disampaikan secara daring, tanpa mengurangi substansi laporan kinerja lembaga negara yang dibacakan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI,” jelas Bamsuet.

“Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui *youtube*, *streaming*, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan laporan kerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara,” imbuhnya.

Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR melainkan laporan kepada rakyat. MPR hanya memfasilitasi lembaga

negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR. “Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui Sidang Paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kerjanya kepada rakyat,” tambahnya.

Bamsuet berharap, pada Sidang Tahunan MPR mendatang pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan laporan kerjanya secara langsung dalam Sidang Tahunan MPR. “Mudah-mudahan tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi Covid-19 maka kita akan lakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada Jumat, 14 Agustus 2020. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, dan Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan, dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dan dilanjutkan pada siang hari. Sidang pagi dipimpin Ketua MPR dan sidang siang hari dipimpin Ketua DPR.

Pagi hari adalah Sidang Tahunan MPR dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan Sidang Bersama DPR - DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2021.

“Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol Covid-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua-ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, youtube, dan streaming,” terang Bamsuet.

Dalam Sidang Tahunan MPR kali ini, format pimpinan yang duduk di depan hanya Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol Covid-19.

“Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja,” pungkas Bamsuet. □

BSC



Media Expert Meeting II

Fadel Muhammad: Pidato Presiden Harus Memberi Harapan

Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR hendaknya jangan biasa-biasa saja tapi harus memberi harapan bagi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi Covid-19.



WAKIL Ketua MPR Fadel Muhammad menjadi narasumber bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Media Expert Meeting yang digelar MPR dengan tema: “Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Fadel Muhammad berharap, pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR memberi harapan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan di tengah pandemi Covid-19. “Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR jangan hanya biasa-biasa saja, tapi harus membawa harapan bagi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi Covid-19,” kata Fadel Muhammad.

Fadel Muhammad menyebutkan, saat ini pemerintah Indonesia menghadapi masalah pandemi Covid-19 yang belum mereda, bahkan

jumlah kasus positif bertambah banyak, di sisi lain ekonomi lesu. persoalannya adalah bagaimana kita menangani masalah itu.

“Kami dari MPR berpendapat, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah terobosan. Tidak boleh menunggu. Saat ini kita menunggu. Dana di bank tidak tersalur-

kan, usaha kecil tidak bergerak, tidak ada kebijakan khusus untuk kredit tanpa agunan,” kata mantan Ketua Komisi XI DPR ini.

Fadel mendengar banyak, pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan lainnya menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam persoalan pajak. Semakin hari kalau



tidak ditangani makin bertambah sulit. Masyarakat juga sudah tidak sabar.

Fadel juga menyinggung belanja negara yang baru mencapai 30%. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan. “Kalau ini masih berlangsung sampai akhir tahun, kita semakin prihatin pada tahun-tahun mendatang,” tuturnya. Karena itu Fadel kembali menegaskan, pemerintah harus berani mengambil langkah. Misalnya merestrukturisasi utang, dan mengalihkan dananya untuk UMKM.

Menurut Fadel, apabila pemerintah tidak melakukan langkah terobosan maka keadaan bisa memburuk. “Saya belum melihat perbaikan yang menjanjikan harapan baru. Kalau dalam Sidang Tahunan MPR, presiden tidak menyampaikan sesuatu yang memberi harapan bisa repot,” ujarnya.

Untuk Sidang Tahunan MPR, mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu mengungkapkan, Pimpinan MPR telah meminta pimpinan lembaga-lembaga negara untuk menyiapkan laporan kinerja lembaganya.

Laporan kinerja lembaga negara itu nantinya dikumpulkan dan dikompilasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

“Kita akan publikasikan dan kita buat resume dari laporan kinerja itu. Kalau memungkinkan kita membuat diskusi terbatas tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Tujuannya untuk memperdalam laporan kinerja itu sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih luas tentang kinerja dari lembaga-lembaga negara,” jelasnya. □

BSC

Media Expert Meeting III

HNW: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan

Sidang Tahunan MPR yang diselenggarakan setiap tahun membuktikan konsistensi MPR menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri (Tata Tertib MPR). Jadi, menjadi hal penting bagi masyarakat melaksanakan seluruh undang-undang yang dibuat lembaga legislatif.



WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 meningkatkan kredibilitas MPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif. Peralnya, meski pandemi Corona tak kunjung reda, MPR tetap melaksanakan amanat Peraturan Tata Tertib MPR untuk menggelar sidang sekali dalam setahun.

Ke depan, konsistensi MPR melaksanakan sidang tahunan akan meningkatkan kredibilitasnya di depan masyarakat. Karena sebagai salah satu lembaga pembuat aturan,

MPR konsisten menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Dan, menjadi hal penting bagi masyarakat untuk melaksanakan seluruh undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.

“Bagaimana MPR akan mengajak masyarakat untuk selalu tunduk, patuh, dan taat menjalankan undang-undang jika MPR saja tidak melaksanakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib-nya sendiri. Dan, konsistensi melaksanakan Tata Tertib itu membuat MPR makin dipercaya serta dinilai kredibel di mata masyarakat. Termasuk pada saat pandemi Corona, asal tetap

melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara virtual saat menjadi pembicara pada acara Media Expert Meeting, yang diselenggarakan di Bandung Jawa Barat, Jumat (7/8/2020). Pertemuan dengan media cetak, online, radio, serta televisi tersebut mengentengahkan tema: ‘Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menampik anggapan bahwa Sidang Tahunan MPR hanya acara rutinitas. Buktinya, mulai 2020 semua ketua lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada masyarakat yang difasilitasi oleh MPR. Jadi, bukan laporan pertanggung jawaban pada MPR, tapi laporan kinerja lembaga-lembaga Negara pada rakyat.

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di masa pandemi Corona, kata Hidayat, juga menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk terus menjaga NKRI. Demi bangsa dan negara, MPR tidak takut menyelenggarakan sidang, meski Corona belum bisa diatasi. “Namun, semua dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penyebaran virus Corona,” katanya. □

FGD Kebangsaan

Menumbuhkan Kembali Ekonomi Nasional

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan, kita harus mengambil langkah berani untuk melangkah ke depan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai sektor. Paling parah terkena dampaknya adalah sektor kesehatan dan ekonomi. Semua pihak tengah memikirkan dari kedua sektor ini sektor yang lebih dulu diprioritaskan untuk dibangkitkan. “Mendahulukan yang mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan, rasanya sangat sulit, karena keduanya sama-sama penting,” kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Kebangsaan di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, 24 Juli 2020.

Selain Fadel Muhammad, juga hadir dalam FGD Kebangsaan yang bertema: ‘Upaya Bersama Menjaga Likuiditas Perbankan untuk Menumbuhkan Kembali Perekonomian Nasional’ adalah Anggota MPR dari kelompok DPD RI, Fahira Idris; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso; serta para pengamat ekonomi, pengamat perbankan, dan perwakilan dari berbagai bank.

Kepada para wartawan, Fadel Muhammad mengatakan, FGD kali ini sangat menarik sebab dihadiri oleh Gubernur BI dan Dewan

Komisiner OJK. Dalam acara itu ada tiga masalah besar yang merupakan kumpulan pendapat peserta FGD supaya likuiditas ekonomi berjalan. Ketiga masalah itu adalah: *Pertama*, bagaimana dana pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus cepat bergulir. “Saat ini dana yang bergulir masih di bawah 30%, padahal sudah setengah tahun. Seharusnya sudah bergulir 60%,” ungkap Fadel Muhammad.

Kedua, saat ini sektor usaha kecil dan menengah perlu penanganan tersendiri. Pemerintah telah menginjeksi dana Rp 30 triliun. Oleh perbankan dana itu sudah dilipatgandakan dan direalisasikan, namun belum cukup. Masih banyak keluhan dari bank-bank bahwa usaha kecil dan menengah perlu lebih mendapat perhatian tersendiri.

Ketiga, saat ini kita menghadapi masa yang rancu dan tidak tahu bagaimana memulainya. Masyarakat saat ini takut beraktivitas atau mengadakan kegiatan karena adanya wabah Covid-19. Ketika masyarakat tidak beraktivitas maka demand dalam perekonomian menjadi tidak ada. “Hotel kosong, restoran kosong, dan pusat-pusat jasa lainnya juga kosong,” tutur mantan

Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Sampai menunggu adanya vaksin, Fadel Muhammad mempunyai pikiran agar masyarakat berkreasi mencari pangan, buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Fadel bersama teman-temannya di Bandung mencoba menggunakan buah kesemek untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia juga sudah bertemu BPOM dan bertanya sudah berapa banyak orang yang melaporkan tentang pangan, buah-buahan, dan sayuran-sayuran yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. “Hal ini perlu dilakukan dan diproduksi sebelum vaksin ada,” ujarnya.

Bila daya tahan tubuh masyarakat kuat, menurut Fadel, maka masyarakat akan beraktivitas sehingga membuat perekonomian jalan. “Jadi, demand itu ada. Uang ada tetapi kalau tidak ada demand, perekonomian ya tidak jalan,” katanya.

Setelah Pertemuan dengan Presiden

FGD Kebangsaan ini digelar setelah sebelumnya pimpinan MPR mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat. Dalam per-



temuan tersebut, menurut Fadel Muhammad, pimpinan MPR dan Presiden membahas banyak hal. Dalam masa pandemi Covid-19, presiden melakukan komunikasi dengan banyak pemimpin pemerintahan di berbagai negara. Kepala pemerintahan sekarang pada memikirkan dalam masa pandemi Covid-19 mana yang lebih diprioritaskan, ekonomi atau kesehatan, dan bagaimana langkah selanjutnya.

Semua pihak, termasuk MPR, diharapkan ikut memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. “Dan, MPR juga peduli untuk melawan Covid-19. Untuk itulah FGD ini digelar,” ungkap Fadel. Dalam forum FGD ini, MPR mendengar masukan dari Gubernur BI, OJK, pengamat perbankan, pengamat ekonomi, dan pelaku usaha perbankan. “Kita berharap masukan yang ada bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti saat ini, menurut Fadel, kita perlu mengambil langkah berani untuk melangkah ke depan. Tanpa langkah berani dan terobosan maka kita akan semakin sulit dari hari ke hari. “Saya tidak bisa membayangkan berapa lama kita akan terpuruk,” ucapnya. Dalam waktu 90 hari ke depan, kata Fadel, kalau tidak mengambil langkah terobosan maka kita akan memasuki masa yang sangat berat. □

Vaksin Corona

Pemerintah Harus Percepat Realisasi Vaksin Corona

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi vaksin Corona produk lokal. Bamsoet mengamati, sudah ada upaya sejumlah pihak di dalam negeri untuk menciptakan vaksin Corona.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, Indonesia harus berupaya mandiri dalam memenuhi

kebutuhan vaksin Corona. Karena, diyakini virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19 ini, akan eksis untuk jangka waktu lama.

“Durasi flu Spanyol bisa dijadikan patokan. Flu Spanyol mulai mewabah Maret 1918, dan berlangsung hingga Juni 1920. Pada rentang waktu Pandemi Covid-19 yang masih sulit dihitung itu, Indonesia harus berupaya menghindari ketergantungan akan kebutuhan vaksin Corona,” ujar Bamsoet di Bali, Ahad (2/8/20).

Karenanya, mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah untuk fokus dalam mempercepat realisasi vaksin Corona produk lokal. Pemerintah harus segera mengambil prakarsa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para akademisi dan peneliti.

“Sejauh yang saya amati, sampai saat ini sudah ada upaya dari sejumlah pihak di dalam negeri untuk menciptakan vaksin Corona. Namun, upaya itu tidak mudah karena ada sejumlah tantangan. Saya mendorong

pemerintah untuk segera hadir di dalam upaya itu, sekaligus membantu mengurai tantangan-tantangan itu,” kata Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menuturkan, tantangan tersebut diantaranya kebutuhan biaya yang besar untuk riset dan pengembangan vaksin, upaya percepatan menghasilkan vaksin hingga tahap ketersediaannya di publik. Tantangan lainnya adalah menyangkut besarnya skala produksi vaksin.

“Demi kepentingan 270 juta penduduk In-

donesia, kehadiran dan keterlibatan pemerintah di dalam upaya yang sarat tantangan itu sangat relevan dan urgen. Dari komunikasi dan koordinasi dengan para akademisi serta peneliti, minimal akan ditemukan jalan keluar mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” tutur Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendukung upaya inaktivasi virus yang sedang dilakukan sejumlah perusahaan Indonesia. Di antaranya, PT. Bio Farma

bekerjasama dengan Sinovac dari Tiongkok, PT. Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan, serta perusahaan swasta dengan Sinopharm dari Tiongkok.

“Indonesia tidak bisa hanya menunggu hasil riset dan pengembangan serta produksi vaksin Corona dari negara lain. Indonesia harus mandiri. Apalagi, Indonesia juga memiliki PT. Bio Farma yang sudah berpengalaman membuat vaksin,” pungkas Bamsuet. □

Diskusi Empat Pilar

Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara

Sidang Tahunan MPR memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga Negara, meski dalam masa pandemi Covid-19, tetap hadir dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berkeyakinan, lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020. Karena itu, laporan kinerja lembaga-lembaga negara pastilah mempunyai akuntabilitas. Dengan cara ini maka bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara.

“Karena disampaikan kepada rakyat Indonesia, setiap lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik. Karena itu, pasti memiliki akuntabilitas,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Diskusi Empat Pilar bertema: “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR” di Media

Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/8/2020). Selain HNW, narasumber lain adalah Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi.

Pada 14 Agustus 2020, MPR menggelar Sidang Tahunan sebagai forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna MPR. Sidang Tahunan MPR menjadi satu tradisi atau konvensi ketatanegaraan yang sudah berlangsung selama lima tahun pada MPR periode 2014 – 2019.

Menurut Hidayat, lembaga-lembaga negara baik dalam rumpun legislatif (MPR, DPR, dan DPD), maupun rumpun eksekutif (Presiden) dan rumpun yudikatif (MA, MK, KY), ditambah BPK, mengetahui bahwa

Sidang Tahunan MPR dilaksanakan secara live, terbuka, diikuti seluruh media dan disaksikan rakyat Indonesia. “Pastilah mereka menyampaikan laporan kinerja yang mempunyai akuntabilitas. Justru selama lima tahun terakhir, laporan kinerja yang disampaikan lembaga-lembaga negara adalah laporan yang terbaik,” katanya.

Hidayat menambahkan, Sidang Tahunan MPR ini memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga-lembaga negara tetap hadir dan mempertanggungjawabkan kerjanya. Meski saat ini dalam masa pandemi Covid-19, lembaga-lembaga negara tetap melaksanakan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

“Dengan cara itu maka bisa menumbuhkan

kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga-lembaga negara. Demokrasi tetap berjalan, ada checks and balances, dan pada gilirannya praktik demokrasi akan lebih baik lagi. Maka setiap tahun lembaga-lembaga negara akan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama yang baik,” papar Hidayat.

“Kalau nama lembaga negara baik maka pimpinan dan anggota lembaga negara juga baik. Tentu ini mempunyai nilai positif dari sisi sosial, politik, dan lainnya. Semuanya pun menjadi positif buat rakyat dan bangsa Indonesia,” sambungnya.

Hidayat juga mengungkapkan, ada keinginan untuk memperpanjang durasi Sidang

lebih penting adalah inovasi dalam bentuk format Sidang Tahunan MPR,” ujarnya.

Arwani memberi contoh dalam hal durasi Sidang Tahunan MPR. “Juga inovasi dalam penyampaian laporan kinerja, apakah hanya disampaikan oleh Presiden saja, atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga negaranya,” katanya.

Laporan kinerja lembaga-lembaga negara, lanjut Arwani, juga perlu dilengkapi dengan lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi

kepada publik.

Arwani mengharapkan, laporan kinerja lembaga-lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini. “Ini harus disikapi pimpinan lembaga negara. Sehingga Sidang Tahunan MPR benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat. Lembaga negara tidak hanya menyampaikan laporan kinerja tetapi juga memberi penjelasan terhadap persoalan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari Sidang Tahunan MPR ini. Sidang Tahunan tidak hanya memberi informasi tetapi juga solusi atas perkembangan-perkembangan di masyarakat,” katanya. □

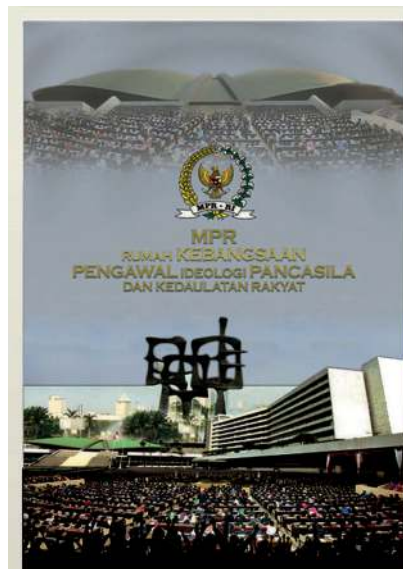
BSC



Tahunan MPR. Laporan kinerja lembaga-lembaga negara dilakukan dalam satu sesi tersendiri. “Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dalam satu hari. Kemudian hari berikutnya pidato kenegaraan presiden dan pidato penyampaian nota keuangan,” katanya.

Namun, karena dalam masa pandemi Covid-19, maka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR mengikuti protokol kesehatan. “Sidang Tahunan dipersingkat durasi waktunya, dan anggota MPR yang hadir dibatasi sekitar 300 anggota saja,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyebutkan, perlunya penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. “Yang



Implementasi Sila-sila Pancasila

- ★ (Yellow Star)**
 - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
 - Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
 - Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- 🔗 (Chain)**
 - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
 - Berhenti memaki, mulailah memakai hati
 - Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- 🌳 (Tree)**
 - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
 - Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
 - Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- 🐃 (Buffalo)**
 - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
 - Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
 - Berhentilah berstat tidak, mulailah bermusyawarah
- 🌾 (Rice)**
 - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
 - Stop diskriminasi, mulailah toleransi
 - Berhenti menyang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

- Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
- NKRI Sebagai Bentuk Negara
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

HUT Kemerdekaan

Di Masa Pandemi, Ada Tiga Tantangan Perlu Dituntaskan

Wakil Ketua MPR mengingatkan, meski warga masyarakat di sejumlah daerah atau wilayah masih zona merah tak bisa memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus, namun semangat kemerdekaan jangan sampai berkurang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebut tahun lalu atau sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, setiap Agustus suasana semarak, warga masyarakat merayakan hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus. Beberapa minggu atau beberapa hari sebelum hari H, 17 Agustus, hiruk pikuk terjadi, masyarakat sibuk mempersiapkan berbagai macam kegiatan, berbagai macam lomba, panjat pinang, karnaval dan lain sebagainya. “Semua itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, di Jakarta, 16 Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyadari bahwa pandemi Covid-19 masih mengungku beberapa wilayah dan kota di Indonesia. Sehingga kemeriahan yang ada di setiap bulan Agustus bisa saja tidak terjadi di wilayah dan daerah yang masih masuk zona merah. “Meski demikian, semangat kemerdekaan jangan sampai berkurang

sedikitpun. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun,” ujarnya. Dia lalu menggambarkan bagaimana dulu para pahlawan berkorban dalam suasana yang juga membahayakan diri dan keluarganya, namun mereka tetap bersemangat dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Indonesia di tengah masa pandemi ini, menurut Gus Jazil, ada tiga tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ketiga tantangan itu adalah: *Pertama*, darurat kesehatan. Semua tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. “Saat ini dunia menunggu vaksin,” ungkapnya.

Kedua, masalah perekonomian. Gus Jazil menyebut, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah itu. Dan, *Ketiga*, yang tidak boleh dilupakan adalah dunia pendidikan. “Saya menyebut pemerintah kurang peduli dalam masalah pendidikan dibanding dengan masalah kesehatan dan ekonomi,” ujarnya. Pada masa pandemi ini para siswa sekolah mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ), namun seberapa

efektif cara itu.

Gus Jazil mengandaikan Indonesia bisa pulih dan tumbuh perekonomiannya, namun bagaimana bila ekonomi membaik namun generasi yang ada tidak mendapat pendidikan yang memadai. “Kita ingin menjadi bangsa yang kuat ekonomi, otak cerdas, dan berbadan sehat,” tegasnya. Gus Jazil mengakui, memang ketiga hal tersebut dialami oleh banyak negara dan mereka sekarang sedang mencari metoda khusus untuk menanganinya.

Gus Jazil mengakui, dalam bidang kesehatan dan perekonomian pemerintah sudah jelas kebijakannya, namun dalam dunia pendidikan Gus Jazil belum melihat secara nyata. “Hanya melihat PJJ, dan PJJ hanya diikuti 30% dari 86 juta peserta didik. “Artinya, ini darurat pendidikan,” ungkap Gus Jazil. Apalagi selama satu semester tidak ada pendidikan. Untuk itu, menurut Jazilul, perlu diambil sikap, tindakan, dan kebijakan. Kalau selama satu tahun dunia pendidikan tutup, dalam arti tidak ada kebijakan baru atau tidak ada metode baru, tentu akan ada

masalah buat anak didik kita ke depan.

Gus Jazil berharap, pemerintah melakukan langkah-langkah penting dalam dunia pendidikan. “Saya mengingatkan kepada pemerintah jangan abai kepada sektor pendidikan,” tegasnya. Perlu ada kurikulum baru dalam masa pandemi. Meski ada PJJ, banyak tantangan yang dihadapi. “Contohnya, ada guru yang belum akrab dengan gadget,” ungkapnya. PJJ selama ini, menurut Gus Jazil, hanya untuk mengingatkan agar

para siswa belajar.

Dalam masalah ekonomi, ia menyebut pemerintah sudah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara fakta memang tidak ada harapan perekonomian tumbuh. Hal demikian tidak hanya dialami Indonesia, namun juga dunia. Paling penting dilakukan, menurut Gus Jazil, adalah menahan agar perekonomian tidak jatuh. Untuk itu, dia menyarankan, paling penting dilakukan adalah perekonomian tidak terjun bebas

menjadi lebih minus lagi. Menurut Gus Jazil, perekonomian sulit tumbuh, meski pemerintah sudah memiliki skema-skema di bidang perekonomian, perbankan, UMKM, dan bagi-bagi sembako

Ia menyebut, perekonomian tidak tumbuh tidak apa-apa karena semua negara tidak mempunyai kekuatan untuk tumbuh. “Minimal perekonomian kita stabil dan tidak minus. Dan, paling penting juga bagaimana agar jangan sampai rakyat kelaparan,” ungkapnya. □

Khataman Alquran

Wujud Syukur 75 Indonesia Merdeka

Salah satu cara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang patut diapresiasi adalah Khataman Alquran. Acara yang berlangsung 16 dan 17 Agustus itu diselenggarakan oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid bersama Founder Indonesia Murojaah, KH. Deden Makhyaruddin.

BANYAK cara untuk mensyukuri nikmat Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini genap berusia 75 tahun. Salah satu caranya adalah melaksanakan kegiatan Khataman Alquran. Khataman Alquran yang diselenggarakan secara virtual selama dua hari, 16 dan 17 Agustus 2020, itu terasa sangat istimewa. Bagaimana tidak, Khataman Alquran secara daring itu diikuti ulama, tokoh masyarakat, publik figur, dan para huffazh dari 34 provinsi di Indonesia.

Di antara ulama dan tokoh masyarakat yang mengikuti Khataman Alquran itu terdapat nama Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR; KH. Deden Makhyaruddin, Founder Indonesia Murojaah; dan, KH. Bachtiar Nasir, pimpinan Al Islamic Center. “Untuk menambah berkah 75 Indonesia merdeka, saya bersama KH. Deden Makhyaruddin menggelar khataman Alquran,” ujar Jazilul Fawaid, di Jakarta, 18 Agustus 2020. Khataman Alquran yang digelar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, sebagai ungkapan syukur dan cinta kepada NKRI.

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, penuh dengan keberkahan dan ridho Allah SWT. “Bangsa Indonesia merdeka di saat bulan Ramadan, tepatnya 9 Ramadan 1364 H,” ujarnya. Untuk



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah, Jazilul yang biasa disapa Gus Jazil itu, mengajak para ulama, ustad, dan huffadz untuk selalu berkomitmen dan berkontribusi membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Mari kita wujudkan rasa syukur dengan semakin mencintai bangsa Indonesia,” ajak Gus Jazil.

Kehadiran Gus Jazil dalam acara bertema: ‘Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan dan Do’a Untuk Keselamatan Bangsa Indonesia’, diapresiasi oleh KH. Deden dan KH. Bachtiar Nasir. Bachtiar Nasir mengatakan, dia sudah

lama kenal Gus Jazil. “Ia orang baik dan selalu berjuang untuk kemaslahatan umat,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta para huffadz untuk mendoakan Gus Jazil.

Hal yang sama disampaikan oleh KH. Deden. “Terima kasih atas apresiasi Gus Jazil dalam khataman Alquran ini”, tuturnya, seraya mengungkapkan bahwa Gus Jazil hadir dalam setiap acara atau kegiatan khataman Alquran selalu hadir. KH Deden mengatakan bahwa pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu memang politisi yang hafidz Alquran. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Berupaya Menjauh dari Zona Resesi

KETIKA upaya pemulihan ekonomi harus berjalan terseok-seok karena jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri terus bertambah dengan skala yang makin besar, ihwal resesi cukuplah diinformasikan apa adanya dan didukung data terkini. Pandemi Covid-19 sudah membuat kehidupan semua komunitas tidak nyaman, sehingga deskripsi tentang resesi tak perlu didramatisir atau dijadikan teror kepada masyarakat.

Resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi global Covid-19 itu predictable. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona menjadi pandemi global, banyak orang awam sekalipun sudah bisa menghitung apa akibatnya, terutama terhadap sektor ekonomi. Dan, sejak awal pandemi, sudah dimunculkan perkiraan dan perhitungan tentang resesi, baik oleh tim ekonomi pemerintah maupun oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Karena fakta tentang saling ketergantungan di sektor ekonomi, semua negara menerima dan merasakan ekses dari pandemi. Melemahnya kinerja perekonomian global menyeret puluhan negara masuk ke zona resesi. Kinerja ekonomi melemah karena putaran mesin ekonomi sengaja dan harus dihentikan sementara dalam kerangka penguncian atau lockdown itu. Penguncian harus dilakukan sebagai cara mengendalikan penularan Covid-19. Sudah barang tentu akibatnya bisa dikalkulasi. Sejak awal Agustus 2020, belasan

negara secara teknikal dilaporkan sudah resesi.

Sebagaimana sedang dirasakan bersama, perekonomian nasional pun tak luput dari ekses pandemi Covid-19. Setelah masih bisa mencatat pertumbuhan positif pada kuartal I-2020, perekonomian nasional berkontraksi atau tumbuh negatif di kuartal dua tahun ini. Prediksi ini pun sudah dipaparkan satu-dua bulan lalu. Ekonomi Indonesia tumbuh negatif sebagai konsekuensi dari penerapan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar). Saat PSBB diterapkan, pabrik tidak berproduksi. Bekerja dan belajar pun cukup dari rumah saja. Konsumsi rumah tangga pun sempat menurun karena banyak keluarga menahan diri atau menunda belanja.

PSBB perlu diterapkan guna mengendalikan atau memutus rantai penularan Covid-19. Mengacu pada data dan wilayah penularan Covid-19, Indonesia pun terpaksa harus menerapkan PSBB justru di pusat-pusat pertumbuhan, seperti Jakarta dan semua kota besar di pulau Jawa. Dampaknya pun cukup mudah untuk dikalkulasi. Pilihan atas PSBB atau penguncian praktis tak terhindarkan karena aspek kesehatan atau keselamatan semua orang menjadi keutamaan yang tidak boleh ditawar-tawar.

Kalau baru pada kuartal II-2020 terjadi kontraksi, perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan resesi teknikal. Asumsi tentang resesi teknikal terpenuhi jika terjadi kontraksi dua kuartal berturut-turut. Karena itu, siapa pun hendaknya tidak memaksakan pandangan, asumsi atau penilaian pribadi maupun kelompoknya bahwa perekonomian

Indonesia sudah masuk jurang resesi . Apalagi jika diasumsikan akan terjadi krisis ekonomi. Tidak etis jika pandangan atau asumsi seperti itu dijejalkan ke ruang publik secara berkelanjutan untuk memengaruhi atau menakut-nakuti orang banyak. Dalam situasi ketidakpastian seperti sekarang, antarkomunitas seharusnya saling menguatkan dan membangun harapan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Boleh saja diasumsikan bahwa perekonomian Indonesia sedang menuju zona resesi teknikal karena kuartal II-2020 tumbuh negatif. Menuju zona resesi teknikal tidak sama dengan resesi itu sendiri. Kalau pada kuartal III-2020 kecenderungannya bisa lebih baik dibanding kuartal sebelumnya, harus juga berani diasumsikan bahwa perekonomian Indonesia mulai berbalik arah atau menjauh dari zona resesi teknikal. Resesi teknikal bukanlah krisis. Dinamika kehidupan di belasan negara yang sudah resesi teknikal pun berlangsung baik-baik saja, alias tidak ada gejala.

Walaupun terjadi kontraksi, perekonomian nasional cenderung mulai bergerak ke arah positif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melihat data kenaikan konsumsi listrik sebesar 5,4% per Juni 2020 sebagai sinyal positif, jika dibandingkan dengan konsumsi listrik Mei 2020 yang minus 10,7%. Begitu juga dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang per Juni 2020 mulai positif di level 10%, setelah minus hampir 50% sepanjang Mei 2020. Sub-sektor perdagangan eceran dan perdagangan besar juga menunjukkan kecenderungan positif.

Indikator-indikator itu menjelaskan bahwa permintaan atau konsumsi dalam negeri secara bertahap mulai menguat lagi. Ketika permintaan pasar mulai bertumbuh, harus ada upaya maksimal dan dengan penuh kehati-hatian untuk menghidupkan lagi mesin perekonomian atau produksi. Dan, untuk merawat serta memperkuat permintaan itulah Komite Pemulihan Ekonomi Nasional mulai

merealisasikan beberapa program yang fokus pada upaya merawat kekuatan konsumsi sejumlah komunitas, mulai dari komunitas pekerja, pegawai atau tenaga honorer, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk 12 juta pelaku UMKM, Pemerintah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap unit usaha.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus usaha bagi 6,2 juta untuk ibu rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitur. Tidak kurang dari 13 juta karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan pun akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan. Komunitas pekerja berstatus pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS) juga akan menerima bantuan dengan jumlah yang sama.

Pendekatan dengan program bantuan seperti ini memungkinkan perekonomian nasional menjauh dari zona resesi pada kuartal-kuartal berikutnya. Di sisi lain, program bantuan seperti itu juga menjadi bukti bahwa negara masih mampu merespons ketidakpastian sekarang ini dengan cara merawat ketahanan ekonomi beberapa komunitas yang kontribusinya relatif signifikan bagi perekonomian.

Akhir-akhir ini, di tengah tingginya lonjakan kasus Covid-19, masyarakat perkotaan yang nota bene adalah pusat pertumbuhan mulai berani melakukan aktivitas produktif. Kecenderungan ini tentu saja berkontribusi besar upaya bersama menjauh dari zona resesi teknikal. Agar kecenderungan ini tidak menghadirkan risiko, pemerintah daerah pada semua kota besar di pulau Jawa hendaknya berupaya keras mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan memang harus mendapat perhatian khusus karena 74% kasus Covid-19 tercatat pulau ini. □

Delegasi IMI Pusat

Dorong Pengembangan Home Industri Modifikasi Otomotif

Besarnya jumlah penduduk berusia muda menjadi kunci utama Indonesia menjadi pemain utama dalam kancah usaha modifikasi otomotif dunia. Salah satu pakar sepeda motor asal Amerika Serikat, Shige Suganuma, telah mengakui kualitas motor custom Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya home industri motor dan mobil custom (modifikasi otomotif) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo, adalah bagian dari pecinta motor custom. Hal tersebut menunjukkan potensi pengembangan dan prospek bisnis usaha kecil menengah modifikasi otomotif sangat tinggi.

“Di Amerika Serikat, dalam salah satu *market reseach* menemukan ada kecenderungan anak-anak muda tak lagi aktif membeli mobil. Mereka memilih memodifikasi

mobil yang sudah ada. Kalaupun mau membeli, mereka memilih membeli mobil yang sudah dimodifikasi. Bukan tak mungkin hal tersebut juga akan terjadi di Indonesia. Memiliki 64 juta penduduk berusia 16-30 tahun membuat pengembangan usaha modifikasi otomotif sangat cerah,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (13/7/20).

Pengurus IMI Pusat yang hadir, antara lain Ketua Umum Sadikin Aksa, Ketua Badan Pengawas Boy Haryanto Joedo, Sekretaris Jenderal Jeffrey, serta Direktur Sprint dan

Rally Rifat Sungkar.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, besarnya jumlah penduduk berusia muda juga menjadi kunci utama Indonesia menjadi pemain utama dalam kancah usaha modifikasi otomotif dunia. Salah satu pakar sepeda motor asal Amerika Serikat, Shige Suganuma, telah mengakui kualitas motor custom Indonesia.

“Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa usaha modifikasi otomotif Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia. Sebelumnya, para pemerhati otomotif dari Jepang, Italia, dan Prancis juga telah memberikan pengakuan serupa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, bidang usaha modifikasi otomotif termasuk dalam turunan lima sektor bidang manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dari Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Usaha modifikasi otomotif juga termasuk salah satu sektor usaha di UMKM yang mampu membuka banyak lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

“Perputaran uang di segmen usaha modifikasi otomotif ini sudah mencapai ratusan miliar per tahunnya. Dalam acara Indonesia Modification Expo (IMX) 2020 yang akan digelar pada Oktober 2020 di Jakarta menargetkan nilai transaksi hingga Rp 4 miliar dari 25 ribu pengunjung. Sebelumnya di 2019, ajang pameran ini mampu mencatat transaksi hingga Rp 3,8 miliar dari 22.534 pengunjung. Belum lagi ditambah dari ajang serupa di berbagai daerah. Bidang usaha ini termasuk yang mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mengajak IMI untuk bersama-sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri,



dan Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah untuk menggagas lahirnya kawasan industri modifikasi otomotif,

sehingga terintegrasi dan mobil atau motor hasil modifikasi tersebut bisa mengelinding di jalan-jalan raya secara aman

karena memenuhi standar keselamatan, berdokumen resmi dan membayar pajak. □

CSR Award 2020

Bamsoet Dorong Perusahaan Tunaikan CSR

Perusahaan hendaknya tak sekadar memandang CSR sebagai pengeluaran atau beban biaya, melainkan sebagai bagian dari pembangunan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, setiap perusahaan agar tak melupakan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial. Melalui CSR, perusahaan telah bertanggungjawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar wilayah usaha mereka. Sekaligus menjadi penguat hubungan antara perusahaan, pemerintah, dengan masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (kemitraan).

“Jika setiap perusahaan menjalankan CSR-nya secara baik, niscaya tak akan terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sangat penting bagi perusahaan untuk tak sekadar memandang CSR sebagai pengeluaran atau beban biaya. Melainkan memandang CSR sebagai bagian dari pembangunan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bamsoet dalam acara Teropong CSR Award 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Rabu (15/7/20).

Mantan Ketua DPR RI yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award 2020 ini menilai, melalui award yang diberikan diharapkan dapat memacu semangat berbagai perusahaan untuk tetap semakin peduli terhadap CSR. Terlebih di masa pandemi Covid-19, acara penganugerahan CSR Award menjadi momentum yang sangat penting untuk menggugah kembali rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Kepedulian dunia usaha terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi media untuk membangun semangat optimisme, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa melalui solidaritas dan kegotongroyongan secara nyata,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini memaparkan berbagai kategori penghargaan. Antara lain, kategori Pengembangan Digital E-Learning yang dianugerahkan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan

PT. Pertamina. Peduli UMKM dianugerahkan kepada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan PT. Food Station Tjipinang Jaya.

“Ada juga kategori Pengembangan Pariwisata yang dianugerahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia serta kategori Pengembangan Kesehatan Masyarakat diberikan kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap kepada para pemenang CSR Award Tahun 2020 untuk senantiasa memupuk rasa tanggungjawab dan kepekaan sosial yang tinggi kepada masya-



rakat dalam setiap kondisi. Bagi yang belum mendapat Award di tahun 2020 harus tetap semangat, optimistis, dan terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Melalui penganugerahan CSR Award 2020, mari kita satukan semangat untuk bersama-sama bangkit dari pandemi Covid-19. Kita harus memiliki tekad dan keyakinan bahwa kita dapat membangun sistem perekonomian yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera,” pungkas Bamsoet. □

Jenderal Soedirman

Panglima Besar Selalu Menjaga *Wudhu*



SEBAGAI prajurit, namanya begitu masyhur di telinga warga bangsa, terlebih anggota Tentara Nasional Indonesia. Dia bukan saja teladan bagi anggota TNI pada masa kini maupun masa depan, tapi juga tentara impian sepanjang zaman. Dia adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sayangnya, Allah tak mengizinkan sang Jendral berlama-lama hidup di alam fana. Pada usia 34 tahun, tepatnya 29 Januari 1950, Soedirman dipanggil menghadap keharibaan Allah SWT.

Kepergian Soedirman ke alam baka adalah duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan, ribuan orang menyaksikan prosesi upacara pemakamannya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, diiringi ribuan pelayat yang berjalan kaki hingga 2 km panjangnya.

Soedirman tetap kenang dan dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanannya terhadap penjajah dengan menerapkan taktik perang gerilya ditetapkan sebagai sarana pengembangan semangat bagi tentara Indonesia. Sedangkan menempuh rute gerilya sepanjang 100 kilometer (62 mil) menjadi syarat dan harus ditempuh oleh para Taruna sebelum dinyatakan lulus dari Akademi Militer. Pada 10 Desember 1964, Panglima Besar Jenderal Soedirman ditetapkan sebagai

Pahlawan Nasional Indonesia.

Soedirman lahir dari keluarga petani bersahaja di desa Bodaskarangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Ayahnya, Karsid Kartawiraji, adalah seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto, sedang ibunya bernama Siyem. Sejak bayi Soedirman diangkat anak oleh asisten wedana (camat) di Rembang, R. Tjokrosunaryo.

Soedirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan berdisiplin. Kepemimpinan dan kemampuannya berorganisasi sudah tampak saat ia duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu ia juga dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya dalam menjalankan



syariat Islam.

Pada usia 20 tahun, tepatnya 1936, Soedirman bekerja sebagai guru. Ia mengajarkan murid-muridnya mata pelajaran moral dengan contoh kehidupan para Rasul dan kisah wayang tradisional. Ia kerap menyisipkan semangat nasionalisme dalam pelajarannya. Tak berapa lama kemudian Soedirman diangkat menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Soedirman juga aktif dalam kegiatan ke-Muhammadiyah dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada 1937.

Pada awal-awal masa pendudukan Jepang, Soedirman masih tetap mengajar. Tetapi pada 1944 Soedirman bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) sebagai komandan batalion di Banyumas. Setelah Proklamasi, Soedirman melarikan diri dari tahanan untuk kemudian bertemu Presiden Soekarno di Jakarta. Ia kemudian mendapat tugas mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat.

Pada 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sedangkan Oerip Soemohardjo yang telah aktif di militer sebelum Soedirman lahir menjadi kepala staf.

Meski terpilih sebagai Panglima Besar,



sopan santun, adab ketimuran, dan tingkah laku Soedirman tidak berubah. Ia tetap rendah hati, dekat dengan pasukannya dan menghormati para senior. Ia pernah menolak berbaring di atas tempat tidur, karena menyadari bahwa Oerip Soemohardjo yang usianya lebih tua tidur di bawah. Karena dalam sopan santun dan adab Jawa, orang yang usianya lebih tua, lebih berhak tidur di atas.

Menjaga Wudhu

Sebagai Panglima Besar, kisah perjuangan Jenderal Soedirman menjadi lembar-lembar keteladanan yang tak akan pernah usang. Salah satu yang melegenda adalah kegigihannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, yang dilakukan dalam kondisi kesehatan sangat memprihatinkan.

Kisah terjadi pada Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki Ibukota Negara di Yogyakarta. Saat itu para pemimpin nasional berlindung di keraton, sementara Soedirman bersama dokter pribadi dan sekelompok kecil tentara memilih melakukan perang gerilya.

Semula, pasukan Soedirman ini terus diikuti bahkan nyaris ditangkap tentara Belanda, tetapi pasukan Soedirman berhasil kabur. Rahasia keberhasilan Soedirman melepaskan diri dari kejaran Belanda—yang ini kerap disinggung oleh Wakil Ketua MPR

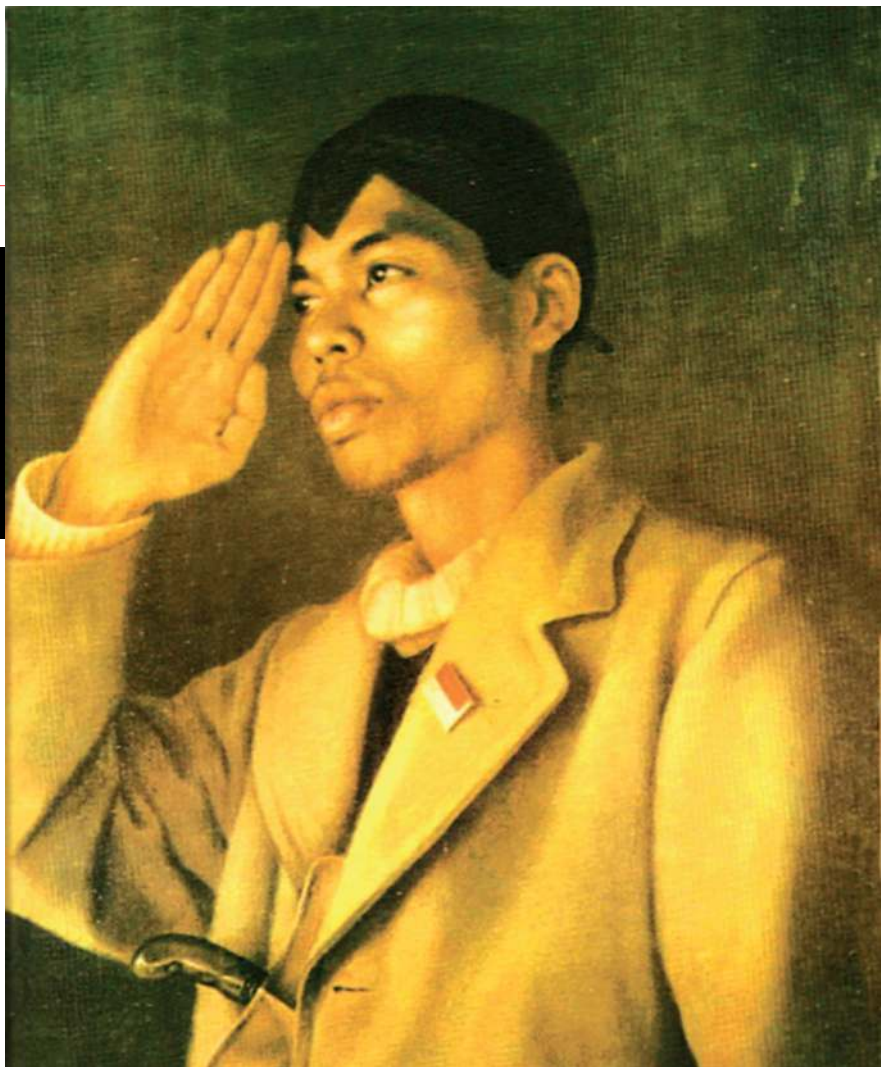


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RI Hidayat Nur Wahid — yaitu karena Pak Dirman memperhatikan tiga persoalan. Yaitu, selalu menjaga wudhu, salat tepat waktu, dan senantiasa berbakti kepada orangtua.

Setelah lepas dari sergapan Belanda, Jendral Soedirman bersama bala tentaranya mendirikan markas sementara di dekat Gunung Lawu Solo. Dari sini, Soedirman memberi komando ke seluruh kegiatan militer di Pulau Jawa. Termasuk perintah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret, bahkan berimbas besar terhadap nama Indonesia di dunia Internasional. Klaim Belanda

yang selalu mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, seketika itu luluh lantak. Keberhasilan mengambil alih Ibukota Yogyakarta membuka mata dunia, melihat kenyataan bahwa Indonesia masih ada.

Ketika Belanda menarik diri, Soedirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia kemudian pensiun dan pindah ke Magelang. Soedirman wafat kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. □

MBO



Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI

Lembaga Pendidikan Swasta Perlu Dibantu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEMENTARA Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, menyerukan agar pemerintah mendeteksi betul dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan, baik siswa maupun lembaga-lembaga pendidikan. “Saya yakin akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar atau tidak mampu beroperasi kembali. Bisa jadi juga perguruan tinggi swasta sehabis pandemi ini akan tidak mampu beroperasi. Maka itu, butuh turun tangan dari pemerintah, baik kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan,” ujar Jazilul Fawaid saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Nasional Pendidikan bertajuk: “Dilema New Normal Merekonstruksi Sistem Pendidikan,” Sabtu (4/7/2020).

Dalam webinar yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Gresik Nusantara berkolaborasi dengan Forum Mahasiswa Lamongan itu juga diikuti oleh antara lain: Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid; Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim; dan Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Nurhasan.

Lebih lanjut Gus Jazil—begitu Jazilul Fawaid biasa disapa— mengatakan, bantuan terhadap lembaga pendidikan swasta sangat dibutuhkan. “Perguruan Tinggi Swasta akan banyak yang kolaps, akan banyak yang tak mampu beroperasi kembali karena pandemi,” ujar Gus Jazil mengingatkan. Karena itu,

menurut Gus Jazil, adalah tugas kita semua agar dunia pendidikan tidak tutup. (Penyelamatan) itu harus dilakukan secara bersama-sama,” tuturnya.

Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini, sistem belajar mengajar di sekolah yang kini dilakukan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara online belum ada parameter keberhasilannya. Sejauh ini, kata Gus Jazil, pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan yang cukup baik dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di sektor pendidikan.

“Karena memang pandemi ini datang tiba-tiba dan tidak terencana. Padahal ini masuk masa kelulusan siswa SD hingga SMA, dan berbarengan juga dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memiliki tingkat kerumitan bagi wali siswa atau wali mahasiswa,” katanya.

Padahal, pendidikan di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi prioritas, seiring dengan misi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur, ini mengajak para mahasiswa, terutama yang berasal dari Lamongan-Gresik — yang saat ini mayoritas pulang kampung karena tidak ada perkuliahan tatap muka— agar memanfaatkan momentum

pandemi ini dengan mulai mengamalkan ilmunya di desa masing-masing.

“Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk membina dan mendidik anak-anak kita atau adik-adik kita pada tingkat SD hingga SMA, karena sekolah juga belum terlalu efektif. Aktifkan rumah, tempat ibadah atau kelurahan untuk mendidik, membina, terutama anak-anak SD dan SMP. Karena saya tahu anak-anak ini sedang kesulitan mengikuti pelajaran. Mungkin mereka sudah lupa bukunya ditaruh di mana. Gurunya juga begitu,” katanya.

Gus Jazil mengajak para mahasiswa untuk tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah agar berperan aktif di masyarakat. “Partisipasi aktif ini yang ditunggu. Bikin kelompok-kelompok belajar yang di situ menggunakan pola-pola protokol Covid-19 sehingga adik-adik kita tidak kehilangan memori dunia pendidikan dan semangat belajar,” paparnya.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, karena saking panjangnya libur sekolah akibat pandemi dan juga sistem belajar PJJ menyebabkan mayoritas anak-anak saat ini hanya memiliki semangat bermain game online dan liburan. “Dalam pengertian, mereka tidak terarahkan akal pikirannya, tidak terisi asupan pendidikan. Ini yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa,” katanya. □



Menunggu Ilmuwan Penyelamat Ummat Manusia

Berbagai penyakit menular dan mematikan pada masa tertentu tiba-tiba melanda dunia. Apalagi jenis penyakit itu baru dan belum ada obat penangkalnya, vaksin. Seperti yang terjadi saat ini, Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Ahli biologi, kimia, dan kedokteran dari Negara-negara di dunia sedang bekerja dan berusaha untuk menemukan vaksin yang dapat menangkal penyakit tersebut. Namun, untuk sekedar diketahui, kami sajikan cerita tentang penemuan vaksin cacar. Adalah Edwar Jenner, seorang dokter kelahiran 17 Mei 1749 di Berkeley, Gloucestershire, Inggris, menemukan vaksin cacar dengan melakukan ujicoba pada seorang anak kecil. Jenner adalah salah satu, masih banyak ilmuwan lain yang mampu membuat vaksin. Bukan tidak mungkin ilmuwan Indonesia menemukan vaksin Covid-19 yang sedang melanda dunia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK 10.000 tahun sebelum masehi hingga tahun 1796, dunia dicekam rasa ketakutan. Kala itu untuk pertama kali wabah penyakit cacar melanda Mesir. Penyakit ini menular begitu cepat ke setiap orang di berbagai tempat. Dampaknya sama seperti wabah Covid-19 mematikan. Jutaan orang meninggal terkena wabah cacar. Wabah itu timbul tenggelam seperti gelombang menghantam dan menghantui umat manusia. Penularan cacar kalau dilihat dari cerita yang ada, seperti penularan Covid-19, lewat orang yang datang atau tiba (masuk) di suatu wilayah.

Contohnya, cacar masuk ke Amerika lewat para penjelajah Eropa. Nusantara yang juga menjadi sasaran para penjelajah Eropa tidak lepas dari penularan cacar. Wabah ini masuk lewat Batavia pada 1644. Sebab, pada masa itu sama seperti saat ini belum ditemukan vaksin cacar yang masuk di wilayah Batavia. Dampaknya, penyakit cacar ini menular dan menjalar ke berbagai tempat dan pulau yang ada di gugusan nusantara.

Menurut catatan, pada 1781, setiap 100 penduduk Jawa terserang cacar, 20 di antaranya meninggal dunia. Jadi, 20% dari penduduk meninggal karena terkena cacar. Angka itu kelop dengan catatan lain yang menyebutkan, pada akhir Abad XX kematian bayi disebabkan cacar di Bogor dan Priangan

(Bandung) mencapai 20%. Sedangkan di Yogyakarta, pada 1820-an, kematian bayi akibat penyakit itu pada angka 10%. Apa yang terjadi di Jawa, juga terjadi di Bali. Di pulau timur Jawa itu pada 1871 tercatat 18.000 orang meninggal akibat cacar.

Apa yang terjadi pada masa itu juga sama seperti saat ini, ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, semua masyarakat, kepala pemerintahan, dan raja-raja negara monarki mendorong semua pihak untuk menemukan obat, vaksin, agar penyakit mematikan itu bisa dikendalikan atau dihilangkan.

Hal itu juga menjadi pemikiran dan keprihatinan Edward Jenner. Ia merupakan seorang dokter kelahiran 17 Mei 1749 di Berkeley, Gloucestershire, Inggris. Negeranya dan juga desanya saat itu dilanda wabah cacar. Sebagai seorang dokter yang penuh dengan metode ilmiah, ia mengamati penduduk di desanya yang mayoritas adalah peternak sapi perah.

Diceritakan, pada suatu hari, pada 1796, seorang gadis pemerah sapi yang bernama Sarah Nelmes menyambangi Jenner. Gadis itu mengeluhkan di tanganya ada *rash* (ruam). Ruam adalah perubahan nyata pada tekstur atau warna pada kulit yang disebabkan oleh peradangan. Melihat kondisi itu, dengan belajar ilmu bedah dan juga magang

kepada ahli bedah Daniel Ludlow di Sudbary, Jenner lalu mengambil materi ruam yang diketahui sebagai penyakit cacar sapi dengan pisau operasi. Apa yang diambil itu selanjutnya dipindah ke lengan James Phipps. Phipps adalah anak tukang kebun Jenner yang berusia delapan tahun. Agaknya, Phipps dijadikan kelinci percobaan. Pemindahan materi ruam dari Nelmes ke Phipps membuat Phipps terkena cacar sapi (*cowpox*), namun bisa cepat disembuhkan.

Selanjutnya, Jenner mengoleskan materi dari luka cacar (*smallpox*) ke luka buatan di tangan Phipps. Di sinilah 'keajaiban' muncul, Phipps tidak terkena cacar. Kelinci percobaan untuk menemukan kekebalan tubuh tidak hanya terjadi pada Phipps. Dia juga melakukan hal serupa kepada 23 kasus yang sama, termasuk kepada anaknya sendiri. Apa yang dilakukan itu selanjutnya dijadikan buku. Dari sinilah *immunologi* ditemukan.

Apa yang dilakukan oleh Jenner juga ditemukan dalam kisah yang lain. Kisahnya, di desanya banyak peternak sapi terinfeksi cacar sapi. Tandanya, di tangan muncul lesi pustul. Lesi menurut *Wikipedia* adalah istilah kedokteran untuk merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Hal ini dapat terjadi karena proses beberapa penyakit, seperti trauma fisik, kimiawi, dan



Edward Jenner



elektris; infeksi, masalah metabolisme, dan otoimun. Kata *lesi* diturunkan dari bahasa Latin berarti “cedera”. Sedang *pustula* adalah semacam nanah.

Jenner melihat para peternak sapi atau masyarakat di sana yang terinfeksi oleh cacar sapi menjadi kebal terhadap cacar. Dari sinilah ia melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi keselamatan umat manusia di dunia.

Hingga akhirnya, pada suatu hari, Jenner mengambil suatu langkah penting. Dia mengambil nanah lesi cacar sapi dari seorang peternak sapi. Sesuatu yang diambil itu selanjutnya diujicobakan kepada anak berusia 8 tahun, James Phipps. Setelah tubuh Phipps ‘disuntik’ dengan nanah lesi cacar sapi, selanjutnya dalam beberapa hari

kemudian, tubuh anak itu menjadi tetap sehat dan kebal terhadap cacar.

Temuan Jenner di mana mampu memberi kekebalan pada tubuh seseorang mendapat dukungan dari kepala pemerintahan dan raja-raja negara monarki. Disebut Presiden Amerika Serikat, Raja Tsar Rusia, Raja Swedia, Kaisar Prancis Napoleon I, dan Pasha Mesir Ali Muhammad, gembira dengan apa yang dilakukan dr. Jenner. Mereka antusias dengan vaksin yang telah ditemukan itu.

Setelah dirasa aman, vaksin cacar diproduksi secara massal dalam jumlah jutaan dosis dan distribusikan ke berbagai negara. Nusantara yang pada masa itu di bawah kolonialisme negara-negara Eropa juga kebagian vaksin. Dalam *historia.id*

disebutkan vaksin cacar pertama tiba di Batavia pada 1804. Untuk bisa tiba di kota yang sekarang bernama Jakarta itu harus melakukan *long march*. Diambil dari Genewa, Swiss, diangkut oleh kapal bernama Elisabeth yang berangkat dari Pulau Isle de France. Kapal berlayar menuju Baghdad dan Basra, Irak, kemudian melanjutkan ke India. Dan, dari negeri ujung selatan Asia itu menuju ke Batavia.

Setelah tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, vaksin tersebut didistribusikan ke kota-kota di mana masyarakatnya terjangkit wabah cacar. Karena penyakit ini berjangkit hampir seluruh pulau Jawa maka vaksin itu selain didistribusikan di Batavia juga dikirim ke Surabaya, Semarang, Jepara, Surakarta, dan Yogyakarta.

Meski vaksin sudah tersedia, namun proses vaksinasi mengalami dua kendala. *Pertama*, perjalanan yang jauh dari Genewa hingga Batavia memerlukan waktu yang lama. Hal demikian membuat mujarabnya vaksin menjadi kedaluwarsa, sehingga tidak efektif dalam membuat kekebalan tubuh. Pengiriman waktu yang berminggu-minggu ditambah cuaca laut yang panas mengakibatkan kandungan vaksinnya menjadi rusak. Problem yang demikian akhirnya mendorong pemerintah membuat pabrik sendiri di wilayah Hindia Belanda. Dan, pabrik itu juga mampu memproduksi vaksin cacar.

Kedua, terkendala dengan minimnya tenaga medis. Vaksinasi pada saat itu



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dilakukan dengan tenaga yang minim. Pemerintah kekurangan tenaga medis untuk melakukan vaksinasi, terutama di desa-desa yang penduduknya terkena wabah cacar. Sambil terus melakukan program menumbuhkan kekebalan tubuh dengan tenaga yang kurang, pemerintah mendirikan Sekolah Dokter Djawa (STOVIA) di Batavia pada 1851. Sekolah yang semua pendidikannya ditanggung oleh pemerintah itu disiapkan untuk menciptakan tenaga medis yang siap melakukan vaksinasi ke pelosok-pelosok desa.

Apa yang ditemukan Jenner dan vaksinya telah disebar ke berbagai negara itu mampu menumbuhkan kekebalan tubuh dan menurunkan penyebaran wabah cacar di berbagai tempat sehingga pada 1979 dunia bebas cacar.

Temuan Jenner selanjutnya menjadi tonggak bagi dokter dan ilmuwan biologi dan kimia lainnya melakukan hal serupa. Pada 1880-an, seorang ilmuwan dari Perancis yang bernama Louis Pasteur menemukan berbagai vaksin. Vaksin yang diciptakan adalah vaksin untuk menangkal penyakit rabies, kolera, dan antraks. Ahli kimia dan mikrobiologi itu mempunyai prinsip dalam dunia kesehatan yang disebut *profilaksis*. *Profilaksis* adalah prosedur kesehatan masyarakat yang mengedepankan pen-



Louis Pasteur

cegahan daripada mengobati penyakit. Sumber yang lain mengatakan Pasteur mempunyai prinsip *une maladie, un vaccin* atau satu penyakit, satu vaksin. Sebuah sumber menyebutkan, Pasteur berhasil menemukan kiat mencegah pembusukan makanan dengan proses pemanasan yang disebut pasteurisasi.

Perjalanan Pasteur dalam dunia keilmuan diawali sebagai seorang ahli fisika. Di usia yang masih sangat muda, 26 tahun, dia sudah menyandang gelar profesor di Universitas Strasbourg. Dari Strasbourg, dia pindah ke Universitas Lille.

Dunia kedokteran di Eropa dari waktu ke waktu semakin mampu menjawab

tantangan kemanusiaan. Pada 1890, ilmuwan Jerman Emil Von Behring menemukan vaksin difteri dan tetanus. Dalam *Wikipedia* disebutkan, Behring lahir di Hansdorf, Eylau. Ia menekuni ilmu kedokteran antara 1874 hingga 1878 di Army Medical College di Berlin, Jerman. Ia pernah mengabdikan sebagai dokter militer hingga menjadi profesor ilmu kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Marburg hingga akhir hidupnya.

Behring sangat terkenal dengan sumbangannya pada *immunologi*. Dia mendapat Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran pada 1901. Nobel diberikan atas pengembangan terapi serum difteri. Penelitiannya tersebut juga mengembangkan terapi serum untuk tetanus bersama Emile Roux.

Dalam dunia penemuan vaksin, ada nama seorang ilmuwan yang begitu hebatnya. Ia bernama Maurice Ralph Hilleman. Ilmuwan yang lahir di Miles City, Montana, Amerika Serikat, 30 Agustus 1919, itu disebut telah mengembangkan 40 vaksin. Dia mampu melakukan hal itu, karena dia adalah seorang ilmuwan mikrobiologis yang fokus pada bidang vaksinologi. Ilmuwan penemu HIV, Robert Gallo, menyebut Hilleman sebagai vaksinologis paling sukses dalam sejarah. Empat puluh dari vaksin yang dikembangkan oleh Hilleman adalah vaksin untuk campak, gondok, hepatitis A, hepatitis B, cacar air, meningitis, hingga pneumonia. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG/dari berbagai sumber



Produsen Vaksin Dalam Negeri, Dari **Parc Vaccinogene** Hingga Bio Farma

Pada masa wabah cacar, pemerintah kolonial Belanda membangun perusahaan vaksin di Indonesia. Perusahaan itu sekarang bernama PT. Bio Farma. Reputasi perusahaan yang berada di Jl. Pasteur itu bermutu tinggi dan diakui dunia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TERCATAT ada sebanyak 1.620 relawan yang akan menjalani uji klinis tahap III vaksin Covid-19. Uji klinis dilakukan oleh PT. Bio Farma dari vaksin buatan Sinovac dari Cina. Uji klinis dilakukan di Bandung, Jawa Barat, itu tidak sekaligus namun secara bertahap. Penyuntikan tahap pertama dilakukan kepada 120 relawan pada minggu kedua Agustus. Penyuntikan selanjutnya dilakukan pada minggu ketiga dan keempat Agustus dengan jumlah relawan mencapai 144 orang. Pada awal September diharap sudah ada 408 relawan yang menjalani uji klinis. Uji klinis dilakukan hingga minggu ketiga Desember 2020. Mereka yang menjadi relawan dalam masa uji klinis, keberadaannya akan terus dipantau.

Apa yang dilakukan oleh PT. Bio Farma untuk menemukan vaksin Covid-19 merupakan rangkaian perjalanan sejarah dalam terus menyediakan vaksin yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya Indonesia namun juga dunia.

Perusahaan yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, itu merupakan perusahaan farmasi peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada 1800-an membutuhkan banyak vaksin cacar untuk mengobati masyarakat yang terkena wabah pada masa itu. Bila menggantungkan kiriman vaksin dari Eropa, hal demikian memakan waktu dan memengaruhi efektivitas vaksin yang telah mengalami perjalanan yang lama.

Agar persediaan cepat tersedia dan efektivitas vaksin tetap terjaga, pada 6 Agustus 1890, pemerintah kolonial mendirikan perusahaan bernama *Parc Vaccinogene*. Pendirian perusahaan itu berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia, Cornelis Pijnacker Hordijk, Nomor 14 Tahun 1890. Kali pertama berdiri, perusahaan itu berada di Rumah Sakit Militer *Weltevreden*, Batavia. Tempat itu

sekarang menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta.

Dalam perjalanan waktu, *Parc Vaccinogene* mengalami perkembangan dan perubahan, tidak hanya soal kepemilikan namun juga kerja sama. Setelah lima tahun berdiri, tepatnya 1895, ia melakukan kerja sama dengan *Instituut Pasteur*. Dari sinilah nama perusahaan itu bertambah menjadi *Parc Vaccinogene en Instituut Pasteur*. Kali pertama berdiri hingga bekerja sama dengan pihak yang lain, ia telah mendarmabaktikan terhadap bidang kesehatan. Penelitian dilakukan untuk memberantas penyakit menular dan penelitian untuk kemajuan dunia kesehatan.

Pada 1901, nama perusahaan tidak lagi menyematkan *Parc Vaccinogene*. Nama diganti dengan *Landskoepoek Inrichting*. Meski demikian masih bekerja sama dengan *Instituut Pasteur* sehingga namanya menjadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur. Tahun 1923, ada perubahan yang sangat berarti pada perusahaan itu hingga dampaknya terasa hingga saat ini, yakni kantor, pabrik, dan tempat penelitian, pindah ke Bandung.

Ketika Jepang berhasil merebut wilayah pendudukan Belanda di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya pada 1942, semua perusahaan, kantor, dan gedung yang dimiliki Belanda disita oleh Jepang. Tak hanya itu, nama-nama yang berbau Belanda diganti total dengan nama-nama berbau Jepang. Termasuk *Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur* yang kemudian berganti nama menjadi *Bandung Boeki Kenkyushoo* dan saat itu dipimpin oleh Kikuo Kurauchi.

Jepang hanya 3 tahun mengurus perusahaan itu, sebab harus hengkang kembali ke tanah airnya setelah kalah dalam Perang Dunia II. Meski Indonesia sudah merdeka, namun Belanda ingin menguasai kembali jajahannya di Indonesia. Agresi militer pun terjadi di Jawa. Untuk menyelamatkan aset yang ada di perusahaan, maka ia dipindah ke Klaten, Jawa Tengah. Nama *Bandung Boeki Kenkyushoo* pun dikembalikan menjadi *Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur*. Di tahun 1945 hingga 1946, terjadi perubahan sejarah yang sangat mendasar pada perusahaan itu, orang Indonesia, R.M. Sardjito, kali pertama menjadi direktur utama.

Dalam *Wikipedia* disebut, R.M. Sardjito lahir di Purwodadi, Magetan, Jawa Timur, 13 Agustus 1889. Meninggal di Yogyakarta, 5

Mei 1970. Ia adalah dokter yang menjadi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada masa perang kemerdekaan ikut serta dalam proses pemindahan *Instituut Pasteur* ke Klaten. Selanjutnya ia menjadi Rektor UGM yang pertama dari awal berdirinya hingga sampai 1961. Setelah itu menjadi Rektor ketiga Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Ketika Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia dan suasana stabil, 1950, perusahaan ini dikembalikan ke Bandung. Namanya pun sudah menggunakan nama Indonesia, yakni *Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur*. Pengelolaan *Gedung Cacar* ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan.

Tahun 1955 hingga 1960, pemerintah



R.M. Sardjito

melakukan nasionalisasi besar-besaran perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi. *Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur* juga dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Setelah dinyatakan secara sah milik Indonesia, nama yang disematkan padanya adalah Perusahaan Negara Pasteur (PN Pasteur).

Di tahun 1961 merupakan titik terakhir nama perusahaan itu hingga saat ini. Lewat Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.101), PN Pasteur diganti menjadi Perusahaan Negara Bio Farma. Mengacu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1997, Bio Farma menjadi Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya dikenal dengan PT. Bio Farma sebagai BUMN.

Perusahaan yang berdiri di lahan seluas 91.058 meter persegi di Jalan Pasteur No. 28, Bandung dan 282.441 meter persegi di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan ada kantor perwakilan di Jakarta, itu memproduksi vaksin dan antisera bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Dalam www.pubinfoindonesia.com, dipaparkan Bio Farma terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga riset nasional dan internasional dalam transfer teknologi. Bio Farma menjadi salah satu dari sedikit produsen vaksin dunia yang memenuhi kualifikasi WHO sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 122 negara. Bio Farma senantiasa melakukan inovasi di berbagai bidang dengan mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini.

Sejak 1997, produk Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 23 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakuualifikasi WHO. Bio Farma juga telah mendapatkan sertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, dan OHSAS 18001: 2007. Atas hasil kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dari 900-an karyawan perusahaan dalam mewujudkan produsen vaksin yang berstandar internasional. □

AWG/dari berbagai sumber



Adu Cepat, Adu Unggul, Menemukan Vaksin

Dalam Perang Dingin, negara-negara besar berlomba-lomba menciptakan senjata pemusnah massal. Saat ini mereka berlomba-lomba menemukan vaksin Covid-19. Ketika Rusia mendeklarasikan diri telah menemukan vaksin, apa yang disampaikan itu diragukan oleh negara-negara Barat yang selama ini menjadi musuhnya.



Vladimir Putin



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

UNTUK menjadi negara *superpower* pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, suatu negara harus memiliki kekuatan tentara yang melimpah, alutsista yang canggih dan mampu menghancurkan kekuatan lawan yang masif, serta didukung kekuatan ekonomi yang mampu menopangnya. Pada masa pandemi Covid-19, syarat untuk menjadi negara *superpower*, hal demikian bukan menentukan lagi. Sekarang siapa (Negara) yang mampu memproduksi vaksin Covid-19 yang pertama kali dan digunakan oleh umat

manusia, dialah yang disebut sebagai negara *superpower*.

Untuk itu saat ini negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, dan negara besar lainnya berlomba-lomba atau *balapan* untuk menemukan vaksin Covid-19.

Di tengah banyak vaksin menjalani uji klinis tahap ketiga, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 11 Agustus 2020 mengumumkan negaranya telah menciptakan vaksin Covid-19 yang pertama di dunia. Vaksin itu dinamakan *Sputnik V*. Nama *Sputnik V*

diambil dari nama satelit yang pertama kali diluncurkan ke ruang angkasa oleh Rusia (Uni Soviet).

Putin dalam konferensi pers mengatakan pertama kali di dunia menemukan vaksin melawan virus corona jenis baru, dan telah mendapat registrasi di Rusia. Vaksin yang dikembangkan Gamaleya Institute di Moskow itu dikatakan terbukti efisien pada saat ujicoba dan menjanjikan imunitas jangka panjang melawan virus. Putin yakin, vaksin yang diproduksi negaranya telah melewati ujicoba yang diperlukan. Dia menyebut salah satu puterinya sudah mendapat vaksin dan merasa sehat.

Apa yang dikatakan sang presiden diperkuat oleh Menteri Kesehatan Rusia. Menurutnya, vaksin Covid-19 produksi Rusia dapat memberikan kekebalan virus corona hingga dua tahun.

Apa yang dirilis Putin mendapat respon sinis dari negara-negara yang sejak lama menjadi musuhnya. Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Alex Azar, menyatakan, negaranya tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Putin. Azar mengatakan, membuat vaksin bukan cepat-cepatan atau dulu-duluan, namun paling penting adalah vaksin itu aman dan efektif untuk



Alex Azar

rakyat Amerika Serikat dan dunia.

BPPOM-nya Amerika Serikat, yakni *The Food and Drug Administration* (FDA), lebih *pedes* dalam mengomentari vaksin Covid-19 buatan Rusia. Menurut Komisioner FDA, Scott Gottlieb, Rusia memaksakan calon vaksin yang masih uji klinis tahap pertama untuk diresmikan menjadi vaksin. Gottlieb menyebut, Rusia memancing Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama, yakni segera meluncurkan vaksin. “Mengajak Amerika Serikat mengambil langkah dini”, ujarnya Gottlieb dalam *twitter*-nya. Amerika Serikat berusaha untuk tidak terpancing dengan *Sputnik V* yang telah diluncurkan.

WHO juga ragu dengan apa yang telah dihasilkan oleh negara beruang merah itu. Melalui juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, badan kesehatan dunia itu ingin berkoordinasi dengan Rusia untuk mengecek sejauh mana efektivitas dan keamanan vaksin yang telah dibuat. WHO berharap, dalam memproduksi vaksin harus memenuhi syarat tinjauan dan penilaian yang cermat atas semua data terkait keamanan dan kemanjuran.

Jasarevic membenarkan bahwa setiap negara mempunyai badan regulator yang memberikan lampu hijau penggunaan obat maupun vaksin di wilayahnya, namun ditegaskan WHO-lah yang berhak untuk melakukan proses prakualifikasi tidak hanya vaksin namun juga bagi obat-obatan. “Setiap



Tarik Jasarevic

perusahaan bakal mengajukan proses prakualifikasi dari WHO karena menjadi semacam cap kualitas”, ujar Jasarevic seperti teruat dalam berita online. Agar bisa lolos dari prakualifikasi, WHO membutuhkan data efektivitas dan keselamatan yang dikumpulkan selama fase uji klinis.

Tidak hanya Amerika Serikat dan WHO yang ragu terhadap virus temuan Rusia itu, peneliti dari Universitas College, London, Inggris, Francois Balloux, juga ragu dengan *Sputnik V*. Balloux bahkan mengumpat hasil itu. Dia menyebut, tergesa-gesa bila menyetujui *Sputnik V*. “Keputusan ceroboh dan bodoh”, ujar Balloux. Bila vaksin itu terus

didengung-dengungkan oleh Putin maka kelak akan menuai masalah. Dampaknya berlipat ganda, tak hanya berimplikasi negatif pada relawan.

Soal keselamatan pasien, menurut Kementerian Kesehatan Jerman, merupakan prioritas utama. Negara Panser itu khawatir mengenai seberapa manjur *Sputnik V*. “Sejauh ini tidak ada data mengenai kualitas, efektivitas, dan keselamatan yang bisa ditunjukkan *Sputnik V*”, ujar pihak Kementerian Kesehatan Jerman.

Amerika Serikat sendiri dalam masalah vaksin telah meluncurkan *Operation Warp Speed*. Operasi ini untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke seluruh rakyat Amerika Serikat pada Januari 2021. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, secara mandiri atau bekerja sama antarnegara dan antarperusahaan.

Dalam mencegah penularan Covid-19, dunia sekarang sepertinya berharap hanya vaksin. Meski vaksin masih uji klinis tahap ketiga, namun banyak negara sudah meng-ijon vaksin pada negara atau produsen vaksin. Produsen vaksin dunia adalah Oxford/Astra Zeneca, Novavax, Sanofi/GSK, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Moderna, Valneva, Johnson & Johnson, dan Gamaleya.

Disebutkan Oxford dan Sanofi bersepakat dengan Komisi Eropa memenuhi 700 juta dosis vaksin Covid-19. Inggris yang berada di luar Komisi Eropa memesan sendiri kepada salah satu pengembang sebanyak 250 juta dosis. Jepang memesan 490 juta dosis dari beberapa pemasok, di antaranya dari Novavax sebanyak 250 juta dosis. Brasil memesan 100 juta dosis dari AstraZeneca.

Amerika Serikat merupakan negara yang royal mengeluarkan anggaran untuk melakukan penelitian penemuan vaksin. Disebut US\$ 9,4 miliar diberikan kepada Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AztraZeneca, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK, Merck Sharp dan Dohme, untuk untuk menyediakan 700 juta dosis vaksin. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG/dari berbagai sumber

Umbara

Ojek Online

Gotong Royong di Saat Sulit Cerminan Pancasila

SEBAGAI masyarakat biasa, saya adalah salah satu yang sangat terpukul dengan adanya pandemi virus Corona ini. Sangat berat. Tapi, saya banyak melihat di berita-berita, di televisi, banyak warga masyarakat saling membantu meringankan beban sesama.

Dan, itu saya rasakan juga dengan adanya banyak donatur dalam acara MPR Peduli Covid-19. Ternyata, masyarakat Indonesia, sifat dan karakter gotong royongnya sangat luar biasa. Kata Ketua MPR, itu adalah cerminan dari Pancasila. Pancasila memang begitu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Saya apresiasi dan berterima kasih. Saya berharap, implementasi Pancasila seperti itu. Apalagi di saat pandemi virus ini belum juga selesai gotong royong, saling membantu sesama, harus terus ditingkatkan lagi sampai virus habis. Jangan berhentilah, bantu sesama rakyat Indonesia yang kesulitan.

Bantuan sekecil apapun di masa sekarang ini sangat berarti buat rakyat kecil. Sekali lagi saya berharap agar semua turut berempati, simpati, dan kembangkan rasa toleransi di saat seperti ini. □

DER



Isran Noor

Ketua Umum Perhiptani

Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Jangan Diabaikan

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dampaknya sangat luas, bahkan hingga bisa mengakibatkan resesi perekonomian Indonesia.

Bukan hanya itu, krisis pangan juga sangat menghantui rakyat Indonesia jika tidak ada solusi penyelesaian dari sekarang. Banyak sudah berbagai solusi dan upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, secara swadaya dalam menghadapi dampak pandemi ini.

Salah satu upaya tersebut, menurut saya, adalah menjaga ketahanan pangan agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Sangat miris kalau krisis pangan terjadi, mengingat Indonesia adalah wilayah yang subur. Untuk itu, dunia pertanian Indonesia mesti urun rembuk menyampaikan masukan-masukannya terkait ketahanan pangan.

Ketahanan pangan bukan hanya untuk menghadapi dampak covid saja, namun juga untuk menjaga dan meraih perkembangan bidang pertanian Indonesia. Dalam dunia pertanian juga sangat penting adalah para penyuluh pertanian. Merekalah yang berperan dalam upaya mengembangkan produksi pertanian hingga bisa maksimal.

Pemerintah dalam hal ini mesti mendukung pengembangan pertanian Indonesia, demi menjaga ketahanan pangan Indonesia serta demi kemajuan bangsa Indonesia. □

DER

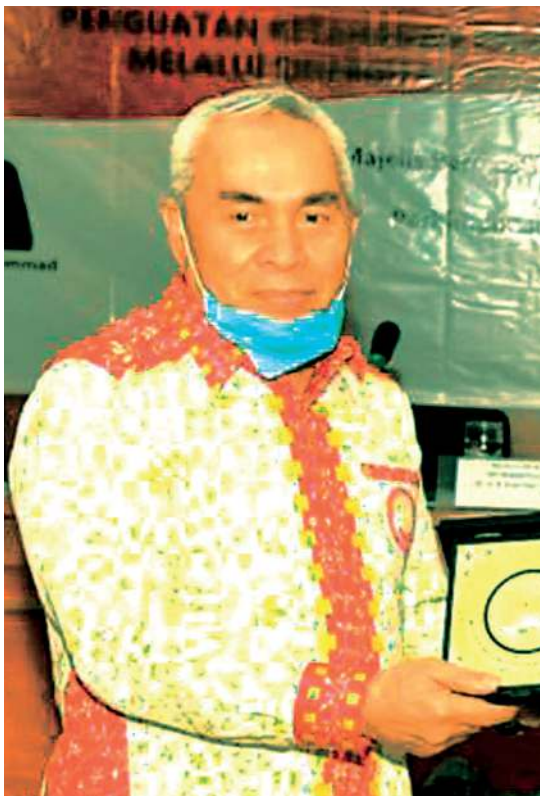


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ketika POP Menjadi Polemik

Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP), masyarakat dan organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan menyambut gembira. Namun, di tengah perjalanan, muncul polemik. Masalahnya tidak main-main. Nyatanya, organisasi yang sudah bergerak di dunia pendidikan, yaitu: NU, Muhammadiyah, dan PGRI menyatakan keluar dari program itu. Apa yang terjadi dengan POP? Berikut pendapat para wakil rakyat yang membidangi masalah pendidikan.

Hetifah Sjaifudian, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Apa Elok Swasta Mendapat Dana APBN



ADANYA beberapa organisasi yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP), dengan beberapa alasan yang mereka kemukakan, antara lain kekurangan atas proses seleksi yang menurut mereka memiliki kriteria kurang jelas. Juga ada alasan sebagai bentuk protes karena adanya pihak-pihak swasta yang terpilih dalam program ini, dan seakan mereka disamakan dengan yayasan-yayasan yang telah bergerak di bidang pendidikan selama puluhan tahun. PGRI juga menyampaikan, POP bukan prioritas dan anggaran miliaran tersebut dapat dialihkan untuk meningkatkan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

Jadi, seleksi POP ini memang terbuka dan

semua organisasi yang dinilai memenuhi kriteria dapat mendaftar. Syaratnya, antara lain organisasi tersebut telah memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia pendidikan Indonesia. Terutama, organisasi-organisasi yang telah menerapkan *best practice* dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi.

Apakah ada ketidakjelasan mekanisme sehingga ada organisasi yang menerima dana, padahal seharusnya tidak berhak mendapat? Jadi, seharusnya tidak berhak mendapat, ternyata menerima. Mereka memang berhak, karena dari awal mengikuti proses seleksi dan sesuai dengan kriteria Kemendikbud. Yang dipertanyakan masyarakat mungkin lebih ke masalah kepatasan

saja, apakah elok jika swasta mendapatkan dana APBN yang seharusnya mereka bisa menyumbang. Namun, klarifikasi dari pihak Kemendikbud, dalam POP ini sebenarnya tidak semua mendapatkan APBN. Ada yang menjalankan program melalui skema *self-funding*, ada juga yang *joint funding* atau seperti patungan.

Saya percaya Kemendikbud tentu mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat dalam keberjalanan program-programnya dalam mendukung proses yang partisipatif. Evaluasi dari masyarakat pasti akan menjadi masukan, apalagi dari organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki pengalaman dan kontribusi yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi pendidikan Indonesia. Jika memang setelah mendapat masukan dari banyak pengamat pendidikan tidak sedikit menyatakan, program tersebut sebaiknya ditunda. Saya rasa opsi itu dapat dipertimbangkan.

Saya rasa kalau untuk sekarang yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pastikan setiap siswa dan guru memiliki gawai dan akses internet untuk belajar jarak jauh. Terus adakan bimtek-bimtek bagi guru agar dapat menjalankan PJJ dengan baik, karena banyak keluhan, sekarang guru hanya memberikan soal saja. Program-program parenting untuk peningkatan kapasitas orangtua dalam mendampingi anak juga perlu digalakkan dan disosialisasikan lebih lanjut. □

AWG

Zainuddin Maliki, Anggota MPR Fraksi PAN

POP Dinilai Tak Memiliki Urgensi

BEBERAPA organisasi yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) memiliki beberapa alasan, di antaranya absennya pengakuan atau rekognisi sebagaimana mestinya dari Kemendikbud terhadap keberadaan dan pengabdian yang telah diberikan ormas tersebut kepada negara ini. Di samping itu, POP dinilai tidak memiliki urgensi yang kuat di tengah bangsa Indonesia menghadapi Covid-19. Apalagi Presiden Jokowi meminta semua pihak memiliki *sense of crisis* dengan meminta semua menteri mengambil langkah-langkah *extraordinary*.

Jelas POP tidak ada korelasi langsung dengan penanganan Covid-19. Program yang sebenarnya lebih relevan adalah memberi bantuan kepada para orang tua, siswa, dan guru yang membutuhkan gawai dan ketersediaan pulsa. Para guru juga perlu support anggaran untuk melakukan inovasi agar PJJ yang dikelolanya bisa menjadikan siswa belajar di rumah aktif, mandiri, bertanggung jawab, hasilnya efektif, dan menyenangkan. Untuk para orang tua, siswa dan guru yang di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) butuh support agar bisa melakukan pembelajaran dengan pendekatan *luring*. Kemendikbud harus turunkan program untuk mengatasi keluhan pembelajaran daring maupun *luring*. Jadi, POP jelas tidak mendesak.

Tentu semua organisasi bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi menjadi penerima anggaran POP. Persoalannya, setelah proses seleksi berlangsung, masyarakat mencium bau *conflict of interest*. Banyak yang mempertanyakan cara melakukan seleksi. Ambil contoh, ketika mengevaluasi usulan Universitas Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. Perguruan tinggi ini selama enam tahun bersama Unicef memberi pendidikan dan pelatihan kepala sekolah, guru, komite, orang tua dan siswa didik, terutama di daerah pinggiran dan terisolasi, terkait manajemen berbasis sekolah. Juga pelatihan literasi, *lifeskill* dan berbagai teknik instruksional. Unimuda dengan Unicef juga melakukan *Community Based Holistic and Integrative ECD-Early Childhood Develop-*

ment, MBS bagi kepala sekolah, hingga *Community Development*. Jadi persis sama bahkan bisa jadi lebih baik dari yang akan dilakukan oleh POP. Tetapi, karena rekam jejak Unimuda tidak masuk peta rekognisi Kemendikbud, proposal yang notabene disusun bersama Unicef itupun tidak lolos.

Apakah ada ketidakjelasan mekanisme sehingga ada organisasi menerima dana, padahal seharusnya tidak berhak mendapat? Ketidakjelasan itu mudah dibaca setelah dua organisasi besar milik dua orang yang tergolong 10 orang terkaya di Indonesia memperoleh alokasi dana gajah. Pada saat

mintanya di-assessment oleh tim yang ditunjuk Kemendikbud. Kalau punya dana mandiri, ya mestinya langsung saja melangkah.

Kemendikbud juga melakukan klarifikasi bahwa seleksi dilakukan secara obyektif karena pelaksananya tim independen, yaitu SMERU Research Institute. Lembaga ini mengklaim telah melakukan seleksi sesuai aturan. Metode evaluasi *double blind review* diterapkan untuk menjaga netralitas, independensi dan memastikan prinsip imparialitas. Mungkin benar evaluasi terhadap proposal dilakukan dengan metode evaluasi *double blind review*, tetapi waktu



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mendikbud rapat dengar pendapat dengan Komisi X tidak dijelaskan ada tiga skema POP, yaitu APBN, Pendampingan, dan Mandiri. Mendikbud hanya menjelaskan, ada satu skema alokasi, yaitu dana APBN untuk dihibahkan kepada organisasi penggerak. Tetapi begitu Muhammadiyah, NU, dan PGRI melakukan penolakan, pihak Kemendikbud melakukan klarifikasi bahwa kedua organisasi "gajah" tersebut mengambil skema anggaran mandiri.

Tentu, penjelasan ini tidak menjawab masalah. Justru tambah aneh, karena di samping klarifikasi disampaikan setelah gaduh, juga timbul pertanyaan, kalau organisasi "gajah" tersebut punya anggaran mandiri kenapa harus repot membuat proposal lalu

visitasi ke kantor masing-masing ormas, jelas metode evaluasi *double blind review* itu tidak bisa diberlakukan.

Di sinilah kemudian ketika ada organisasi besar, juga lembaga yang mungkin ada kedekatan dengan pejabat di dalam Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran POP, inilah yang dipertanyakan masyarakat. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno pun meragukan verifikasi dan transparansi proses seleksinya.

Bukan soal swasta mengendalikan pendidikan di Indonesia, tetapi soal pengakuan atau rekognisi terhadap apa yang telah disumbangkan swasta, seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Pemerintah, khususnya Mendikbud, hendaknya meny-

dari bahwa negara selama ini tidak bisa hadir di seluruh aspek dan lini pendidikan. Padahal, konstitusi mengamanahkan pemerintah harus hadir mencerdaskan kehidupan bangsa. Justru selama ini, Muhammadiyah, NU, dan juga PGRI hadir menyelamatkan wajah negara dengan membantu mengisi yang pemerintah tidak bisa mengisi sebagaimana pesan konstitusi.

Puluhan ribu lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah dan NU, bahkan sudah hadir sejak Indonesia belum merdeka dengan berbagai portofolio yang gampang untuk mendapatkannya, tetapi sulit dipahami akal sehat kalau tidak mendapatkan pengakuan atau rekognisi dari Kemendikbud sebagaimana mestinya.

Yang mesti dibenahi: *Pertama*, POP perlu dievaluasi, di samping proses seleksinya menimbulkan kegaduhan juga karena program ini elitis. Tujuannya, menggerakkan pendidikan dengan mendanai penggerak. Sedangkan penggerak itu dipilih karena memiliki *performance* yang baik. Dengan demikian berarti POP mendanai organisasi atau penggerak yang sudah bergerak. Sementara, guru, siswa, dan orang tua yang masih harus dibantu justru tidak memperoleh sentuhan anggaran.

Kita tahu banyak orang tua yang mengeluh karena tidak bisa membeli gadget dan

pulsa, hingga ada kasus pencurian gadget dan laptop demi anak agar bisa ikut Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Apa yang bisa dilakukan Kemendikbud hanya bisa sediakan dana BOS. Jelas BOS tidak memadai untuk menutup kebutuhan penyediaan pulsa guru maupun siswa.

Di tengah wabah pandemi Covid-19, di mana pembelajaran 94% masih harus dilakukan dengan PJJ, karena berada di zona orange dan merah, maka kebutuhan anggaran untuk mensupport sarana prasarana guru, siswa, dan orang tua jauh lebih mendesak. Jadi, tidak relevan kalau memaksakan anggaran Rp 595 miliar untuk POP yang tidak ada kaitan langsung dengan penanganan dampak Covid-19 terhadap dunia pendidikan saat ini.

Di sisi lain, POP juga menggambarkan Kemendikbud tidak percaya terhadap lembaganya sendiri, seperti LPMP, Pudatin, Balitbang, para pegiat pendidikan non formal yang memang selama ini fungsi dan tugasnya, antara lain melakukan pengembangan mutu sekolah, kualitas guru, dan pembelajaran maupun penyediaan pelatihan.

Kedua, perlu diluruskan kebijakan pendidikan dengan label besar, merdeka belajar dan merdeka kampus, itu adalah instrument bukan tujuan. Demikian juga mendekatkan

lulusan dengan dunia industri hanyalah sasaran antara, bukan tujuan. Karena, tujuan pendidikan nasional dengan jelas telah dirumuskan dengan baik dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: mengembangkan potensi siswa didik hingga menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan demikian harus mendesain pendidikan nasional hingga mampu mentransformasikan siswa didik, seperti diamanahkan oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut.

Ketiga, dalam menyusun peta jalan pendidikan 2020-2035, Kemendikbud mengedepankan pentingnya kecerdasan literasi dan numerasi agar bisa beradaptasi dengan masyarakat industri 4.0 yang didominasi sejumlah produk teknologi *artificial intelligence*, *otomatisasi*, *big data*, dan teknologi digital lainnya. Tentu kecerdasan literasi dan numerasi dibutuhkan. Tetapi bangsa Indonesia saat ini tengah membutuhkan modal untuk bisa *survive*. Kata Fukuyama, modal untuk *survive* di abad ini bukan kecerdasan pragmatis, melainkan social capital, yakni trust. Sayangnya yang muncul ke permukaan di negeri ini bukan sikap saling percaya, tetapi justru prasangka dan saling curiga. □

AWG

Sakinah Al Jufri, Anggota MPR Fraksi PKS

Seharusnya Kemendikbud Jelaskan di Awal Program



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PROGRAM Organisasi Penggerak (POP) merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud sendiri akan menggelontorkan dana ratusan miliar per tahun untuk membiayai pelatihan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Namun, di tengah perjalanan, seleksi organisasi yang akan mengikuti program ini, tiga organisasi besar yaitu: Muhammadiyah,

Ma'arif NU, dan PGRI mundur dari kontestan ini. Mundurnya organisasi-organisasi besar ini ditengarai karena ketidakjelasan rekrutmen organisasi dalam program POP. Tolak ukur pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, temuan Ma'arif NU dalam daftar penerima POP banyak sekali organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP.

Seharusnya semua organisasi yang bergerak di bidang pendidikan berhak mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dalam POP. Namun, yang perlu dicatat adalah dalam proses seleksinya harus transparan dan jelas. Organisasi-organisasi yang memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia pendidikan, kompeten, berpengalaman harus diper-

hatikan. PGRI, Ma'arif NU, dan Muhammadiyah adalah lembaga yang sangat kompeten dan mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan. Jasa-jasa mereka dalam dunia pendidikan sangat banyak selama puluhan tahun, mereka harus dilibatkan.

Setelah polemik ini muncul, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui rilis resmi menjelaskan bahwa pembiayaan POP dapat dilakukan secara mandiri atau berbarengan dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Padahal, dalam rapat-rapat bersama Komisi X tak pernah penjelasan soal ada skema pembiayaan mandiri. Dan, seharusnya Kemendikbud sudah jelas dari awal sebelum program ini diluncurkan. Program Guru dan tenaga kependidikan Tahun 2021 yang disampaikan kepada kami pada RDP dengan Komisi X DPR-RI hanya menjelaskan tentang tiga kategori organisasi yang akan menjadi mitra Kemendikbud dalam POP, yaitu Gajah,

Macan dan Kancil. Tidak disampaikan adanya skema pembiayaan mandiri. Kalau pun ada skema pembiayaan mandiri harusnya dijelaskan sejak awal, katagori organisasinya pun harus ada, harus tercantum dalam aturan Kemendikbud.

Saat ini kategori Gajah akan memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun, kategori Macan akan memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun, dan kategori Kancil akan memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun. Lalu, organisasi yang ikut andil dalam program ini dengan pembiayaan mandiri masuk kategori apa?

Kami harap Kemendikbud meninjau kembali pelaksanaan program ini untuk menghindari masalah yang tidak diharapkan di kemudian hari. Minimal ditunda pelaksanaannya untuk dibenahi terlebih dahulu. Kalau program ini hanya menghambur-hamburkan uang negara, mendingan program ini dibatalkan. □

AWG



Hari Konstitusi 2020

Momentum Refleksi dan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Meski Hari Konstitusi 2020 diperingati secara sederhana di masa pandemi Covid-19 ini, tapi tak mengurangi makna dari peringatan lahirnya Konstitusi Indonesia, UUD NRI Tahun 1945.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERINGATAN Hari Konstitusi 2020 berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 18 Agustus 2020. Temanya: Kita Laksanakan UUD NRI Tahun 1945 Untuk Wujudkan Indonesia Maju. Di masa pandemi Covid-19 ini, MPR RI memang menggelar peringatan Hari Konstitusi secara sederhana. Karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jumlah peserta di batasi, dan ketentuan harus memakai masker dan jaga jarak diberlakukan untuk seluruh tamu undangan, tentunya yang hadir secara fisik.

Meski peringatan Hari Konstitusi dilaksanakan dengan sejumlah keterbatasan, termasuk jumlah kehadiran, namun tak mengurangi kekhidmatan acara ini. Pimpinan MPR yang hadir secara fisik, selain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, juga hadir Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari

Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syariefuddin Hasan, dan Arsul Sani. Sementara hadir secara virtual Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Juga hadir secara fisik para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Pimpinan Badan Sosialisasi, Pimpinan Badan Pengkajian, Pimpinan Badan Penganggaran, dan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Sementara tamu kehormatan dari luar lembaga MPR RI yang hadir secara virtual adalah Wakil Presiden RI. KH. Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, dan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti. Sedangkan yang hadir secara fisik adalah Menkopolkam Mahfud, MD., Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, serta perwakilan Kapolri dan perwakilan Panglima TNI.

Tepat pukul 10.00 WIB acara dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, didahului menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi alunan musik dari grup Gita Mahaswara Orchestra dan Gita Swarananta Choir Sekolah Intelijen Negara (STIN). Dalam pidatonya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga, sebab meski di tengah keprihatinan menghadapi bencana pandemi Covid-19, bangsa ini masih dapat melaksanakan agenda yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara, yakni memperingati hari lahirnya konstitusi Indonesia, UUD NRI Tahun 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, saat di mana secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. "Pada tanggal itu pulalah cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ditetapkan. Pada



tanggal itu juga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” urainya.

Peringatan Hari Konstitusi, lanjut Bamsoet, menjadi momentum bersama bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan, konstitusi maupun pelaksanaannya. Refleksi dan evaluasi apakah konstitusi telah mampu memandu secara konstitusional seluruh

kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya.

“Untuk menjamin bahwa UUD adalah konstitusi yang hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata mantan Ketua DPR RI ini.

Untuk menjawab apakah konstitusi telah mampu memandu secara konstitusional

seluruh kehidupan bangsa Indonesia, Bamsoet menyatakan, sedikitnya ada tiga hal mendasar yang dapat menjadi batu uji evaluasi. *Pertama*, konstitusi hadir sebagai instrumen hukum yang membatasi pelaksanaan pemerintahan negara agar tidak menyimpang dari kaedah konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, konstitusi hadir untuk mengatur wewenang lembaga-lembaga negara dan hubungan di antaranya dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya

dalam sistem ketatanegaraan. *Ketiga*, konstitusi hadir untuk mengatur hubungan negara dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, terkait dengan jaminan dan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. “Atas dasar itulah UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD,” ujarnya.

Bamsoet mengungkapkan, meski MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, namun amanat untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukanlah hal mudah. Untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan keseksamaan, kecermatan, dan kehati-hatian

karena menyangkut hukum dasar negara.

“Amanat untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukan hal mudah. Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, penuh keseksamaan, kecermatan, dan kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara,” paparnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, lanjut Bamsoet, juga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju sebagaimana juga

tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Indonesia Maju sebagaimana amanah dari Ketetapan MPR tersebut, antara lain meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa, meningkatnya kualitas SDM, meningkatnya kualitas pendidikan, disiplin dan etos kerja, meningkatnya penguasaan Iptek.

“Kami MPR sangat mengapresiasi dan mendukung penuh tekad Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju yang pada hakikatnya selaras dan merupakan implementasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan,” ujar Bamsoet. □

DER

Hari Konstitusi

Bamsoet: Diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara

MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan dengan peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada 18 Agustus 1945. Di tanggal inilah secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. Pada tanggal ini pula cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ditetapkan. Dan, pada 18 Agustus 1945 ini pula tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Misalnya, ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi, dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Atas dasar itulah, MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi,” ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta (18/8/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI telah membangun sistem informasi pengelolaan penyerapan aspirasi masyarakat berbasis pada teknologi informasi (e-aspirasi konstitusi). MPR RI juga telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan,



yang ternyata selaras dengan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Keselarasan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. *Pertama*, prioritas pembangunan infrastruktur yang bertujuan membangun kesetaraan antardaerah. *Kedua*, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. *Ketiga*, menekankan pentingnya investasi dalam negeri. *Keempat*, reformasi birokrasi melalui pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien.

Terakhir, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien untuk memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutur Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menjelaskan, untuk menjamin kontitusi hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, sesuai kebutuhan masyarakat.

Amanat melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukan hal mudah.

“Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan penuh keseksamaan, kecermatan dan kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan ke-amanan negara,” pungkas Bamsuet. □

Hari Konstitusi

Gus Jazil: Momentum Mewujudkan Cita-Cita Kemerdekaan

Hari Konstitusi diharapkan jadi momentum bagi semua untuk mengevaluasi diri apakah perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah sesuai dengan konstitusi.

SETIAP tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Konstitusi. Dasar peringatan Hari Konstitusi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Hari Konstitusi. Tujuan peringatan Hari Konstitusi adalah untuk mengenang bagaimana selepas Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, satu hari kemudian, tepatnya 18 Agustus 1945, bangsa ini menetapkan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusinya. Dengan adanya konstitusi maka syarat untuk menjadi satu negara menjadi sah, selain adanya wilayah dan penduduk.



Sejak 2008 hingga 2020, MPR rutin menggelar peringatan Hari Konstitusi. Tahun ini, 2020, peringatan Hari Konstitusi digelar di tengah pandemi Covid-19. Tema Hari Konstitusi tahun ini: ‘Kita Laksanakan UUD NRI Tahun 1945 Untuk Wujudkan Indonesia Maju’.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid saat memperingati Hari Konstitusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta (18/8/2020), mengatakan, peringatan Hari Konstitusi sangat penting, tidak hanya untuk menyegarkan kembali ingatan bangsa Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun bagaimana UUD diimple-

mentasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam Pembukaan UUD termuat cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Nah inilah cita-cita kemerdekaan kita,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ini menyatakan, sejak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, hingga saat ini, pembangunan terus dilakukan oleh satu pemerintah ke pemerintah selanjutnya. Di sana-sini ada kemajuan, namun hal demikian perlu terus ditingkatkan. “Perlu terus diperjuangkan dan direalisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD,” ujarnya.

Cita-cita kemerdekaan Indonesia, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, tidak setiap saat diingat oleh masyarakat. “Nah dengan momentum Hari Konstitusi kita ingatkan itu,”ujarnya. “Juga menjadikan momentum Hari Konstitusi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” tambahnya.

Tak hanya itu, menurut Gus Jazil, Hari Konstitusi diharap dijadikan momentum bagi semua untuk mengevaluasi diri apakah perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah sesuai dengan konstitusi. “Bila kita menghargai perbedaan, toleransi, hormat-menghormati, dan gotong-royong, berarti kita sudah berkonstitusi,” paparnya. “Bila di tengah masyarakat terjadi cacik, saling membuli, dan memfitnah, berarti masyarakat jauh dari nilai-nilai konstitusi,” tambahnya.

Dengan paparan di atas, Gus Jazil menyebut banyak nilai positif dari peringatan Hari Konstitusi yang digelar setiap tahun oleh MPR. “Mari dengan semangat Hari Konstitusi kita wujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”, ujarnya. □

Nusa Tenggara Timur

Safari Kunjungan Kerja
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
 di Flores, NTT



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Akhir Juli 2020, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid yang biasa disapa Gus Jazil melakukan kunjungan kerja di berbagai tempat atau lokasi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama kunjungan itu, selain melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Gus Jazil juga meninjau situs-situs bersejarah, obyek wisata, kegiatan keagamaan, dan lainnya.

Hari pertama, 28 Juli 2020:
Mengunjungi Taman Renungan Bung Karno

Begitu tiba di Kabupaten Ende, Pulau Flores, NTT, pada 28 Juli, yang pertama kali dikunjungi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid adalah situs bersejarah jejak Presiden Soekarno, berupa sebuah taman yang dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno. Taman yang berdampingan dengan Pelabuhan Ende itu mengingatkan bahwa pada masa lalu, saat Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, tempat ini digunakan oleh Bung Karno untuk merenung, termasuk juga memikirkan tentang konsep dasar-dasar negara.

Saat ini, Taman Renungan Bung Karno dijadikan sebagai salah satu jejak sejarah bahwa di bawah pohon sukun, yang terdapat di taman tersebut, Bung Karno menemukan nilai-nilai Pancasila. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan,” ungkap Jazilul Fawaid sesaat setelah mengunjungi dan

melihat dari dekat kondisi Taman Renungan Bung Karno tersebut. “Saya miris melihat taman ini, tidak terurus,” tambahnya. Padahal, kata pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ini di tempat inilah Soekarno menemukan lima mutiara, yang kelak menjadi dasar bernegara.

Di bawah pohon sukun, Soekarno mencurahkan pikiran dan memeras otak untuk menemukan nilai yang dapat mempersatukan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan beragam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. “Terbukti apa yang ditemukan Bung Karno mampu mengikat bangsa ini,” paparnya.

Namun, lagi-lagi dia menyayangkan kondisi taman yang tidak mendukung sebagai tempat temuan besar dari Bung Karno. Di satu sisi, kata Gus Jazil lebih lanjut, bangsa ini ingin memperkuat dan memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi di tempat ditemukan Pancasila,



kondisinya masih perlu banyak dibenahi. “Artinya kita kurang memberi penghargaan pada jejak sejarah yang ada,” ucapnya. Seharusnya, menurut Gus Jazil, di Taman Renungan Bung Karno ini ada fasilitas pendukung yang lain, seperti perpustakaan, laboratorium Pancasila, dan bila perlu dijadikan tempat pendidikan kebangsaan selama dua hingga empat bulan.

Fasilitas seperti itu, kata Jazilul, perlu ada agar sebanding dengan apa yang ditemukan oleh Sukarno di Ende. Untuk itu, sebagai Wakil Ketua MPR, dia mengajak para pengusaha, pihak swasta, masyarakat luas, dan pemerintah pusat untuk bersama-sama membangun dan membenahi Taman Renungan Bung Karno ini agar menjadi taman yang megah. “Bila ada yang ahli desain, sumbangkan pikiran tentang tata kota. Bila pengusaha, bantulah dana,” katanya.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu mengatakan, dia akan peduli terhadap keberadaan taman ini. Dia akan berkampanye agar keberadaan Taman Renungan Bung Karno menjadi lebih baik. “Saya akan berjuang terus untuk taman ini sampai menjadi lebih bagus,” tambahnya.

Selanjutnya, dia berharap, pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membenahi Taman Renungan Bung Karno, sebelum membenahi situs-situs lainnya.

Rumah Pengasingan Bung Karno

Setelah mengunjungi Taman Renungan Bung Karno, selanjutnya Gus Jazil mengunjungi dan melihat situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Dalam kesempatan itu, Jazilul menuturkan, berjuang untuk kemerdekaan bangsa merupakan perbuatan mulia dan luar

biasa. “Bung Karno pada masa itu diasingkan di kota kecil dan terpencil, namun tetap gigih berjuang,” ujarnya. Untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, menurut Gus Jazil, bangsa ini harus mengisinya dengan perbuatan nyata.

Di Ende banyak jejak dan peninggalan Soekarno saat menjalani masa pengasingan. Untuk itu, ia berharap agar Kabupaten Ende mendapat perhatian dari pemerintah pusat. “Agar masyarakat Ende menjadi bangga dari apa yang dimiliki di tempat ini,” tuturnya.

Dia berharap, situs pengasingan ini mendapat perhatian dari pemerintah. Selama ini, sepertinya di tempat itu ada petugas yang hanya sebatas menjaga apa yang ada. Ia mendorong agar di sekitar situs pengasingan ada lahan parkir sehingga kendaraan pengunjung tidak berhenti di jalan. Selain itu, koleksi-koleksi yang ada perlu adanya sentuhan teknologi. Dengan sentuhan

portasi. "Jalan-jalan yang ada perlu diperlebar," tuturnya. Setelah infrastruktur terbangun, selanjutnya dan sama pentingnya, menurut Jazilul Fawaid, adalah membangun sumber daya manusia.

Kemudian, Gus Jazil juga menyarankan, perlu didirikan SMK bidang pariwisata. Lulusan sekolah pariwisata inilah yang akan diserap para pelaku di sektor pariwisata. "Jadi jangan hanya membangun jalan," tuturnya. Perlu juga mendidik masyarakat agar bisa mendukung sektor yang dikembangkan. "Semua harus terencana," paparnya. Apalagi, menurut Jazilul, masyarakat Ende dan Pulau Flores merupakan masyarakat terbuka sehingga mereka mau me-

tempat yang dituju," tuturnya.

Membangun sektor pariwisata, kata Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, sangat penting. Alasannya, maju atau tidaknya suatu negara dan masyarakatnya indikatornya adalah sektor ini. Saat pandemi Covid-19, dampak yang diukur salah satunya adalah sektor pariwisata. "Bila sektor pariwisata sepi maka ekonominya juga akan turun," ujarnya. Untuk itulah, tempat-tempat wisata yang aman, masuk dalam zona hijau, seharusnya dibuka untuk umum.

"Kami ke Danau Kelimutu karena tempat wisata ini masuk dalam zona hijau," jelasnya. Tempat wisata seperti Danau Kelimutu perlu

Fawaid mengatakan, rasanya khas. Kopi khas Ende ini, menurut Jazilul, berbeda dengan kopi-kopi di tempat lain. "Saya pikir tidak kalah dengan kopi dari luar," ungkapnya.

Kepada para wartawan, ia menjelaskan bahwa Bumdes perlu lebih dikembangkan dan harus bisa menjadi contoh Bumdes di daerah-daerah lainnya. Bumdes yang ada, menurut politisi PKB itu, sudah semestinya dan seharusnya dijadikan sarana untuk memberdayakan masyarakat desa. Bila ada yang kurang maka pemerintah wajib membantu. Dia mengungkapkan, di Bumdes yang dikunjungi itu tidak ada alat untuk mengemas dan meracik kopi. "Padahal alat yang demikian sudah dipersiapkan pemerintah,"



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nerima wisatawan yang beragam.

Untuk mengembangkan tempat wisata, Jazilul Fawaid mengakui, perlunya promosi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa lalu mempunyai anggaran yang besar. Dari anggaran yang ada, kata Gus Jazil, separonya digunakan untuk melakukan promosi. "Nah, promosi belum dilakukan oleh pemerintah secara maksimal," katanya. Dalam mempromosikan tempat wisata, menurut Jazilul, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Travel-travel biro diharap juga melakukan hal yang sama. Dia meminta agar travel biro aktif mempromosikan tempat wisata. "Bila travel biro bagus maka sektor wisatanya juga bagus," ujarnya.

Begitu pula masyarakat luas hendaknya ikut mendorong sektor pariwisata di daerah dengan cara mengunggah status-status tempat wisata di media sosial. "Setelah dipromosikan, tinggal kita mempersiapkan tempat menginap dan transportasinya di

segera dibuka agar sektor-sektor pendukung, seperti kerajinan tangan, oleh-oleh, dan usaha kecil dan menengah dari masyarakat, juga segera ikut menggeliat. "Bila tempat wisata itu aman segera buka dan jangan takut," tegasnya. Meski demikian, harap Gus Jazil, tempat wisata juga perlu menerapkan protokol kesehatan. "Di tempat wisata ini saya juga melihat ada penerapan protokol kesehatan," ungkapnya. □

AWG

Singgah di Warung Bumdes

Setelah menginjungi obyek wisata Danau Kelimutu, masih di Kabupaten Ende, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid singgah di salah satu warung yang berada di pinggir jalan. Di warung itu, ia bersama rombongan disuguhi jagung, pisang dan ketela bakar, serta kopi khas Ende. Warung ini ternyata merupakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Saat menikmati kopi khas Ende, Jazilul

tuturnya.

Di desa itu ada potensi kopi, namun alat pengeolaannya masih minim. Padahal pasar terbuka, sebab Bumdes yang ada berada di jalur lalu lintas ke tempat wisata Danau Kelimutu. "Kalau ke Kelimutu bisa mampir ke sini," ucapnya.

Sebagai wakil rakyat, Jazilul Fawaid berjanji akan membantu apa yang kurang di Bumdes itu. "Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk melihat Bumdes-Bumdes yang punya potensi," ujar Gus Jazil. Di era pandemi Covid-19, menurut Jazilul, Bumdes secepatnya mengoordinir potensi desa dan langsung dikerjakan karena hal itu akan membuat pertumbuhan ekonomi di desa menggeliat. Dengan adanya aktivitas ekonomi maka ada produk yang diserap. "Bila ada demand maka produksi meningkat sehingga menciptakan lapangan pekerjaan," paparnya.

Jazilul Fawaid senang kepala desanya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah seorang lulusan Amerika Serikat dan masih muda. Hal demikian menunjukkan banyak anak desa yang memilih pulang kampung dan berkarya di sana. “Lebih memilih mengelola desa,” tuturnya. □

AWG

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Nagekeo

Di hari yang sama, 29 Juli, selepas pukul 19.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menghadiri dan membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di aula pertemuan salah satu hotel di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, NTT. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan warga masyarakat Kabupaten Nagekeo. Meski kabupaten ini termasuk zona hijau, namun acara itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selain Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dalam acara itu, hadir pula anggota MPR Fraksi PKB Dipo Nusantara Pua Upa; Bupati Kabupaten Nagekeo, Johannes Don Bosco; Anggota DPRD dari kabupaten yang ada di Pulau Flores; Kepala Dinas Pemerintahan Nagekeo; Pemuda Ansor; Pemuda Katolik; dan lainnya.

Dalam pemaparannya, Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa ini kali pertama berkunjung ke Nagekeo. “Saya bersyukur bisa ke sini,” ujarnya. Ia bersama rombongan datang ke kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ngada merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya di Pulau Flores. “Saya mengawali perjalanan di Kabupaten Ende dan berakhir di Labuan Bajo,” tuturnya, Nagekeo (29/7/2020).

Di hadapan peserta sosialisasi, Politisi PKB itu menyebut, Pulau Flores sangat luar biasa.

“Di Ende, di saat menjalani masa pengasingan, Bung Karno merenung dan menemukan Pancasila,” ucapnya. Jazilul melihat, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan masyarakat Pulau Flores. Buktinya, di sini dengan keberagaman dan perbedaan tidak menjadi factor terjadinya konflik. “Perbedaan dan keberagaman justru menjadi penguat di masyarakat,” ucapnya. “Saya melihat kekuatan masyarakat Flores adalah mampu menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai pengikat. Itu adalah inti dari Empat Pilar,” tambahnya.

Selanjutnya, Jazilul menjelaskan, menyosialisasikan Empat Pilar merupakan amanat yang wajib dilakukan oleh anggota MPR berdasarkan UU MD3. “Ini tugas saya selaku Anggota dan Pimpinan MPR,” ujar pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagai anggota NU, Jazilul Fawaid menyatakan, sebutan Empat Pilar di organisasi ini kerap dilafalkan dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI Tahun 1945. Disingkat PBNU,” ujarnya. Untuk itulah sosialisasi yang dilakukan untuk memperkuat PBNU. “Bangsa Indonesia lestari kalau PBNU kuat,” tuturnya. “Kalau PBNU lemah maka kondisi bangsa ini sebaliknya,” tambahnya.

Selanjutnya, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menyatakan, masyarakat harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kebanggaan perlu disyukuri sebab banyak negara belajar toleransi kepada bangsa Indonesia. “Soal toleransi, kita menjadi rujukan bangsa lain,” paparnya. Ia mencontohkan Afghanistan pernah belajar soal toleransi di Indonesia. Padahal,

menurut Jazilul Fawaid, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, beragam agama, bahasa, dan budaya. “Kekayaan dan keberagaman menjadi perekat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Jazilul juga menyampaikan fungsi dan tugas kedudukan MPR. MPR di masa lalu dan di masa saat ini berbeda. Di masa lalu, MPR merupakan lembaga tertinggi. Presiden pada masa itu adalah Mandataris MPR. “Presiden saat itu dipilih oleh MPR,” paparnya.

Adanya reformasi membuat MPR tak seperti dulu. MPR menjadi lembaga negara setara dengan lembaga Kepresidenan, DPR, MK, DPD, MK, KY, BPK, dan MA. Meski demikian, MPR mempunyai tugas mengubah dan menetapkan UUD. Jazilul kemudian mengungkapkan, beberapa waktu lalu, ketika ada wacana melakukan amandemen terbatas, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke berbagai ormas keagamaan. Dalam pertemuan tersebut, MPR meminta masukan soal wacana amandemen terbatas.

Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR Dipo Nusantara menyebutkan, Empat Pilar sudah final. Sama seperti yang dikatakan Jazilul Fawaid bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hal demikian bisa dilihat dalam kehidupan keseharian. Saat pesta adat dan budaya, kata Dipo, masyarakat yang beragam agama bisa melakukan secara bersama dengan membagi tugas masing-masing. “Hal demikian perlu dilestarikan,” tegasnya. □

AWG

Hari Ketiga, 30 Juli 2020: Sosialisasi 4 Pilar di Stiper Flores

Di hadapan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Flores, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, 30 Juli 2020, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengakui bahwa dia baru pertama kali datang ke Ngada. “Ngada hawanya dingin, namun warganya hangat,” ujarnya. Kelebihan daerah ini, menurut Jazilul, kopi bajawa-nya sangat terkenal.

Kedatangan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ke kampus yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik itu untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih populer disebut Empat



Pilar MPR. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh anggota MPR dari Fraksi PKB Dipo Nusantara, anggota DPRD dari beberapa kabupaten di Pulau Flores, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Th Yosnono, para Forkopimda, dan mahasiswa. Sosialisasi ini mengambil tema: 'Aktualisasi Nilai 4 Pilar Kebangsaan Dalam Era New Normal', .

Dalam kesempatan itu, Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19. Sehingga dia datang ke kabupaten ini dengan mematuhi prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "Sekarang banyak orang takut pada Covid-19," ujar pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dia menyebut, pandemi Covid-19 tidak hanya melanda Indonesia, namun juga seluruh dunia. Negara-negara di Eropa yang terimbas wabah itu membuat gerak perekonomian di sana menjadi minus. Akibatnya, seluruh

negara yang terdampak mengalami atau diambang krisis. "Kita tidak tahu kapan wabah ini berawal dan kapan akan berakhir," ujarnya. Tidak jelasnya penularan Covid-19 membuat semua pontang-panting.

Melawan Covid-19, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, jangan semua daerah disamaratakan. "Jangan semua sekolah dan pasar ditutup," ucapnya. Hal demikian berbahaya dan merugikan masyarakat. Tidak semua daerah zona merah. Ada daerah zona hijau. "Ngada zona aman," sebutnya. Meski demikian, kabupaten ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Sikap yang berlebihan dalam menghadapi Covid-19 tidak menguntungkan masyarakat.

Pandemi Covid-19, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, tidak hanya menjadi tantangan dalam masalah perekonomian dan kesehatan, namun juga dalam masalah kebangsaan. "Pancasila juga diuji," tuturnya.

Dalam melawan Covid-19 diperlukan sikap kebersamaan dan saling membantu. Untuk itu, dia berharap, sikap gotong royong dan menjaga persatuan perlu dikedepankan. "Tanpa hal itu hidup akan menjadi lebih berat," paparnya.

Ia bersyukur di Ngada rasa persatuan dan kesatuan terjaga. Gus Jazil mengakui, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dia menceritakan bagaimana saat Soekarno menjalani pengasingan di Ende, ia menemukan nilai-nilai dan dasar-dasar negara. Nilai-nilai inilah yang menurut Gus Jazil perlu terus dilestarikan dan dijaga.

Masyarakat Pulau Flores mayoritas beragama Katolik. Ada ungkapan Soegijapranata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dari hal demikian, Gus Jazil menyebut, agama yang ada di Indonesia menjwai nilai-nilai Pancasila. "Mari kita kuatkan Pancasila untuk membangun bangsa dan negara," tegasnya.

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di NTT, Gus Jazil mendorong agar Ngada terus maju dan berkembang. Agar kabupaten ini berkembang, dia mendorong agar pemerintah kabupaten setempat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. "Harus bersinergi dengan semua komponen yang ada," paparnya. □

AWG

Saksikan Upacara Sakral Suku Deu

Pagi menjelang siang, 30 Juli 2020, ribuan warga Kampung Boawae, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, NTT, hadir di lapangan balai adat. Mereka yang berasal



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nesia. Dia menyebut, di Kabupaten Ende ada Danau Kelimutu, ada Rumah Pengasingan Bung Karno. Di Kabupaten Ngada ada Kampung Bena. Di Manggarai ada Wae Rebo, di Manggarai Barat ada Labuan Bajo, serta banyak lagi di Pulau Flores.

Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu merasakan promosi pariwisata tentang Pulau Flores kurang maksimal. "Seharusnya dipromosikan seperti Bali," ujar Jazilul saat mengunjungi Kampung Bena (31/7/2020). Dia mengakui, wabah Covid-19 menjadi penyebab dunia pariwisata menjadi sepi, namun seperti pada masa-masa normal, tempat wisata di sana biasanya ramai penjual jasa, seperti tukang foto, penjual oleh-oleh, kerajinan, dan sektor jasa lainnya. Hal demikian, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tidak ditemukan di Kampung Bena dan tempat wisata lainnya di Pulau Flores. "Di sini hanya disuruh tanda tangan dan setelah itu masuk," paparnya.

Lebih lanjut Jazilul mengungkapkan, di lokasi wisata yang ada di Pulau Flores tidak ada ruang bagi pedagang dan pelaku jasa wisata lainnya. "Hal demikian membuat sektor wisata yang ada tidak memberi dampak menguntungkan bagi masyarakat sekitar," tuturnya.

Potensi yang besar di Pulau Flores dalam sektor wisata, menurut Gus Jazil, perlu lebih dipromosikan dan dikembangkan agar mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar sektor wisata di pulau itu berkembang ditempuh dengan cara: *Pertama*, harus melakukan kerja sama dengan agen atau travel biro. Travel biro itulah yang bertugas untuk mempromosikan, mengundang, dan mengajak masyarakat luas untuk berwisata di Pulau Flores.

Kedua, kaum pengguna medsos, entah itu facebooker, youtuber, twitter, dan instagramer ikut mempromosikan tempat wisata di pulau ini. "Media sosial kan mudah, murah, dan cepat," ujarnya. "Jadi pihak pemerintah kabupaten dan provinsi bisa melakukan kerja bareng dengan kaum medsos," tambahnya. Penggiat medsos yang kebanyakan kaum milenial, tentu akan semakin menarik bila mereka membuat foto. "Dengan gaya milenial pastinya akan menarik orang untuk datang ke Pulau Flores," paparnya.

Datang ke Kampung Bena, Gus Jazil

merasa kagum dengan bangunan yang ada di kampung yang sudah ada sejak 1.200 tahun lalu. Selama ini dia hanya melihat Kampung Bena yang tersusun dari kayu dan ijuk di gambar-gambar yang tersebar. "Banyak filosofi dari bangunan yang ada di kampung ini," tuturnya. Dalam kunjungannya itu, dia sempat melihat rumah dan bangunan dengan ragam ukuran dan bentuk. Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu juga melihat penduduk yang sedang menenun dan membeli beberapa kain hasil tenunan. □

AWG

Serahkan Hewan Kurban di Pulau Flores

Di depan Masjid Agung Baiturrahman, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdiri tenda yang di bawahnya terdapat deretan kursi. Tak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jauh dari situ terdapat puluhan ekor sapi dan kambing yang diikat dengan tali. Pada hari itu, 31 Juli 2020, takmir masjid, umat Muslim di Ruteng, dan Ketua MUI Manggarai menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Kedatangan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ke masjid itu untuk memberikan seekor sapi sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Di hadapan umat Muslim di sana, Jazilul Fawaid mengucapkan rasa syukur dan bahagia, sebab pada Idul Adha tahun ini, dia bisa merayakan di Pulau Flores. "Saya memberi hewan kurban di Kabupaten Ende, Ngada, dan Manggarai," ungkapnya. "Pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada saudara-saudara di Ruteng," tambahnya.

AWG

Idul Adha, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu merupakan momen untuk mempertebal rasa keimanan serta menumbuhkan jiwa berbagi dengan sukarela. "Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya. Dalam masa pandemi Covid-19, banyak negara terkena dampak resesi. Hal demikian bisa saja juga terjadi di Indonesia.

Menghadapi dampak pandemi Covid-19, Gus Jazilul mengingatkan masyarakat agar bersiap-siap menghadapi serta melakukan hidup gotong royong untuk menghadapi tantangan yang ada.

Dalam kesempatan itu, Gus Jazilul mengungkapkan bahwa selama kunjungannya di Pulau Flores ini, dia dapat melihat bahwa di daerah-daerah yang disinggahi dan dikunjungi alamnya tumbuh dengan beragam pe-

pohonan yang hijau. Juga terbentang sawah dan ladang. "Kita hidup di daerah yang makmur," ucapnya. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mensyukuri apa yang ada.

Masjid yang besar di Ruteng yang ditinjau oleh Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, di bagian dalamnya sedang ada renovasi. Sebagai umat Islam, Gus Jazilul tersentuh dan menyebut akan membantu renovasi masjid yang terletak di pinggir jalan itu. "Kami datang dan mengabarkan untuk bisa membantu," ujarnya. Dengan bantuan yang hendak diberikan, dia berharap agar pembangunan cepat selesai. "Mudah-mudahan amal kita menjadi berkah," ucapnya yang langsung diamiini oleh masyarakat yang datang saat itu. □

Sosialisasi Empat Pilar FPPI

Bamsoet: Tingkatkan Kiprah Politik Kaum Perempuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, bangga dengan capaian bangsa Indonesia dalam hal kesetaraan gender. Tak seperti di Amerika Serikat, negeri yang dikenal leluhur demokrasi dan pejuang emansipasi wanita, namun masih terjebak dalam permasalahan kesetaraan gender.

Sejak diusulkan pertama kali pada Desember 1923 oleh pemimpin Partai Wanita Nasional, Alice Paul, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, namun hingga kini usulan Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan, dalam Konstitusi Amerika Serikat masih mengalami stagnasi.

Sedangkan konstitusi Indonesia sejak awal disahkan pada 18 Agustus 1945 selalu merujuk individu subjek hukum dengan sebutan 'setiap orang' atau 'setiap warga

negara'. Menurut Bamsoet, tak ada satu pasal pun yang merujuk pada status gender pria atau wanita. Banyak tokoh perempuan terlibat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

"Setidaknya ada 14 tokoh perempuan yang telah diangkat menjadi pahlawan nasional, antara lain RA Kartini, Tjoet Njak Dhien, Tjoet Njak Meutia, Dewi Sartika, hingga Malahayati," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (10/8/20). Para pengurus FPPI yang hadir, antara lain Ketua Umum Marlinda Irwanti, dan Sekretaris Jenderal Dyah Eko Setyowati.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, di bidang politik dan kepemimpinan, perempuan Indonesia juga sudah mampu mendapatkan

kepercayaan rakyat. Di usia kemerdekaan baru memasuki 56 tahun, Indonesia sudah mampu memiliki presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004). Sementara Amerika Serikat yang kini kemerdekaannya sudah memasuki usia ke-244 belum mampu memiliki pemimpin perempuan.

Pada Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, perempuan juga berhasil mendapatkan berbagai kepercayaan rakyat. Tercatat 14 perempuan berhasil menjadi kepala daerah (1 gubernur, 10 bupati, dan 3 walikota). Sementara 17 perempuan terpilih menjadi Wakil Kepala Daerah (2 wakil gubernur, 9 wakil bupati, dan 6 wakil walikota).

Menjelang 75 tahun kemerdekaan Indonesia, keterwakilan perempuan di DPR RI juga meningkat. Yakni, dari 97 orang pada periode 2014-2019 menjadi 118 orang pada periode 2019-2024 atau sekitar 20,5% dari total 575 anggota DPR RI. Jumlah ini, menurut Bamsoet, memang masih kurang, mengingat Undang-Undang memberikan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. "Mudah-mudahan menjelang 100 tahun kemerdekaan, kiprah perempuan di dunia politik akan lebih banyak lagi," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, walaupun secara konstitusi sudah baik, bukan berarti pelaksanaan kesetaraan gender tak mendapatkan hambatan. Berdasarkan laporan Indeks Kesetaraan Gender Dunia (The Global Gender Gap Index) Tahun 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menempatkan Indonesia pada urutan ke-85 dari 153 negara, jauh di bawah Filipina (urutan 16), Laos (urutan 43), maupun Amerika Serikat (urutan 53).

"Dalam laporan tersebut juga terdapat capaian positif yang telah diraih Indonesia. Sub indeks kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan meningkat tajam, mencapai 96,1% dan 95,7%. Peningkatan di kedua bidang tersebut diharapkan mampu membawa perempuan Indonesia berkiprah lebih jauh lagi," pungkas Bamsoet. □



Kota Bogor, Jawa Barat

Syarief Hasan Ajak Masyarakat Menjaga Pancasila

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. Syarief-uddin Hasan, MM., MBA., mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan melestarikan Pancasila. Jangan sampai abai, atau hanya menyerahkan tugas menjaga dan melestarikan Pancasila kepada pemerintah. Apalagi jika Pancasila tengah dalam ancaman, seperti munculnya upaya penggantian dasar dan ideologi negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hingga kini, menurut Syarief Hasan, masih ada kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Cara yang digunakan pun bermacam-macam, baik dengan cara yang sesuai aturan maupun yang bertentangan dengan konstitusi. "RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah contoh sebuah upaya mengganti Pancasila. Karena, RUU HIP secara implisit menghendaki adanya perubahan terhadap Pancasila hasil kesepakatan 18 Agustus 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945," kata Syarief Hasan.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Syarief Hasan saat menyampaikan sambutan pada acara Temu Tokoh Nasional dengan masyarakat Desa Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (23/7/2020). Acara yang berlangsung di Pos Kamling Bale Riung Kampung Mekarsari, RT 02/04, Desa Harjasari, Bogor Selatan, itu dihadiri oleh KH. Deden Asnawi, tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pe-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

santren Annuriyah.

Lebih lanjut, Syarief Hasan menjelaskan, antara Pancasila 18 Agustus dan Pancasila 1 Juni memiliki perbedaan yang sangat jelas. Antara lain, sila Ketuhanan pada Pancasila 1 Juni merupakan sila kelima. Sementara di Pancasila 18 Agustus sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama. Karena itu, kata Syarief Hasan, wajar kalau RUU HIP ditolak oleh masyarakat.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, mempertahankan Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah Negara, menjadi pilihan yang tidak dapat ditawarkan. Pancasila mengajarkan bangsa In-

donesia untuk selalu hidup rukun dan damai. Karena itu, siapapun yang berusaha mengubah Pancasila harus ditolak.

"Pancasila bukan hanya membawa kerukunan dan kedamaian, tapi Pancasila juga akan membawa kesejahteraan, melalui sistem ekonomi kerakyatan, koperasi. Pancasila akan membuat bangsa Indonesia bersatu padu, jauh dari permusuhan dan perpecahan," katanya.

Pada kesempatan itu, Syarief Hasan juga mengajak masyarakat untuk menjalani kebiasaan baru selama pandemi Covid-19. Yakni, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker, serta jaga jarak. Jangan keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat penting.

Syarief Hasan tak lupa mendoakan semoga warga Desa Harjasari selalu sehat, mudah rezeki, serta hidup rukun. Selain itu, wabah Corona yang kini tengah berjangkit di dunia tidak sampai menimpa warga Harjasari.

Pertemuan yang berlangsung di Pos Kamling Bale Riung, Kampung Mekarsari, RT 02/04, itu berlangsung meriah dan religius. Acara diawali dengan pembacaan tahlil yang dilanjutkan acara Maulid Nabi. Bahkan, ketika proses mahalul qiyam, tampak banyak warga secara khusus menghayati setiap kalimat yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. □

MBO



Sosialisasi Empat Pilar PMKRI

Bamsoet Ajak Atasi Persoalan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, pada 17 Agustus 2020, bangsa dan bangsa dan negara Indonesia memperingati, sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun. Usia tiga perempat abad seharusnya cukup mendewasakan sebagai sebuah bangsa dalam mengarungi dinamika dan laju peradaban zaman. Kiranya peringatan dan perayaan hari kemerdekaan ini tidak hanya dimaknai sebagai euforia momentum sejarah, melainkan juga harus menjadi sarana kontemplasi dan perenungan yang men-

dalam, khususnya bagi generasi muda.

“Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat kiprah para pemuda Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan, antara lain Bung Tomo, Bung Hatta, Ir. Soekarno, Sutan Sjahrir, dan tak terhitung lagi banyaknya pemuda tanpa nama yang rela mengorbankan harta, mempertaruhkan nyawa, demi mewujudkan satu cita bersama, yaitu Indonesia Merdeka,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), secara virtual dari Ruang Kerja

Ketua MPR RI, Jakarta, Senin, (10/8/20).

Pengurus PMKRI yang hadir, antara lain Ketua Presidium Benediktus Papa dan Sekjen Tri Natalia Urada.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, kemerdekaan yang diraih dengan peluh keringat dan tetes darah para pejuang pahlawan bangsa, bukanlah sebuah tujuan akhir. Kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, diperlukan konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain berkaitan dengan dasar falsafah negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan karakter ke-Indonesiaan.

“Peran generasi muda juga sangat penting, baik sebagai generator pembangunan maupun sebagai agen perubahan yang mendorong lahirnya inovasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, peran generasi muda menjadi semakin penting, khususnya sebagai sumberdaya potensial yang dapat mendukung kinerja pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga menyoroti modernitas yang menghadirkan tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya. Misalnya, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, masih tingginya kesenjangan sosial, hingga masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia.

“Upaya untuk senantiasa menjaga kebersamaan, persatuan, persaudaraan, harmoni dan toleransi dalam keberagaman adalah perwujudan terbentuknya kembali jati diri bangsa sebagai fitrah kebangsaan. Dalam spektrum lebih luas, upaya kita melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan berbagai ketertinggalan adalah juga bentuk perjuangan kembali kepada jati diri bangsa sebagai satu kesatuan tujuan bangsa,” pungkas Bamsoet. □



Gowes To Nation

Anak Muda Tetap Optimistis di Masa Pandemi Covid-19



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



SEBANYAK 115 orang yang datang dari berbagai kelompok masyarakat, pada Ahad, 26 Juli 2020, mengikuti acara 'Gowes To Nation'. Acara yang start dan finish di halaman utama Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, itu mengambil rute Kompleks Parlemen – Bundaran Hotel Indonesia - Komplek Parlemen.

Hadir dalam acara itu Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar; Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid; Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah; Ketua Umum Garda Bangsa sekaligus Anggota MPR, Tommy Kurniawan; dan masyarakat luas.

Kepada wartawan, Jazilul Fawaid menuturkan, agenda hari ini merupakan kegiatan untuk mengekspresikan semangat dan optimisme hidup, sebab hari ini masyarakat takut dan khawatir dengan pandemi Covid-19. "Untuk itu kita adakan gowes agar semangat dan optimisme tetap ada," ujarnya.

Optimisme dan semangat, menurut Jazilul, sangat penting. Sebab bila tidak mempunyai optimisme dan semangat akan berdampak pada banyak bidang, termasuk masalah perekonomian. "Bila tidak optimistis

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga," ujarnya.

Dia juga berpesan kepada anak-anak muda agar di masa pandemi Covid-19 tidak boleh kehilangan kreatifitas. "Salah satu menjaga kreatifitas adalah menjaga kesehatan lewat gowes," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu.

Peserta 'Gowes To Nation', seperti dijelaskan Jazilul Fawaid, berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan kota serta daerah lainnya. "Mereka adalah anak muda yang gemar gowes dan fun bike," tuturnya. Menurut Gus Jazil, jumlah peserta dibatasi, bila tidak maka jumlah peserta bisa mencapai ribuan. "Hanya perwakilan," ungkapnya.

'Gowes To Nation,' menurut Jazilul Fawaid, sudah dilakukan di hampir semua daerah. Acara yang demikian disebut sebagai jejaring anak muda untuk berhimpun, menguatkan diri, dan saling berbagi. "Intinya begitu," ucapnya.

Walau acara tersebut dilakukan secara massal, namun dilakukan dengan protokol kesehatan. Semua protokol kesehatan diterapkan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan suhu tubuh diukur. "Jadi tidak ada masalah," paparnya. Meski jumlah peserta banyak, pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu yakin dan optimistis tidak ada masalah. "Menunjukkan pesan kepada publik bahwa anak-anak muda yang berani, optimistis, dan selalu menjaga kesehatan," tegasnya.

Penyebaran Covid-19 memang tidak diketahui. Ketakutan yang berlebihan, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, itu justru akan memengaruhi ketahanan dan kesehatan tubuh. Di masa pandemi Covid-19, kata Gus Jazil, kita tidak boleh terlalu berani namun juga tidak boleh terlalu takut. "Kita waspada tetapi tidak takut", ungkapnya. □

DER

Gladi Bersih Sidang Tahunan MPR 2020



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara gladi bersih Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Bersama Ketua DPR Puan Maharani, dan

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua MPR memastikan bahwa Sidang Tahunan MPR dilakukan sesuai dengan susunan acara yang telah dibuat dan disepakati.

Kemudian Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD memerhatikan secara detail para petugas peraga Sidang Tahunan MPR dalam melaksanakan seluruh susunan acara, mulai dari menyambut kedatangan presiden dan wakil presiden, foto bersama, dan membuka Sidang Tahunan oleh Ketua MPR. Lalu, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD, pidato kenegaraan Presiden Jokowi, pembacaan doa, dan penutupan sidang oleh Ketua DPR.

Ketua MPR dengan lugas memberikan pertanyaan-pertanyaan, arahan-arahan dalam berbagai prosesi simulasi Sidang Tahunan tersebut. □

DER

Rakor Sidang Tahunan Setjen MPR Bersama Setjen DPR dan DPD

DALAM rangka persiapan untuk menyukseskan agenda besar kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (7/8/2020), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, digelar Rapat Koordinasi antara Setjen MPR, DPR dan DPD.

Rakor yang dihadiri Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, Sesjen DPR dan Sesjen DPD ini diselenggarakan untuk membahas berbagai persiapan agenda Sidang Tahunan MPR 2020 dan Sidang Bersama DPR-DPD. Rakor juga membahas berbagai prosedur baru, terutama protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam Rakor tersebut, Setjen MPR bersama Setjen DPR dan DPD menyusun berbagai kesepakatan pelaksanaan teknis dan non teknis berdasarkan arahan dari pimpinan masing-masing lembaga. Lalu,

hasil rakor kemudian dilaporkan kepada Pimpinan MPR, DPR dan DPD untuk menjadi bahan pertimbangan. □

DER

Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-75 Virtual di Setjen MPR



SEKRETARIS Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono bersama para pejabat eselon II bertempat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Setjen MPR RI mengikuti secara virtual upacara HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam upacara kemerdekaan tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didaulat hadir secara fisik dan membacakan teks proklamasi. Sesjen MPR dan para pejabat eselon mengikuti upacara dengan khidmat hingga selesai. Usai upacara, Sesjen didampingi para pejabat eselon memotong tumpeng sebagai tanda syukur hari lahirnya Indonesia Merdeka yang ke-75. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR

Ini Pilkada Serentak Paling Berisiko

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 yang sempat tertunda karena wabah Covid-19 kini kembali dilanjutkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan KPU dalam rapat dengar pendapat pada 27 Mei 2020 menawarkan tiga opsi penundaan Pilkada Serentak, yakni: Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. Dengan berlandaskan Perppu No. 2 Tahun 2020, akhirnya diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semula rencananya digelar pada 23 September 2020 resmi diundur menjadi 9 Desember 2020.

Pada tahun ini Pilkada Serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih besar dibandingkan Pilkada Serentak sebelumnya di 171 daerah (2018), 101 daerah (2017), dan 269 daerah (2015). Namun, penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, di masa pandemi Covid-19 belum juga surut, telah menuai polemik, terutama masalah kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih. Ada kekhawatiran muncul klaster baru di tengah tahapan Pilkada Serentak.

Untuk membahas masalah ini, beberapa waktu lalu, MPR menggelar diskusi tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Berikut perbincangan dengan anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, seputar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Petikannya.

Pilkada Serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia. Pilkada Serentak diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Karena itu Pilkada Serentak menimbulkan banyak kekhawatiran. Bagaimana tanggapan Bapak?

Memang Pilkada Serentak kali ini adalah Pilkada yang berisiko. Karena itu, ketika memutuskan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, kami di Komisi II juga berhitung dan mempertimbangkan banyak hal secara cermat. Kita pun sudah mengundang Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, saat itu Doni Monardo. Pertanyaannya saat itu, jika Pilkada Serentak ditunda apakah ada kepastian pandemi Covid-19 akan mereda? Opsi penundaan Pilkada Serentak adalah Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Misalnya,

Pilkada Serentak ditunda menjadi September 2021, apakah pandemi Covid sudah tidak ada? Saat itu Doni Monardo menjawab, tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Apakah Desember 2020 atau Maret 2021 pandemi Covid-19 sudah tidak ada, juga tidak bisa dipastikan.

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, kalau Pilkada Serentak ditunda maka akan ada 270 pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Padahal dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid seperti ini diperlukan kepemimpinan yang definitif dengan dukungan partai politik. Akhirnya kita mengambil kesimpulan, keberadaan Plt Kepala Daerah adalah negatif buat respon daerah menghadapi Covid-19. Sedangkan, kalau Pilkada Serentak ditunda juga tidak ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini mereda atau hilang. Akhirnya, DPR, pemerintah, dan KPU menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Karena itu, saya mengatakan, ini adalah Pilkada yang berisiko.

Meski Pilkada Serentak kali ini berisiko, tapi kita berharap hasilnya juga baik, yaitu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu mengoptimalkan

seluruh kemampuan yang ada untuk melawan pandemi Covid-19. Dalam konteks kebangsaan, Pilkada Serentak ini bisa menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan. Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dengan menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi Covid-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, tidak menjadi kluster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat.

Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2020 masih menimbulkan polemik. Banyak kalangan meminta agar Pilkada Serentak ditunda hingga pandemi Covid-19 mereda. Ada juga yang berpendapat, untuk daerah-daerah zona merah sebaiknya tidak perlu dilakukan Pilkada. Apa pendapat Bapak?

Sebenarnya dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 juga dibuka soal penundaan Pilkada Serentak. Dalam Perppu itu selain menetapkan 9 Desember sebagai hari pemungutan suara Pilkada Serentak, juga disebutkan Pilkada Serentak bisa ditunda jika terjadi extraordinary condition. Memang masih banyak yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 ini. Sebanyak 270 daerah melaksanakan Pilkada dan melibatkan 105 jutaan orang yang harus digerakkan. Pilkada Serentak ini menjadi orkestra yang indah kalau kita bisa melaksanakan dengan baik. Tetapi Pilkada Serentak ini juga bisa menjadi musibah kalau kita tidak menerapkan secara ketat protokol kesehatan Covid-19.

Kita juga harus memastikan daerah yang melaksanakan Pilkada memenuhi standard Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Misalnya, WHO menetapkan standard positivity rate sebesar 5%. Positivity Rate ini diukur dari perbandingan antara jumlah tes yang dilakukan dengan jumlah kasus positif.

Dengan mengikuti standard WHO ini kita bisa menentukan daerah yang masuk zona merah, kuning, atau hijau. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menentukan 14 item untuk menetapkan zona suatu daerah apakah masuk zona merah, kuning, atau hijau. Menurut saya, daerah-daerah yang masuk zona merah, kuning atau hijau, itu harus diumumkan. Jika sudah



proven daerah-daerah yang masuk zona merah, kuning atau hijau, barulah kita bisa memutuskan apakah Pilkada bisa dilaksanakan di daerah-daerah itu.

Daerah yang masuk zona hijau silakan untuk melaksanakan Pilkada, sedangkan daerah yang masuk zona kuning agar lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan Pilkada, dan untuk zona merah sebaiknya Pilkada ditunda lebih dahulu. Dari penetapan ini mudah-mudahan orkestra dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak bisa berjalan dengan baik. Jadi, kita menggunakan scientific base untuk menentukan zona daerah yang melaksanakan Pilkada untuk memastikan Pilkada bisa berjalan dan tidak menimbulkan kluster baru penularan Covid-19.

Bagaimana kampanye Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 ini?

Kita juga memberi perhatian khusus dalam



Peraturan KPU (PKPU), khususnya dalam soal kampanye Pilkada. Kampanye pada Pilkada Serentak harus mengikuti beberapa persyaratan, seperti ruangan yang luas untuk menampung kampanye yang diikuti 200 orang. Setiap orang harus menjaga jarak dengan yang lainnya. Kita mendesak KPU dan Bawaslu untuk menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Jika sebelumnya KPU dan Bawaslu fokus ke money politics, sekarang kami mengusulkan agar menegaskan protokol kesehatan Covid-19. Sebab, ada kekhawatiran kampanye yang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19 bisa menjadi cluster baru. Karena itu, kami juga mengusulkan agar ada sanksi bagi peserta Pilkada yang tidak melaksanakan protokol Covid-19. Misalnya, kampanye satu pasangan calon jika ternyata tidak melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 maka hal itu menjadi temuan dan bisa dilaporkan. KPU dan Bawaslu juga bisa menjatuhkan sanksi kepada pasangan calon, termasuk sanksi yang paling berat berupa diskualifikasi dari Pilkada. Sebab, tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sangat berbahaya sekali.

Ada kekhawatiran petahana atau incumbent akan mempolitisasi bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemberian bantuan sosial untuk mendapatkan dukungan pemilih. Bagaimana tanggapan Bapak?

Karena itu saya mengusulkan semua petahana atau incumbent yang maju lagi dalam kontestasi Pilkada tidak boleh menjadi Ketua Tim Penanganan Covid-19 di daerah. Begitu dia mendaftar menjadi calon peserta Pilkada maka dia harus berhenti menjadi ketua tim. Sebab, kalau dia masih menjadi ketua tim penanganan Covid-19 di daerah maka dia menggunakan peluang untuk mengendalikan penanganan Covid-19, termasuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak Covid-19. Dan ini sangat berbahaya sekali, karena itu dia harus berhenti sebagai ketua tim.

Kemendagri sudah menerima usulan kita agar urusan penanganan Covid-19 tidak dipegang oleh incumbent yang maju lagi. Kita akan mengecek ke Kemendagri apakah usulan ini dilaksanakan atau tidak. □

Pensyarah dan Penyair Bumi

Lancang Kuning



HARI itu, Ahad (23/8/2020), matahari begitu terik. Di Areal Panggung Ziarah Kesenian (ZK) Dato Jantan (Toktan) di Kecamatan Tenanyan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, ada acara. Pagelaran Seni Budaya dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR. Diselenggarakan oleh MPR atas inisiasi Ir. HM. Idris Laena, MH., anggota MPR RI asal Riau. Beragam acara dipertunjukkan. Ada ceramah Empat Pilar oleh Idris Laena. Lainnya membuat bazar hasil karya UMKM, dan kesenian seperti pantun, puisi, dan musik.

Cuaca gerah sejenak tak dirasakan ketika seorang perempuan bergaun panjang dan memakai hijab tampil di panggung. Tampil pertama sebelum acara dibuka secara resmi oleh pembawa acara, Haji Aris Abeba, yang tak lain perintis dan pendiri Panggung Toktan. **Qori Islami**, nama si perempuan berparas elok itu. Usianya 34 tahun. Dia adalah puteri Aris Abeba, seorang sastrawan dan budayawan Riau.

Bak pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Qori Islami pun mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang penyair, sutradara teater, dan pensyarah (dosen) di Universitas Lancang Kuning, Riau. Bahkan dia kini disertai tugas menjadi pemimpin Panggung ZK Toktan setelah ayahnya, Aris Abeba istirahat dan kini menyebutkan dirinya hanya sebagai imam Panggung Toktan.

Sebagai seorang penyair, hari itu Qori Islami membawakan puisi karya Dheni Kurnia berjudul: *Talang di Langit Palestina*. Diiringi petikan gitar oleh Syahfitra, yang tak lain adalah suaminya. Sungguh serasi antara bait-bait puisi dan irama petikan gitar. Terasa mengalun. Intonasi suaranya kadang datar, kadang melengking tinggi, kembali lembut, mendayu, dan cenderung merintih. Amat memukau. □

Qori Islami

SCH

Kreatif Untuk Survive Dari Pandemi

YOUTUBER dan vlogger satu ini memang luar biasa. **Atta Halilintar** memiliki subscriber sekitar 25 juta dan terbesar di Asia ini tak canggung berbicara tentang kenegaraan dan Pancasila, termasuk ketika nge-vlog bareng bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu.

Ketika nge-vlog bareng Bamsuet, Atta yang bernama lengkap Muhammad Attamimi Halilintar ini mengungkapkan, pandemi corona memang sangat menyusahkan banyak orang. "Tapi Pak, saya yakin jika kita kreatif dalam menghadapi ini, kita akan survive," ujarnya.

Di dalam situasi pandemi ini, Atta pernah membuat kampanye agar 1 (satu) orang yang masih memiliki kemampuan di masa sulit ini mau membantu 10 atau 3 orang di sekitarnya, maka dampaknya sangat terasa. "Kalau kampanye ini terjadi maka kesusahan akibat pandemi akan hilang, karena kita saling toleransi, membantu satu sama lain, dan ikut merasakan kesulitannya," tambahnya.

Intinya, lanjut Atta, rakyat Indonesia itu sebenarnya mudah bersatu, mudah saling membantu, memiliki solidaritas sangat tinggi sesuai Pancasila. "Maka dari itu mari kita bangkit untuk saling bantu agar kita semua lepas dari belenggu kesulitan akibat pandemi ini," tegasnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Atta Halilintar



Ayu Ting Ting

Curhat Soal Pendidikan Anak

ARTIS penyanyi dangdut dan presenter, **Ayu Ting Ting**, beruntung. Dari sekian banyak youtuber yang memiliki subscriber jutaan, pelantun lagu 'Alamat Palsu' ini termasuk salah satu yang mendapat kesempatan bertemu dan nge-vlog bareng bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Sebelumnya beberapa artis dan youtuber juga telah nge-vlog dengan Bamsuet.

Ketika pertemuan itu berlangsung, Rabu (12/8/2020), Ayu Ting Ting tak mau membuang kesempatan menyampaikan keluh kesahnya. Apa saja? Sebagai ibu dari seorang puteri, Ayu berbicara soal pendidikan anak di masa pandemi Covid-19 ini. "Aduh ribet Pak, kerasa banget kita sebagai ibu-ibu direpotkan soal pendidikan anak di masa corona ini," ujarnya. Sebelum corona, kata Ayu, anak terbiasa sekolah bertemu guru, bermain. Tapi sekarang belajar di rumah saja. Mau tak mau harus beradaptasi dengan rutinitas baru, harus terus mendampingi anak belajar.

Ketika Bamsuet bertanya, apakah di kalangan artis, entertainer, masih memiliki karakter bangsa, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila? Ayu menjawab, masih ada. "Contohnya saya sendiri. Kan setiap hari saya ngajarin anak saya soal cinta Indonesia, cinta budaya bangsa. Seperti menjelang HUT Kemerdekaan RI, saya ajarkan lagu-lagu kebangsaan sampai hafal," katanya.

Ayu Ting Ting pun menyanggupi tantangan Ketua MPR agar menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lagu perjuangan tersebut dinyanyikan Ayu dengan lancar. □

DER



Taman Renungan Bung Karno Saksi Perjuangan Soekarno di Pulau Ende

TAMAN Renungan Bung Karno di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara timur (NTT) merupakan salah satu tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di taman inilah, dahulu Ir. Soekarno diasingkan oleh penjajah Belanda. Dan di sinilah Bung Karno, Sang Proklamator Indonesia menemukan pemikiran tentang dasa-dasar negara, yang kini dikenal dengan istilah Pancasila.

Sayangnya, taman yang berada di dekat pelabuhan Ende itu tampak kurang terawat. Setidaknya, begitulah penilaian Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., saat berkunjung dan menyaksikan taman itu belum lama. Pepohonan yang tumbuh di taman tersebut tidak terawat dengan baik. Sampah berupa dedaunan kering dan kantong-kantong plastik berserakan di seputar taman tersebut.

Kondisi tersebut, menurut Jazil, tidak mendukung sejarah taman sebagai temuan besar yang pernah dialami Bung Karno. Apalagi, bangsa Indonesia gencar memperkuat dan memasyarakatkan Pancasila. Namun, di sisi lain, di tempat nilai-nilai Pancasila ditemukan kondisinya masih memprihatinkan dan perlu dibenahi.

Selain bersih dari sampah dan penataan tanaman, sejatinya di areal Taman Renungan Bung Karno itu tersedia pula fasilitas pendukung. Seperti, perpustakaan, laboratorium Pancasila, dan bila perlu dijadikan tempat pendidikan kebangsaan selama 2-4 bulan. Fasilitas seperti itu diperlukan agar sebanding dengan temuan Bung Karno di Ende tersebut.

Untuk itu, Gus Jazil mengajak semua pihak, termasuk para pengusaha, pihak

swasta, masyarakat luas, dan pemerintah pusat untuk bersama-sama membangun dan membenahi Taman Renungan Bung Karno ini agar menjadi taman yang indah dan megah.

Sumbangan atau bantuan bisa dalam bentuk apa saja. "Bila ada yang ahli desain maka sumbangkan pikiran tentang tata kota. Bila dia pengusaha, bantulah dana," harap Gus Jazil.

Untuk tujuan itu, Gus Jazil bertekad akan





mengampanyekan keberadaan Taman Renungan Bung Karno agar menjadi lebih baik. Karena itu, Gus Jazil berharap, agar pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera berkontribusi untuk membenahi Taman Renungan Bung Karno sebelum membenahi situs-situs lainnya.

Diasingkan

Taman Renungan Bung Karno ini terletak di Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Lokasi bersejarah ini diresmikan pada 1 Juni 2013 oleh Wakil Presiden, Prof. Dr. H. Boediono B.Sc., M.Ec., didampingi oleh Ketua MPR, waktu itu, Taufiq Kiemas (alm).

Taman Renungan Bung Karno berada kawasan strategis. Dikelilingi sejumlah perkantoran, antara lain: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bank BRI, Bank NTT, Wisata Pantai Ria, Taman Rendo, Markas Kodim 1602 Ende, dan Pelabuhan Ende.

Selain Taman Renungan Bung Karno, di lokasi tersebut juga terdapat lapangan Pancasila dan rumah bersejarah peninggalan Bung Karno beserta keluarga semasa diasingkan di Ende pada 1934-1938. Di rumah ini pengunjung dapat meresapi kesederhanaan Bung Karno selama dalam pengasingan.

Selama empat tahun dalam pengasingan, Bung Karno dikucilkan dari kolega dan kegiatan politik dalam sebuah rumah milik Abdullah Ambuwawu, berukuran 9x18 meter. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar

tidur, kamar tamu, dan sebuah ruangan untuk beribadah.

Pohon Sukun

Sebelum berada dalam masa pengasingan (1934 – 1939), Bung Karno berada di penjara Sukamiskin. Pergerakannya bersama para pemuda menjadi alasan kolonialis Belanda mengasingkannya di Ende. Untuk tiba di tempat tersebut, Soekarno harus menempuh perjalanan selama delapan hari, menggunakan kapal laut.

Selama dalam pengasingan, Soekarno hanya memiliki sedikit akses berkorespondensi. Meski kondisi itu membuatnya tertekan, tetapi Bung Karno tetap semangat. Bahkan, Bung Karno bisa memanfaatkan masa pengasingannya dengan mempelajari agama Islam lebih dalam. Ia juga mempelajari pluralisme dengan berbincang bersama pastor di Ende.

Tak jauh dari rumah pengasingan Bung

Karno terdapat sebuah taman yang di dalamnya terdapat sebatang pohon sukun. Di bawah pohon sukun itulah Bung Karno merenungkan dan mendapat ide tentang dasar-dasar negara, yang kelak kemudian dipakai setelah Indonesia merdeka. Saat ini taman tersebut dikenal dengan nama Taman Renungan Bung Karno, atau Taman Renungan Pancasila.

Di sana terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung menghadap ke Pelabuhan Ende, tepat di bawah pohon sukun. Bung Karno memang kerap melakukan itu semasa dalam pengasingan di sana. Namun, pohon yang ada saat ini bukanlah pohon sukun tempat Bung Karno merenung kala itu. Pohon sukun bersejarah itu sudah tumbang sejak 1960. Sedangkan pohon sukun yang ada sekarang adalah pohon sukun yang ditanam pada 1981. □

MBO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad Al-Haddar

Politisi dan Wirausahawan nan Sukses



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

VAKSIN dan obat yang mampu membasmi virus corona, Covid-19, belum juga ditemukan. Setiap hari, jumlah penduduk bumi yang terinfeksi dan menjadi korban pandemi virus corona terus bertambah. Di Indonesia, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 telah mencapai ratusan ribu orang. Jumlah korban tersebut dipercaya bakal terus bertambah, apalagi masih banyak warga masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan, dan tak peduli terhadap bahayanya virus ini.

Belum lagi keganasan corona bisa tertanggulangi, para pengamat, ahli ekonomi, dan penentu kebijakan sudah dibuat pusing akibat ulah corona. Pasalnya, virus yang pertama kali ditemukan di Tiongkok ini menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kontraksi, dan sebagian diantaranya mengalami mati suri.

Salah satu tokoh yang inten memperingatkan pemerintah agar berhati-hati menghadapi dampak corona di sektor perekonomian adalah Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad Al-Haddar. Di berbagai kesempatan, mantan politisi partai berlambang pohon Beringin ini kerap mengingatkan pemerintah agar mewaspadai mandeknya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat virus corona.

Agar resesi ekonomi tidak bertambah buruk, Fadel menyarankan, pemerintah harus berani mengambil langkah ekstrim. Tak cukup hanya dengan langkah-langkah biasa. Tetapi juga dengan cara-cara tak biasa, sekalipun cara itu tidak mungkin dilaksanakan pada kondisi normal. Yang penting, serapan anggaran negara, baik di tingkat pusat melalui APBN maupun di daerah berupa APBD harus berjalan lancar. Jangan terhalang aturan birokrasi yang kerap kali hanya

menyusahkan.

“Sekarang ini kondisinya sedang tidak normal. Tidak ada referensi apapun yang bisa digunakan untuk menuntun kita menghadapi persoalan yang sekarang kita hadapi ini. Jadi, pemerintah baik di pusat maupun daerah mesti berani mengambil risiko, jangan sampai terlambat,” kata Fadel kepada *Majalah Majelis* saat menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sektor keuangan, kata Fadel, tengah terhuyung karena terhantam corona. Likuiditas keuangan bergerak lamban. Perbankan semakin enggan mengeluarkan duit. Untuk mengatasinya, pemerintah harus secepatnya turun tangan, ikut mengendalikan sektor ini. Caranya, pemerintah harus mau menginjeksi dana di dunia perbankan. Ini perlu dilakukan supaya likuiditas berangsur membaik. Agar lembaga keuangan bisa menurunkan bunga bank bagi pengusaha kecil, hingga dua atau bahkan satu persen.

Kemudian, kredit yang dipinjam rakyat kecil dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA), jumlahnya mencapai 10 juta dengan total anggaran Rp 142 triliun, tidak perlu diberi bunga, agar tidak menjadi beban bagi rakyat kecil. Lalu, usaha-usaha pertanian serta perikanan berskala menengah perlu mendapat perhatian tersendiri.

“Ketiga langkah itu perlu secepatnya diterapkan untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat, meski dalam kondisi normal kebijakan seperti itu tak mungkin diterapkan,” ujar Fadel.

Juga yang harus terus diperhatikan, menurut Fadel, adalah masalah ketahanan pangan. Jangan sampai karena pandemi, ketahanan pangan menjadi goyah. Bukan hanya persoalan beras,



tetapi juga bahan pangan lain, termasuk jagung, ubi, dan sagu.

Menyangkut sengkaret ekspor *baby lobster* yang sempat menyita perhatian masyarakat, Fadel berpendapat, selama ada peluang pasar dan rakyat mampu menjangkau, hendaknya bisnis tersebut tidak dibatasi. Biar saja mereka menjual benih lobster dan tidak perlu dilarang. Bahkan, perbanyak saja orang yang bisa menggarap benih lobster dengan cara memberi pelatihan.

“Dulu saya pernah ribut soal benih kerapu. Saat itu, memperbanyak benih kerapu memang sulit. Kerapu kawin dan bertelur hanya pada

saat bulan purnama. Karena itu, saya pasang lampu besar menyerupai purnama. Ternyata teknologi ini berhasil, dan banyak anggota masyarakat diuntungkan,” kata Fadel lagi.

Ternate, Maluku Utara

Sebagai politikus, Fadel Muhammad adalah satu dari sedikit politisi yang bisa dibilang lengkap. Ia pernah menjadi petinggi parpol, jabatannya adalah Bendahara Partai Golkar (1999-2004), lalu Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2009-2011). Fadel adalah Gubernur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Provinsi Gorontalo dua periode pada kurun waktu 2001-2009. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009 – 2011, dan anggota DPR pada 2014-2019. Kemudian, pada periode sekarang atau 2019-2024, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara, 20 Mei 1952, ini menjadi Pimpinan MPR dari unsur Kelompok DPD.

“Pada 2019 saya memilih mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Ini sesuai dengan idealisme saya sendiri, kalau boleh setelah umur 60 tahun tidak lagi menjadi calon di DPR, untuk memberi karpet merah kepada anak-anak muda serta para kader agar mereka bisa merasakan persaingan dan mengabdikan diri di DPR RI. Karena itu saya konsisten dengan idealisme saya. Namun, karena rakyat meminta saya berkontribusi bagi daerah maka saya mencalon diri lewat DPD,” kata Fadel.

Selama puluhan tahun menjadi politisi, Fadel Muhammad merasa perjalanannya menjabat gubernur dua periode adalah masa-masa yang penuh inspiratif. Terutama, keberhasilannya meningkatkan produktivitas jagung hingga lebih dari 500% kali lipat. Jumlah tersebut berpat-gulipat dengan kebanyakan capaian pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8-10%.

Sayang, capaian itu mandek bersamaan habisnya masa bakti suami Hj. Hana Hasanah Shahab ini sebagai Gubernur Gorontalo. Sejak itu, produksi jagung di Provinsi Gorontalo kembali landai, seperti sesaat sebelum Fadel menjadi kepala daerah di sana.

“Meniru itu ternyata tidak gampang. Apalagi, jika gubernurnya memiliki visi misi serta program sendiri. Hal ini seolah membenarkan anggapan bahwa keberhasilan itu cenderung menempel pada pribadi seseorang. Seperti misalnya, setelah kiainya meninggal sebuah pesantren mengalami kemunduran,” ujar Fadel.

Hingga kini, Fadel menyayangkan prestasi yang pernah dicapainya gagal diteruskan oleh para Gubernur Gorontalo

berikutnya. Padahal, Fadel mengaku sering memberi saran dan masukan agar program produksi beras, ikan, dan pangan pada umumnya bisa ditingkat kembali, seperti saat dia menjadi gubernur.

Wirausaha

Sukses di ranah politik yang dicapai Fadel tak lepas dari keberhasilannya berwirausaha. Sebelum menjejakkan kedua kakinya di ranah politik, Fadel Muhammad sudah dikenal sebagai wirausahawan sukses. Tanda-tanda kesuksesannya di sektor ekonomi, bahkan sudah terlihat sejak ia kecil.

Sejak kecil, sosok Fadel Muhammad sudah pandai mencari penghasilan sendiri. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, ia sempat berjualan roti yang dibuat oleh orangtuanya sendiri. Fadel juga pernah berjualan barang-barang kelontong di pasar, dengan





menggelar tikar sebagai alasnya.

Kepiawaiannya mencari peluang usaha terus berlanjut. Saat kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), Fadel memanfaatkan sebagian waktu luangnya untuk jualan koran. Di Kota Kembang ini Fadel juga membuka usaha bisnis kecil-kecilan. Seperti, jual kaos di toko ITB, atau menawarkan dagangannya kepada para siswa Sekolah Menengah Atas.

Kemampuan entrepreneurshipnya makin teruji ketika menjadi pengurus koperasi mahasiswa ITB. Saat itu, koperasi membuka keagenan sepeda motor, dan itu memberi keuntungan sangat besar, baik bagi anggota maupun koperasinya. “Yang penting dikerjakan dengan tekun dan hasilnya halal. Semua itu, saya lakukan dengan sukacita karena saya memang selalu ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak,” tutur Fadel.

Berbekal pengalamannya yang panjang, Fadel menjelma menjadi ahli di bidang kewirausahaan. Tulisannya tersebar di berbagai media. Bahkan gelar doktor yang diperolehnya merupakan buah keberhasilan dari disertasi tentang pemikiran kewirausahaan. Keilmuan Fadel Muhammad dalam bidang kewirausahaan makin diakui dengan pemberian gelar Guru Besar di bidang Public Sector Entrepreneurship dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Mahasiswa Teladan

Fadel adalah anak sulung dari orang tua yang berprofesi sebagai guru dan pedagang antarpulau. Setelah tamat SMA di Ternate, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Industri, Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Semasa kuliah, Fadel memiliki prestasi gemilang, hingga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan pada 1975.

Selama kuliah, ia mendapat beberapa tawaran beasiswa, namun semua ditolak, sehingga Fadel pun meraih gelar insinyur pada 1978. Selain mendapat gelar sarjana di ITB, ia kemudian meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan menjadi Profesor di Universitas Brawijaya, Malang. Dengan kapasitasnya sebagai insinyur, Fadel mendirikan PT. Bukaka. Dimulai dari bengkel kecil reparasi alat berat, hingga menjadi perusahaan engineering yang terpanandang.



“Bagi saya kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa gubernur atau Pimpinan MPR itu adalah muara dari hidup saya. Karena itu, saya tidak akan pernah berhenti keculi mati. Apalagi, saya selalu terobsesi ingin berbuat baik bagi banyak orang. Karena itu, saat corona merebak seperti sekarang banyak orang yang kesusahan, dan saya semakin concern terhadap mata pencaharian dan pekerjaan,” kata Fadel lagi. □

MBO

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad Al-Haddar

Istri : Hana Hasanah Shahab

Anak : Tiga orang

KARIER

- Presiden Komisaris/Chairman:
 - PT Arco Chemical Indonesia, 1987-2004
 - PT Dowel Andarill Schlumberger Indonesia, 1985-2004
 - PT Gema Baker Nusantara, 1983-2003
 - PT Gema Sembrown, 1998
 - PT Nesic Bukaka, 1993
- Komisaris Utama INTAN Group, 1995-2004
- Komisaris Utama WARTA Group, 1989
- Komisaris Utama SIERAD Group, 1994 – 1999
- Presiden Direktur BUKAKA Group, 1987- 1997
- Komisaris Utama BATAVINDO Group, 1995 – 2000
- Ketua Dewan Pembina Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi/BKPRS, 2003 – 2005
- Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, 2003 – 2007
- Ketua Dewan Jagung Indonesia, 2004
- Gubernur Provinsi Gorontalo, 2001-2006, 2006-2009
- Menteri Kelautan dan Perikanan, 2009-2011
- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2009-2014, 2014-2019
- Anggota DPR RI, 2014-2019

Pandemi Covid-19 Ujian Terhadap Pemahaman Empat Konsensus Kebangsaan

LEBIH dari empat bulan kita dihantui ganasnya ancaman virus corona yang menjadi wabah di Tanah Air. Virus yang awalnya menyebar di Tiongkok itu mengubah tatanan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang sejatinya sering berkumpul diimbau untuk berpisah demi memutus rantai sebaran virus yang diberi nama Covid-19.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu respon pengendalian Covid-19 pun diambil. Namun, ibarat dua sisi pisau, di satu pihak PSBB dinilai efektif mengendalikan penyebaran Covid-19. Tetapi di sisi lain, pemberlakuan PSBB berdampak ke perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perkiraannya bahwa pada kuartal dua tahun ini akan terjadi kontraksi sehingga pertumbuhan ekonomi minus 3,1 persen. Agar Indonesia tidak menuju resesi, Sri Mulyani berharap, pada kuartal tiga tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa pulih di kisaran 0 persen.

Karena apabila kondisi ekonomi lebih parah dari prediksi, dampak lanjutannya adalah pengangguran, dan rentetan berikutnya adalah kemiskinan. Bila kondisi ini berlangsung sedikit lebih lama, krisis sosial pun bisa melanda. Maka, mau tidak mau, ekonomi harus bergerak. Pemerintah pun melonggarkan kebijakan PSBB. Memang tantangannya adalah bagaimana agar ekonomi bergerak, tetapi penyebaran Covid-19 terkendali.

Kita memahami empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks menghadapi pandemi, seharusnya melaksanakan protokol kesehatan tidak menjadi barang sulit.

Menggunakan masker bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang di sekitar kita. Melaksanakan protokol kesehatan bukan untuk diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekat kita. Sekat seharusnya untuk menumbuhkan rasa saling menjaga, bukan pemisah apalagi primordialisme bahkan

egosentrisme.

Tetapi sangat disayangkan lebih dari empat bulan wabah Covid-19 ini merebak, jumlah orang yang positif terpapar terus bertambah. Padahal para ahli epidemiologi hanya mensyaratkan kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang intinya melakukan tiga hal saja, yaitu: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak adalah untuk memutus rantai penyebaran virus yang pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok itu.

Apakah empat konsensus kebangsaan yang kita pahami dan yakini tidak mampu menggerakkan masyarakat Nusantara untuk disiplin melakukan tiga hal mudah yang dipersyaratkan para epidemiolog itu? Atau masyarakat tidak memahami apa yang dihadapi? Sebagai sebuah ujian, masing-masing kita harus segera mencari jawaban bagaimana kita bisa berperan dalam mengendalikan penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya itu.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya sudah menyiapkan jawaban, antara lain nilai-nilai kepedulian terhadap sesama dan gotong royong yang memungkinkan setiap kita bisa menjadi agen pemutus rantai penyebaran virus. Di sejumlah daerah sebenarnya sudah ada gerakan yang merealisasikan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan dalam menghadapi wabah Covid-19.

Di Jawa Tengah, misalnya, ada *Jogo Tonggo*, sebuah gerakan yang dibuat untuk saling menjaga tetangga saat pandemi Covid-19. Di Jawa Timur ada gerakan Kampung Tangguh yang mendorong masyarakat peduli terhadap berbagai upaya penanggulangan dan pengendalian Covid-19. Tetapi, pada kenyataannya masih ada saja di sekitar kita masyarakat yang abai terhadap kewajiban melaksanakan protokol kesehatan, sebagai bagian upaya memutus penyebaran Covid-19. Sebagian dari mereka merasa dirinya sehat-sehat saja, jadi tidak peduli terhadap protokol kesehatan yang ada.

Di tingkat pemerintah daerah bahkan ada beberapa pimpinan daerah terkesan menjadikan upaya pengendalian Covid-19 ini ajang unjuk kebolehan, demi popularitas pribadi. Akibatnya, koordinasi

Oleh:
Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI



dalam pengendalian Covid-19 di wilayah mereka berantakan, warga yang terpapar virus pun terus bertambah.

Dalam menghadapi wabah yang mengancam kehidupan bersama, seharusnya yang dikedepankan adalah kepentingan kita, bukan diri pribadi semata. Mengedepankan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bisa menjadi jalan keluar. Bila setiap kita mendahulukan kepentingan bersama di masa pandemi, tentu dengan sukarela para pemimpin bekerja mengutamakan keselamatan warganya.

Kebhinnekaan jangan membuat kita terpecah dalam menghadapi ujian. Mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi wabah Covid-19 menjadi sebuah keharusan. Setiap kita harus dengan ikhlas menggunakan masker saat bersosialisasi, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan dengan tujuan agar kita tidak menulari orang lain, meski dirinya tidak menunjukkan gejala.

Sebagai sebuah ujian, pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita betapa pentingnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negara. Kebutuhan dasar, seperti kemandirian pangan, energi, dan kesehatan, harus menjadi prioritas. Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum bangsa ini mengerem kebiasaan impor produk-produk pangan dan energi serta alat-alat kesehatan. Biaya yang biasa dialokasikan untuk impor seharusnya disalurkan untuk mendanai pasokan pangan lokal, memproduksi energi alternatif yang bersumber dari non-fosil, dan produksi alat kesehatan buatan bangsa sendiri. Nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila bisa mendorong kemandirian bangsa cepat terwujud.

Dengan kemandirian di tiga sektor tersebut kita bisa mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat, sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kita harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk menanamkan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan dalam

menghadapi segala tantangan dan ujian sebagai bangsa. Yakinlah watak warga negara bisa diubah menjadi lebih baik dengan berbagai upaya. Bangsa Australia yang nenek moyangnya para penjajah pun saat ini bisa menjadi bangsa yang beradab.

Demikian juga dengan kebiasaan warga Jabodetabek naik kereta commuter yang puluhan tahun lalu sulit mematuhi keadaban, hingga naik di atas atap. Namun dengan diterapkannya sistem dan aturan yang tepat, saat ini para penumpang kereta commuter Jabodetabek bisa patuh dan tertib saat naik kereta.

Wabah Covid-19 menjadi alarm bagi kita sebagai warga bangsa, bahwa saat ini Ibu Pertiwi membutuhkan pengamalan dari nilai-nilai empat konsensus kebangsaan untuk mengatasi dampak dari penyebaran virus corona. Pengalaman di atas meyakinkan kita bahwa menanamkan nilai-nilai menjadi sebuah perilaku warga bangsa itu sebuah keniscayaan.

Demikian juga nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan kita yaitu, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi pendorong setiap warga bangsa untuk mengendalikan Covid-19.

Saya yakin, nilai-nilai dalam empat konsensus kebangsaan bisa tertanam dalam hati sanubari setiap warga bangsa dan mewarnai setiap tingkah laku dalam keseharian mereka.

Asalkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di negeri ini mampu menumbuhkan kesadaran untuk memahami, menjiwai, dan mengamalkan nilai-nilai dalam empat konsensus kebangsaan dengan sungguh-sungguh, serius, dan konsisten.

Bila semangat gotong-royong, cinta Tanah Air, mengutamakan kepentingan bersama tanpa memandang suku, agama, dan ras, menjadi dasar perilaku setiap warga negara Indonesia, saya yakin tidak ada krisis yang tidak bisa diatasi oleh bangsa kita. Termasuk krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. □

Dinamika Wacana GBHN

Keinginan menghadirkan haluan negara model GBHN dikemas dalam satu buku. Buku ini mengupas secara jelas mengenai sejarah haluan negara, dinamika pendapat, dan pentingnya bangsa ini memiliki haluan negara.

MPR Periode 2009–2014 mengeluarkan Keputusan No. 4/MPR/2014 Tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009 - 2014. Satu dari tujuh rekomendasi itu berbunyi: “Melakukan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.”

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut MPR periode berikutnya (2014-2019) melakukan serap aspirasi masyarakat dengan berbagai metode untuk mengetahui tentang bagaimana bagusnya haluan negara sebagai acuan pembangunan nasional. Semua aspirasi masyarakat, dari berbagai kalangan, terutama dari perguruan tinggi, akhirnya dibukukan oleh Badan Pengkajian MPR dengan judul: *Urgensi GBHN Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*.

Buku bersampul hitam itu memiliki tebal vi dan 288 halaman, terbagi dalam V Bab. Haluan negara sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Haluan negara sudah diterapkan sejak kali pertama negara ini berdiri, 17 Agustus 1945. Tentang kapan haluan negara diterapkan tertuang dalam Bab II dengan judul *Haluan Negara Dari Masa Ke Masa*. Di bab ini diuraikan bahwa haluan negara terklasifikasi dalam periode awal kemerdekaan, 1945-1949, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, periode berlakunya kembali UUD Tahun 1945, periode setelah perubahan UUD Tahun 1945, dan evaluasi atas ketiadaan haluan negara pasca perubahan.

Gelombang reformasi yang terjadi pada 1998 tidak hanya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, tapi hal-hal yang ada di masa pemerintahan Soeharto atau pada masa Orde Baru juga ‘dijatuhkan’. GBHN yang selalu didengung-dengungkan pada masa itu, selepas reformasi tidak digunakan lagi. Hal demikian dikuatkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada halaman 43 diuraikan, menetapkan GBHN tidak dimungkinkan pada UUD NRI Tahun 1945, dengan dalih: *Pertama*, pandangan yang menjadikan pemilihan langsung sehingga tidak ada ‘haluan negara’. *Kedua*, UUD NRI Tahun 1945 lebih menegaskan sistem presidensiil, sehingga GBHN dianggap dapat melunturkan sistem presidensiil.

Pandangan yang demikian ‘dibantah’ pada halaman 44. Bila GBHN disebut memperlemah sistem presidensiil, hal itu patut dikaji. Buku itu mengingatkan, keberadaan sistem perencanaan pembangunan

nasional model GBHN (haluan negara) tidak berimplikasi kepada perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dalam buku itu disebut tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, hanya saja pada saat Presiden merumuskan haluan pembangunan (RPJMN) harus berdasarkan haluan negara yang bersifat pokok yang telah dirumuskan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh MPR.

Adanya kekhawatiran bila Presiden tidak menjalankan GBHN membuat dia bisa dimintai pertanggungjawaban, dibantah dalam buku itu. Disebutkan, atas pelaksanaan GBHN ini bukanlah laporan pertanggungjawaban, akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-

lembaga negara kepada rakyat yang difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR (tahunan). Tidak ada konsekuensi hukum dari MPR terhadap laporan kinerja tersebut. Rakyatlah yang akan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja lembaga-lembaga negara apakah sesuai dengan haluan negara atau tidak.

Untuk menghadirkan kembali haluan negara, dalam buku itu, politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan, upaya untuk menghadirkan kembali haluan negara diperlukan langkah konstitusional, yaitu melalui jalan perubahan atas UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas. Lebih lanjut dikatakan oleh alumni GMNI itu, perubahan terbatas akan mengatur MPR diberi kewenangan konstitusional untuk membentuk dan menetapkan GBHN sebagai dokumen haluan negara.

Pengaturan haluan negara dalam UUD diinginkan agar ketetapan hukumnya lebih kuat daripada bila ditetapkan dalam undang-undang (UU). Bila ditetapkan dalam UU maka GBHN bisa di-judicial review.

Dalam Bab V, penutup, disebutkan bahwa hampir semua negara di dunia memiliki haluan negara. Menghadirkan GBHN sebagai haluan negara adalah untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Buku yang terbit pada 2017 itu bisa jadi akan disusul dengan terbitnya buku-buku serupa, sebab dinamika soal menghadirkan haluan negara model GBHN di kalangan partai politik dan masyarakat terus bergulir. □

AWG



HUT KE-75 MPR RI: MPR PENGATUR CUACA DAN IKLIM AGAR KEHIDUPAN BERBANGSA TETAP TEDUH

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.09/TH.XIV/SEPTEMBER 2020



SIDANG TAHUNAN MPR 2020 **Berlangsung Dalam Keterbatasan Tapi Tetap Khidmat**

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Perspektif
Merawat Ketahanan Komunal
di Tengah Pandemi Covid-19

28 Nasional
Akuntabilitas Laporan
Kinerja Lembaga Negara

39 Selingan
Menunggu Ilmuan
Peyelamat Ummat Manusia

52 Majelis Khusus
Momentum Refleksi dan
Evaluasi Sistem Ketatanegaraan



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.XIV/SEPTEMBER 2020



08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020

Agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2020 dilaksanakan dengan segala keterbatasan di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis.



18 Nasional

Peringatan HUT ke-75 MPR RI: Seminar Pembentukan Majelis Syuro Dunia



52 Majelis Khusus

Hari Konstitusi: Momentum Refleksi dan Evaluasi Sistem Ketatanegaraan



39 SELINGAN

Penyelamat Ummat Manusia



76 Profil

Fadel Muhammad

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	36
Sosialisasi	56
Varia MPR	67
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.09/TH.XIV/September 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Sidang Tahunan MPR 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan untuk masuk ke Gedung Nusantara guna mengikuti Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR para peserta harus menyertakan surat keterangan telah melakukan PCR *swab test* dan *rapid test*. Protokol kesehatan ini dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Inilah yang membedakan Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya dengan Sidang Tahunan MPR di masa pandemi ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR digelar dalam keadaan normal maka wajar kalau berlangsung semarak dan meriah. Tapi, karena kondisi tak normal maka Sidang Tahunan MPR kali ini digelar lebih sederhana. Agenda acara dipersingkat dan ada pembatasan kehadiran fisik para anggota MPR dan undangan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Jadi, pandemi Covid-19 membuat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2020 ini lebih ringkas.

Pimpinan MPR menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang telah menghadiri secara fisik Sidang Tahunan MPR yang disatukan dengan Sidang Bersama DPR – DPD. Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengikuti Sidang Tahunan MPR 2020 secara virtual. Selain itu, tokoh-tokoh lainnya yang mengikuti Sidang Paripurna MPR ini, antara lain Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden kesembilan Hamzah Haz, dan Wakil Presiden kesebelas Budiono.

Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin MPR setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak MPR masa jabatan 2014 – 2019. MPR menggelar Sidang Tahunan sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Dengan Sidang Tahunan MPR, rakyat bisa mendapatkan informasi tentang apa-apa yang sudah dilaksanakan lembaga negara selama satu tahun.

Sidang Tahunan MPR juga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga-lembaga negara kepada rakyat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kerjanya dalam Sidang Tahunan MPR adalah lembaga-lembaga negara yang mendapat mandat dari konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Sidang Tahunan MPR 2020 semula direncanakan masing-masing pimpinan lembaga negara akan menyampaikan laporan kerjanya secara langsung kepada rakyat. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, laporan kinerja lembaga-lembaga negara dirangkum dan disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara secara virtual kepada publik.

Meski berlangsung sederhana dengan segala keterbatasan, Sidang Tahunan MPR tetap memiliki makna yang penting. Dengan Sidang Tahunan MPR kita menegakkan kedaulatan rakyat dan melembagakan demokrasi dengan cara yang terbuka dan transparan. Sidang Tahunan MPR menjadi momentum bagi rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara. Semoga Sidang Tahunan MPR memberi satu dampak positif bagi masyarakat. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,

Tengku Novan Muda Mulya,

Yenita Revi, Ikhwan Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Armansyah,

Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

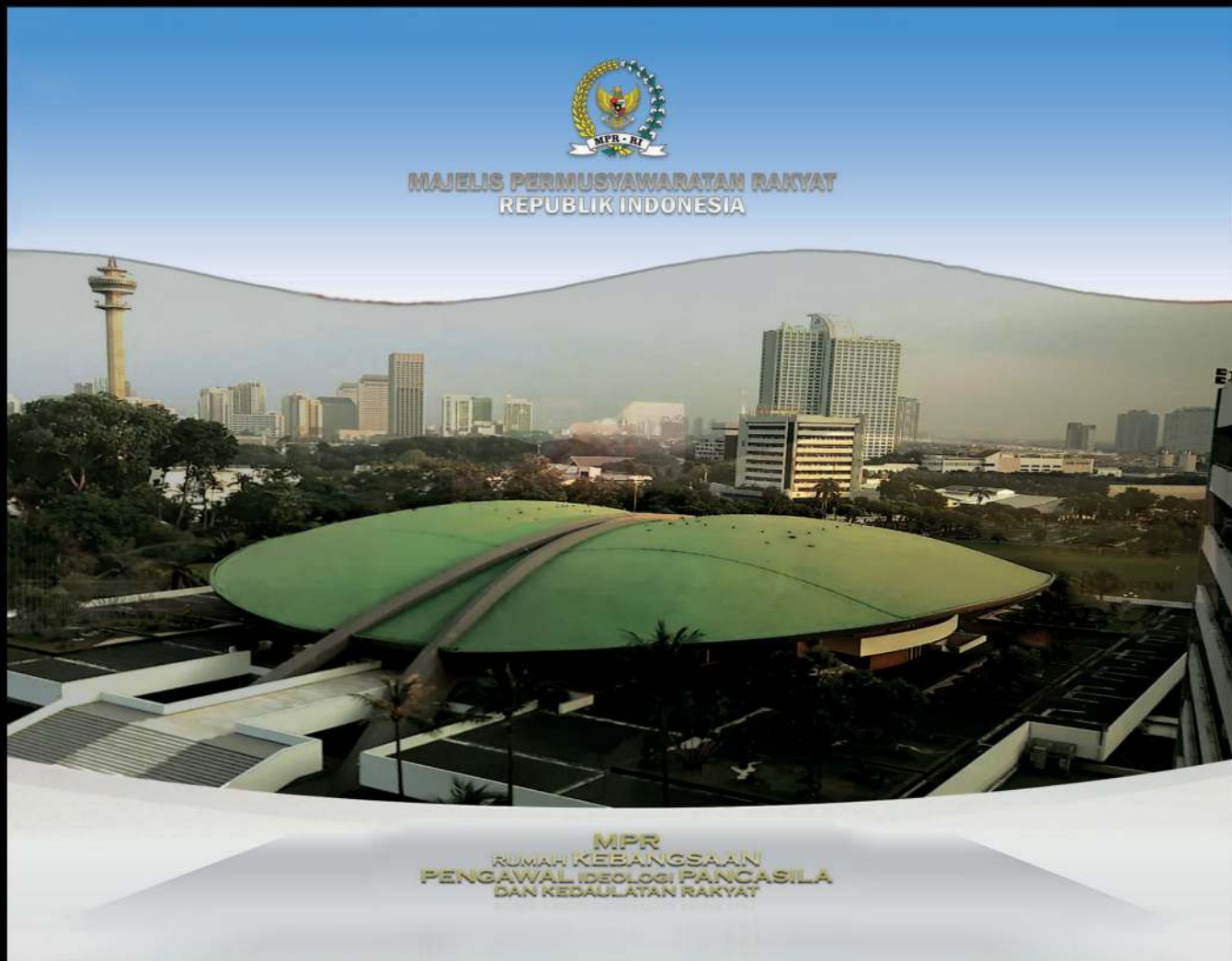
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



EMPAT PILAR MPR RI

- Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
- NKRI Sebagai Bentuk Negara
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Merawat Ketahanan Komunal di Tengah Pandemi Covid-19

UNTUK merawat ketahanan komunal di tengah pandemi Covid-19, pemerintah segera merealisasikan sejumlah program baru yang menyangkut berbagai elemen masyarakat. Ketahanan komunal akan terwujud jika setiap komunitas merespons program-program baru itu dengan cara yang amat sederhana, yakni peduli dan menerapkan protokol kesehatan.

Tanpa bermaksud mengada-ada, kepatuhan semua orang akan protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini memang menjadi kata kunci yang akan memungkinkan masyarakat memulihkan semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang patut ditiru. Berkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, sejumlah negara berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 hingga ke level terendah, dan negara-negara itu mulai berupaya memulihkan kehidupan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan sangat berhati-hati. Sebaliknya, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat sangat tajam dan nyaris tak terkendali karena minimnya kesadaran banyak komunitas akan urgensi mematuhi protokol kesehatan.

Ketika Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk dan memfungsikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang tentu paham kemana arah dan tujuan dari inisiatif itu. Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman Covid-19, dan sekaligus merawat ketahanan ekonomi semua komunitas. Di awal pandemi hingga kini, pemerintah melakukan refocussing anggaran dengan menitikberatkan pembiayaan untuk keperluan bantuan sosial bagi semua kelompok masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran itu berhasil mencegah panik dan takut berlebihan. Kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan terlindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum bisa terjaga.

Demi mewujudkan ketahanan komunal itu, kini pemerintah melangkah ke fase berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-

19 mulai bekerja dengan fokus mendorong semua komunitas mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan target besar dan strategis ini, Presiden mendesak semua pihak bekerja all out. Presiden bahkan berulang kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. Upaya ini diperkuat dengan menghadirkan dukungan dari TNI-Polri. Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu. TNI akan mendukung upaya



semua pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional telah merampungkan beberapa konsep program yang fokus pada upaya merawat ketahanan ekonomi sejumlah komunitas yang terdampak Covid-19, mulai dari komunitas pekerja, tenaga honorer, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga ibu rumah tangga. Untuk pelaku UMKM, Pemerintah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap unit usaha. Target program ini 12 juta pelaku UMKM. Ibu rumah tangga

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



yang mandiri pun tak luput dari perhatian.

Pemerintah menyiapkan stimulus usaha untuk ibu rumah tangga korban PHK dan pelaku usaha mikro dengan kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitur. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, pemerintah menyediakan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran Rp 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Bantuan dengan jumlah yang sama juga disiapkan pemerintah untuk komunitas pekerja berstatus pegawai honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana desa pun telah dialihkan untuk merawat ketahanan ekonomi warga desa.

Itulah beberapa langkah pemerintah yang ditujukan untuk merawat ketahanan setiap komunitas, baik dari aspek kesehatan atau potensi ancaman Covid-19, maupun dari aspek ekonomi warga. Dua aspek ketahanan itu akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya pemerintah, sebagian besar masyarakat pun amat prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Semua orang menderita dan dirugikan, termasuk anak-anak.

Kecenderungan sekarang ini tidak bisa dibiarkan, sehingga pemerintah telah mengambil beberapa prakarsa dengan mengerahkan semua daya dan strategi. Dengan berbagai cara dan

pendekatan, kesehatan masyarakat harus dilindungi dari ancaman Covid-19, dan pada saat bersamaan perekonomian masyarakat harus dikelola sedemikian rupa agar tidak terjerumus ke dalam krisis. Dua tujuan strategis ini bisa terwujud jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

Karena itu, setiap komunitas hendaknya mau bersinergi dengan aparaturnegara. Sebab, untuk meredam dan memutus rantai penularan Covid-19, Pemerintah bersama TNI-Polri telah memulai sejumlah pendekatan berskala masif. Semua upaya itu akan berhasil jika setiap komunitas peduli dan partisipatif. Jika setiap komunitas pada tingkat RT/RW peduli dan berpartisipasi menerapkan protokol kesehatan, upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19 akan berhasil, karena kesadaran dan peran masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan memerangi Covid-19.

Kesungguhan dan kerja keras pemerintah merespons ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 sekarang ini akan sulit, akan sia-sia jika semua komunitas tidak responsif. Kepedulian dan partisipasi setiap komunitas pada semua pemukiman sangat penting dan menentukan. Akan sangat ideal jika setiap pemerintah daerah tidak lagi hanya menerbitkan kebijakan atau instruksi, melainkan lebih mengedepankan ajakan kerjasama dengan mengarahkan setiap pengurus RT/RW hingga kepala desa dalam penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. □

Sidang Tahunan MPR 2020

Berlangsung **Dalam** Keterbatasan Tapi Tetap Khidmat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR 2020 dilaksanakan dengan segala keterbatasan di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis.

PAGI itu sudah tampak kesibukan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Di gedung inilah pada Jumat pagi, 14 Agustus 2020, digelar Sidang Tahunan MPR 2020. Petugas sudah menempati pos masing-masing, mulai pintu masuk hingga di ruangan sidang paripurna. Di pintu masuk, sebelum melewati pintu metal detector yang dijaga Paspampres, para petugas melakukan pemeriksaan ketat setiap orang yang akan masuk ke Gedung Nusantara. Untuk bisa masuk ke Gedung Nusantara, seseorang harus melengkapi dengan surat keterangan telah mengikuti rapid test atau swab test dari rumah sakit atau klinik.

Sejak pukul 07.30 WIB, para anggota dewan, baik anggota DPR maupun anggota DPD, mulai berdatangan ke Gedung Nusantara untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR ini. Anggota dewan tidak hanya mengisi daftar hadir, tetapi juga menunjukkan surat keterangan telah mengikuti swab test. Pun para jurnalis yang meliput di Gedung

Nusantara harus menunjukkan surat keterangan rapid test dan didata petugas. Dua hari sebelumnya, para jurnalis yang meliput di Gedung Nusantara telah mengikuti rapid tes yang difasilitasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rapid test dan PCR (polymerase chain reaction) swab test adalah dua metode yang dilakukan untuk mendeteksi virus Corona atau Covid-19. Rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah. Metode rapid test adalah memeriksa virus menggunakan antibodi IgG dan IgM. Jika di dalam tubuh terjadi infeksi virus maka jumlah IgG dan IgM dalam tubuh akan bertambah. Sedangkan pemeriksaan PCR swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Pemeriksaan PCR swab lebih akurat dan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus Covid-19 di dalam tubuh.

Memang, Sidang Tahunan MPR 2020 tak seperti Sidang Tahunan MPR tahun sebelumnya. Pada tahun ini MPR menggelar Sidang